



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025



bappppedasumedang



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

- a. bab I yang berisi pendahuluan;
- b. bab II yang berisi evaluasi hasil triwulan I tahun anggaran 2025;
- c. bab III yang berisi kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. bab IV yang berisi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. bab V yang berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. bab VI yang berisi penutup.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan dasar penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan PPAS Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Juli 2025



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 30

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.3.1. Maksud.....	I-9
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025	II-1
2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2024	II-1
2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah	II-3
2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	II-3
2.2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024	II-8
2.2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	II-39
2.2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	II-39
2.2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II-41
2.2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-43
2.2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-44
2.2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-46
2.2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	II-48
2.2.4. Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	II-49
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Kinerja Ekonomi Daerah.....	III-5
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-24
3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-28
3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-2

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	IV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	IV-10
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	IV-15
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-24
4.2.1. Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025	IV-24
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	IV-24
4.2.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	IV-31
4.2.4. Keselarasan Prioritas, Sasaran Pembangunan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-34
4.2.5. Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-52
4.2.6. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ...	IV-178
4.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-197
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-1
5.2. Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	V-4
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Utama Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024	II-5
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024	II-9
Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-21
Tabel 2.4	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-40
Tabel 2.5	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-42
Tabel 2.6	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	II-44
Tabel 2.7	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	II-45
Tabel 2.8	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-47
Tabel 2.9	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	II-48
Tabel 2.10	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-50
Tabel 2.11	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025.....	II-51
Tabel 2.12	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Urusan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	II-56
Tabel 2.13	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-167
Tabel 3.1	Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	III-4
Tabel 3.2	PDRB Tahun 2024 menurut Pengeluaran	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024	III-26
Tabel 3.4	Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025.....	III-27
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2024	III-31
Tabel 3.6	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	III-32
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2024	III-34
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	III-35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	IV-16
Tabel 4.2	Sasaran Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	IV-24
Tabel 4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-26
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	IV-28

Tabel 4.5	Sinkronisasi Dan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026.....	IV-31
Tabel 4.6	Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-35
Tabel 4.7	Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2025	IV-53
Tabel 4.8	Hubungan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025	IV-56
Tabel 4.9	Hubungan Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	IV-60
Tabel 4.10	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-65
Tabel 4.11	Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-69
Tabel 4.12	Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	IV-179
Tabel 4.13	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	IV-181
Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025.....	IV-198
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	V-5
Tabel 5.3	Usulan Bantuan Keuangan Desa dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	V-686
Tabel 5.4	Usulan Hibah dan Bantuan Sosial dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	V-709

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2024	II-2
Grafik 3.1 Tren PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024	III-5
Grafik 3.2 Proporsi Komponen PDRB Tahun 2015-2024 berdasarkan Pengeluaran	III-7
Grafik 3.3 Tren ICOR Tahun 2015-2024 Kabupaten Sumedang.....	III-9
Grafik 3.4 Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Tahun 2015-2024 ..	III-11
Grafik 3.5 Proporsi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2024	III-13
Grafik 3.6 Tren PDRB per Kapita Tahun 2015-2024	III-14
Grafik 3.7 Tren dan Komparasi PDRB per Kapita Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2015-2024.....	III-15
Grafik 3.8 Tren dan Kontribusi PDRB Sumedang terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2015-2024.....	III-16
Grafik 3.9 Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024	III-17
Grafik 3.10 Komparasi Tren LPE Sumedang, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2015-2024	III-18
Grafik 3.11 Komparasi Tren LPE Sumedang dan Wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2024	III-19
Grafik 3.12 Kontribusi dan pertumbuhan PDRB Tahun 2024	III-20
Grafik 3.13 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Tahun 2024.....	III-22
Grafik 3.14 Pertumbuhan Lapangan Usaha Triwulanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024	III-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-52
--	-------

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Selain itu, memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disusun kedalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-

2029 serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I menunjukkan perlunya adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 juga memuat perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi gratis (MBG);
 - c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Adanya perubahan lokasi, kelompok sasaran dan pemenuhan pencapaian target kinerja berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.

Berdasarkan keadaan tersebut, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 mencakup analisis ekonomi dan keuangan Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, dan perumusan program kegiatan dan aktivitas sub kegiatan beserta pagu indikatif. Tata cara penyusunan perubahan RKPD disusun dengan tahapan yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD dan penetapan perubahan RKPD.

Guna menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan PPAS serta penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11).
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 12);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);
 44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66).
 45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42).
 46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 26);
 47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.,

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan PPAS serta penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, alasan mengapa Perubahan RKPD ini disusun, proses penyusunan Perubahan RKPD serta pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD sesuai dengan peraturan perundangan dan produk hukum terkait.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaahan tentang kondisi dan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2025, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD sampai dengan Triwulan I.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit hubungan antara indikator makro dengan sasaran visi dan misi Kepala Daerah serta indikator utama Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2025 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD. Selain itu didasarkan juga pada hasil identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan Tahun 2025 baik yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan. Bab ini juga memuat secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi.

Proses evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana target kinerja telah tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pada triwulan berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi dasar bagi penyempurnaan alokasi sumber daya, penyesuaian strategi, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai wahana refleksi awal dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah selama tiga bulan pertama tahun anggaran.

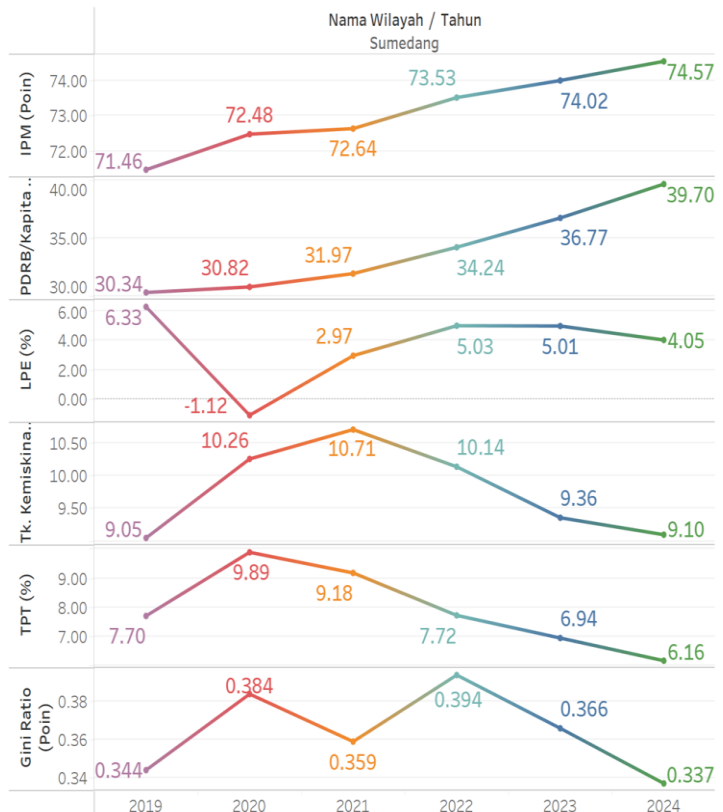
2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2024

Indikator makro merupakan parameter penting dalam menilai kinerja pembangunan suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi dan digunakan oleh pemerintah untuk membuat keputusan kebijakan dan investasi. Berikut adalah data indikator makro Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Komparasi Indikator Makro 2024



Tren Indikator Makro 2019-2024



Grafik 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Secara umum, pencapaian indikator makro Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 menunjukkan tren positif meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. IPM Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 mencapai 74,57, yang sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang tercatat 74,92 dan nasional 75,02. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan kemajuan yang stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB per kapita Sumedang berada pada angka 39,70, masih tertinggal dari Jawa Barat yang mencapai 56,08, dan Indonesia yang mencapai 78,62. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan, perlu adanya akselerasi untuk mengejar ketertinggalan terutama dalam aspek ekonomi.

Indikator LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren yang melambat, dengan pencapaian hanya sebesar 4,05% pada 2024, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah daripada periode sebelum pandemi. Tren ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, tingkat kemiskinan (Tk. Kemiskinan) dan pengangguran (TPT) menunjukkan perbaikan pasca-pandemi, namun keduanya masih menjadi tantangan besar. Tingkat

kemiskinan menurun sedikit menjadi 9,10%, namun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi. Sementara TPT menurun ke angka 6,16%, lebih baik dari Provinsi Jawa Barat yang menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia pada tahun 2024, sehingga capaian Sumedang masih berada di atas rata-rata nasional yang telah mencapai 4,91%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, kualitas lapangan kerja dan daya beli masyarakat masih perlu perhatian lebih.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio juga mengalami penurunan, dengan angka 0,337 pada 2024, yang menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Sumedang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Meskipun demikian, ketimpangan ini tetap fluktuatif dan perlu dikelola dengan baik, terutama di wilayah perdesaan yang masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan.

2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah merupakan merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan. Tujuannya adalah menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana target-target pembangunan telah tercapai, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Selain itu evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan selanjutnya yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan suatu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 sebanyak 24 indikator sasaran daerah yang diampu oleh Badan/Dinas/Kantor Satuan dengan tujuan untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut. Adapun capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Utama Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
					2024	2024		
1	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,11 – 73,99	74,57	100	Sangat tinggi
	1.1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya saing yang didukung teknologi informasi dan komunikasi	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,89 – 9,05	8,74	98,32	Sangat tinggi
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,06 – 13,16	13,02	99,69	Sangat tinggi
	1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,00 – 73,32	75,29	100	Sangat tinggi
	1.3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,19 – 95,62	96,22	100	Sangat Tinggi
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,95 – 72,18	76,99	100	Sangat Tinggi
	1.4	Meningkatnya Kualitas Keagamaan, Kebudayaan, dan Demokrasi Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75	77,60	100	Sangat tinggi
1.5	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46	N/A	N/A	-	
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30 – 6,50	4,05	76,42	Tinggi
	2.1		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	7,56 – 8,45	-1,13	14,95	Sangat rendah

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
					2024	2024		
		Meningkatnya Pengembangan Sektro Pertanian, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,59 – 7,50	5,76	100	Sangat tinggi
			Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,28 – 4,94	6,55	100	Sangat tinggi
			Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	8,01 – 9,75	8,68	100	Sangat tinggi
	2.2	Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	81,40	81,89	100	Sangat tinggi
	2.3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Persen	10,00	15.4059	100	Sangat tinggi
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	9,50 – 7,26	9,10	95,79	Sangat tinggi
			Gini Rasio	Ratio	0,36 – 0,33	0,337	100	Sangat tinggi
	3.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan	Nilai Komposit FSVA	Persen	64,71	N/A	N/A	-
	3.2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta (Rp)	36,20 – 38,32	39,70	100	Sangat tinggi
	3.3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,00 – 6,47	6,16	100	Sangat tinggi

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
					2024	2024		
	3.4	Meningkatnya Perekonomian Pedesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,79	0,87	100	Sangat tinggi
4	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Tangguh		Indeks Resiko Bencana	Poin	109,39	127,24	85,97	
	4.1	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,53	100	Sangat tinggi
	4.2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,55	62,47	95,30	Sangat tinggi
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif		Indeks Reformasi Biorkrasi	Poin	78,02	88,45	100	Sangat tinggi
	5.1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	66	81,33	100	Sangat Tinggi
	5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori/Skor	A (82)	BB (77,44)	94,44	Sangat tinggi
			Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,76	3,64	96,81	Sangat tinggi
	5.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,71	4,58	97,24	Sangat tinggi
	5.4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,30	4,69	100	Sangat tinggi

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

Keterangan: N/A Data tidak dihitung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator sasaran Pembangunan Daerah yang belum mencapai target yaitu 1) Rata-rata Lama Sekolah (HLS); 2) Harapan Lama Sekolah (HLS); 3) Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan; 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 5) Nilai Sakip Kabupaten; dan 6) Indeks Pelayanan Publik. Meskipun belum mencapai target namun capaian setiap indikator telah lebih dari 90 persen sehingga masuk ke dalam predikat “Sangat Tinggi” kecuali untuk indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang capaiannya hanya 14,95 persen sehingga masuk ke dalam predikat “Sangat Rendah”. Berdasarkan hasil penelitian Bappppeda, tidaktercapaian indikator tersebut sebagai salah satu sebab dari adanya transformasi perekonomian di Kabupaten Sumedang yang asalnya berbasis pada pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi industri pengolahan sedangkan tenaga kerja yang tersedia masih terkonsentrasi pada sektor pertanian.

2.2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan atau dikenal juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dirancang untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu juga digunakan sebagai alat ukur untuk memastikan sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah memberikan hasil yang optimal serta berdampak atau tidaknya kepada masyarakat. Idealnya IKU disusun secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 76 indikator yang diampu oleh 28 SKPD. Berikut adalah data capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	URUSAN WAJIB						
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.1	Urusan Pendidikan						
1.1.1	Persentase Siswa dengan nilai kompetensi Literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	58,88	82,67	100	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
1.1.2	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	33,12	77,90	100	Sangat Tinggi	Dinas pendidikan
1.1.3	Nilia Siswa dengan Tingkat karakter yang memenuhi kriteria minimal	Skor	2,16	59,29	100	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
1.2.	Urusan Kesehatan						
1.2.1	Ratio Kematian Ibu	Rasio	0,0009	143/100.000KH	62,93	Rendah	Dinas Kesehatan
1.1.2.2	Ratio Kematian Bayi	Rasio	0,014	12.7/1000 KH	85,71	Tinggi	Dinas Kesehatan
1.2.3	Akreditasi RS sesuai Standar Nasional	Persen	86	94.17	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.2.4	Prevalansi Stunting	Persen	8	8,5	94,17	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Persen	93	93	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.2.6	Angka Kematiaan Karena Penyakit DBD (CRF DBD)	Persen	<1	0,3	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.3.1	Persentase Luar Wilayah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	71,35	71,4	100	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Persen	82,10	82,34	100	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.3	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak	Persen	96,12	87,08	90,59	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.4	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	Persen	73,75	75	100	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/Kota	Persen	91,50	87,54	95,67	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.6	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan	Persen	33,34	33,33	100	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.7	Ketaatan terhadap RTR	Persen	72,25	75,46	100	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1	Rasio Rumah layak Huni	Rasio	80,32	80,28	100	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.5.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Perda / Perkada	Persen	92	100	100	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran	Persen	90	75,11	83,45	Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.3	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.5	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.6.	Urusan Sosial						
1.6.1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	80	75,53	94,41	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
2.1.	Urusan Tenaga Kerja						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	20	47,80	100	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.1.2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	21	21	100	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.1	Cakupan Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum	Persen	29,55	48,67	100	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3.	Urusan Pangan						
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	92,5	97,88	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4.	Urusan Pertanahan						
2.4.1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	87	87	Tinggi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.5.	Urusan Lingkungan Hidup						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.5.1	Persentase pengawasan instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	70	92,31	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.2	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	130,35	126,41	96,97	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.3	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	61,15	56,69	92,70	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.4	Persentase Peningkatan Pengembangan Generasi Lingkungan	Persen	50	50,50	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	35	31,00	88,57	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.7.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.7.1	Cakupan Penertiban Dokumen Kependudukan	Persen	99	99,66	100	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7.2	Cakupan Penertiban Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	94	99,98	100	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	93	93,82	100	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Pencatatan Sipil
2.8.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.8.1	Persentase Status Desa Mandiri dengan Optimalisasi potensi desa	Persen	61,11	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.9.	Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana						
2.9.1	Total Fertility Rate (TFR)	Kelahiran	2,04	2,03	99,50	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.9.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	2,81	2,75	97,86	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.10.	Urusan Perhubungan						
2.10.1	Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	56,13	53,68	95,63	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
2.11.	Urusan Komunikasi dan Informatika						
2.11.1	Persentase masyarakat dalam memahami program prioritas pemerintah daerah	Persen	70	97,44	100	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11.2	Indeks Layanan SPBE	Poin	3,8	4,49	100	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
2.12.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2.12.1	Persentase Koperasi Modern	Persen	3,98	7,27	100	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.12.2	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang	Unit Usaha	15.188	17.145	100	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.13.	Urusan Penanaman Modal						
2.13.1	Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang	Juta Rupiah	3.000.000	3.796.009	100	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Poin	93	91,38	98,26	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.14.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.14.1	Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	58,76	59,00	100	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.14.2	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih dalam satu tahun	Orang	20	38	100	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.15.	Urusan Statistik						
2.15.1	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3	3,24	100	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.	Urusan Persandian						
2.16.1	Score Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	Poin	450	549	100	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
2.17.	Urusan Kebudayaan						
2.17.1	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	OPK	11	11	100	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.18.	Urusan Perpustakaan						
2.18.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	12,64	14,56	100	Sangat Tinggi	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19.	Urusan Kearsipan						
2.19.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	Persen	56	70,37	100	Sangat Tinggi	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
3.1.1	Produksi Perikanan	Ton	10.386,74	10.568,34	100	Sangat Tinggi	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.2.	Urusan Pariwisata						
3.2.1	Kunjungan Wisata	Orang	1.050.000	1.184.704	100	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.2.2	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	16	16	100	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.3.	Urusan Pertanian						
3.3.1	Persentase Peningkatan Produksi Komuditas Pertanian	Persen	1,49	1.86	100	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3.2	Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	5,67	11,84	100	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.3.3	Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80,77	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.4.	Urusan Kehutanan						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4.1	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	61,15	56,69	92,70	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.5.	Urusan Perdagangan						
3.5.1	Tingkat Stabilisasi Sektor Perdagangan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.6.	Urusan Perindustrian						
3.6.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	Persen	8,57	32,63	100	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.7.	Urusan Transmigrasi						
3.7.1	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	Orang	81	78	96,29	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN						
4.1.	Urusan Inspektorat						
4.1.1	Kapabilitas APIP	Level	4	3 (3,070)	76,75	Delivered	Inspektorat
4.1.2	Maturotas SPIP	Level	4	3 (3,395)	84,87	Terdefinisi	Inspektorat
5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1.	Urusan Perencanaan						
5.1.1.	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	92,66	97,46	100	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.2.	Urusan Keuangan						
5.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	22,67	18.52	81,69	Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
5.3.	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
5.3.1.	Indeks Sistem Merit	Poin	350	348	99,42	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.4.	Urusan Penelitian dan Pengembangan						
5.4.1.	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	92,66	97,46	100	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN						

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahn)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			Tahun 2024	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1.	Urusan Sekretariat Daerah						
6.1.1.	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6.1.2.	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6.2.	Urusan Sekretariat DPRD						
6.2.1	Tingkat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	33,23	33,17	99,81	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
7	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
7.1.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik						
7.1.1.	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7.1.2.	Tingkat Demokratisasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	URUSAN KEWILAYAHAN						
8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	90	90,10	100	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang, 2025 (Diolah)

Evaluasi kinerja memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu dalam mendeteksi hambatan serta faktor penyebab ketidakefisienan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Berdasarkan diatas, dari hasil pelaksanaan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat masih terdapat beberapa urusan yang belum mencapai capaian maksimal (Sangat Tinggi), namun masih dalam batas capaian yang “tinggi”. Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan pada evaluasi penyelenggaraan urusan.

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya minat dan motivasi siswa dalam budaya literasi dan keterampilan matematika dasar; - Belum optimalnya pendekatan pendidikan karakter terhadap siswa; - Belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan jumlah sekolah sehingga terfokus di suatu wilayah saja; - Belum optimalnya infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan; dan - Belum optimalnya peran PKBM.
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil mengenai pemeriksaan kehamilan rutin dan tanda-tanda persalinan; - Masih terdapat ibu hamil yang melahirkan di non faskes; - Masih adanya kematian neonatal (0-28 hari) dan bayi lahir dengan BBLR; - Adanya keterbatasan akses terhadap pelayanan Kesehatan di beberapa wilayah; - Masih adanya keterlambatan akan deteksi dan penanganan DBD di Masyarakat maupun di unit pelayanan Kesehatan; dan - Sosialisasi akan PHBS terhadap masyarakat belum optimal.
3	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Lebar jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten; - Kualitas dan ketahanan umur jalan masih rendah; - Kualitas dan ketahanan umur bangunan pelengkap jalan masih rendah; - Jaringan irigasi belum menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/sawah; - Kondisi jaringan irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi optimal; - Belum adanya peta irigasi baik primer, sekunder maupun tersier; - Belum optimalnya konservasi sumber daya air; - Masih terdapat konflik pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi; - Sistem distribusi air belum efisien yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi air; - Belum meratanya penggunaan SPAM jaringan perpipaan; - Masih banyaknya masyarakat yang mengandalkan air dari sumber non perpipaan yang kualitas dan keamanannya tidak terjamin - Belum optimalnya cakupan layanan SPAM jaringan perpipaan; - Masih terbatasnya sarana dan infrastruktur sanitasi; - Belum tersedianya infrastruktur IPAL; - Masih terbatasnya layanan pengelolaan limbah domestik; - Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai; - Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah; - Belum optimalnya tata ruang kawasan; - Belum optimalnya infrastruktur pendukung ketertataan bangunan; - Terjadinya alih fungsi lahan; - Masih banyak bangunan yang didirikan di bantaran sungai atau di daerah aliran Sungai (DAS); - Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan; - Banyak penyedia jasa konstruksi belum memiliki sertifikasi sesuai standar;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya fungsi penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan bidang ke-PU-an; - Terbatasnya jumlah tenaga pengawas regulasi tata ruang; - Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang ke-PU-an; - Inkonsistensi antara kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan; - Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang; - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ijin pemanfaatan ruang.
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Keberatan nilai ganti kerugian hasil KJPP; - <i>Spiltzing</i> tanah sisa yang dibebaskan - Persetujuan KKPR yang lama di DPMPTSP; - Masih banyak rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP, Linmas dan Damkar - Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan trantibumlimas serta kebencanaan; - Belum optimalnya sosialisasi terkait Perda dan Perkada sehingga pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih rendah; - Sedikitnya pegawai yang memiliki kualifikasi Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); - Luasnya wilayah manajemen kebakaran tidak sebanding dengan Sarana dan Prasarana yang ada - Masih tingginya kejadian bencana dan kebakaran; - Belum diperbaharuinya peta kebencanaan; - Belum tersedianya lokasi khusus untuk kantor BPBD.
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persediaan Natura permakanan untuk korban bencana yang sedikit hanya cukup untuk bencana-bencana skala kecil;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Bantuan dari Desa atau Kelurahan Data Calon Penerimaanya identitasnya kurang lengkap dan Kebutuhannya tidak disampaikan atau tidak diberitahukan; - Belum layaknnya rumah singgah; - Belum tersedianya alat transportasi untuk ODGJ.
7	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, seperti digital marketing, menjahit, dan budidaya ternak sehingga belum semua bidang mendapatkan penyerapan kerja yang optimal; - Hubungan antara LPKS dan sektor industri di Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Minimnya kerjasama ini mengakibatkan materi pelatihan yang disampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, Beberapa LPKS di Sumedang mungkin belum memiliki akreditasi atau sertifikasi resmi dari badan pengawas atau asosiasi yang berwenang, sehingga kualitas pelatihan yang diberikan tidak terstandarisasi dan LPKS swasta sering kali menghadapi kendala dalam hal pendanaan. Keterbatasan anggaran menyebabkan lembaga-lembaga ini tidak bisa meningkatkan fasilitas, memperbaiki teknologi, atau merekrut instruktur yang kompeten; - Jumlah pencari kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja; - SDM tenaga kerja yang relatif rendah baik tingkat pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian dengan kualifikasi pekerjaan; - Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat; - Besarnya angka pengangguran dan adanya karyawan yang di PHK; - Penyebaran tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak merata; - Keterbatasan aksesibilitas dan diskriminasi terhadap tenaga kerja disabilitas;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya PMI berangkat secara <i>unprosedural</i> atau ilegal serta kurangnya Fasilitas perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama dan sesudah bekerja; - Banyak perusahaan yang beroperasi di daerah, terutama yang berskala kecil hingga menengah, mengalami kesulitan dalam memahami seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan pengesahan PP dan pendaftaran PKB. Peraturan terkait ketenagakerjaan sering kali berubah, dan pemilik usaha tidak selalu mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan PP dan pendaftaran PKB karena dokumen yang diajukan tidak memenuhi standar hukum yang berlaku; - Baik pengusaha maupun pekerja sering kali kurang memahami peraturan yang mengatur hubungan industrial, yang dapat memicu perselisihan. Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan tentang perselisihan hubungan industrial, dan ketentuan mengenai hak pekerja untuk mogok sering kali tidak diterapkan atau dipahami dengan baik oleh kedua pihak. Mogok kerja seringkali dipicu oleh tuntutan pekerja yang merasa hak-hak mereka tidak dipenuhi, seperti upah yang tidak sesuai dengan ketentuan minimum, kondisi kerja yang tidak memadai, atau tidak adanya jaminan sosial. Di daerah seperti Kabupaten Sumedang, perusahaan kecil dan menengah mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi seluruh peraturan karena keterbatasan finansial, yang berujung pada perselisihan dengan karyawan; - Jumlah mediator yang kurang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum berdaya; - Masih banyaknya perempuan menggugat perceraian karena masalah ekonomi dan kekerasan;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan hak anak dalam menempuh pendidikan yang belum tercapai khususnya anak perempuan banyak yang putus sekolah dan menikah usia dini; - Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan maupun anak berhadapan dengan hukum; - Belum optimalnya rumah aman bagi korban kekerasan.
9	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya diversifikasi pangan; - Masyarakat Sumedang masih tergantung pada satu jenis sumber karbohidrat; - Belum optimalnya program ketahanan pangan; - Masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap makanan sehat yang beragam.
10	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimanya GTRA dalam penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten Sumedang; - Belum tersedianya pengadaan sengketa Tanah; - Masih banyak lahan dengan ketidakjelasan status kepemilikan lahan
11	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya lahan untuk penambahan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di perkotaan sedangkan timbulan sampah semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga daya tampung TPS melebihi kapasitas; - Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah, kondisi ini dicirikan dengan masih banyaknya titik lokasi pembuangan sampah liar; - Perkembangan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk belum sebanding dengan peningkatan kapasitas sarana prasarana persampahan; - Sarana dan prasarana sampah masih terbatas; - Keterbatasan interaktif langsung dengan para pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran Lingkungan; - Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki izin -

No	Urusan	Permasalahan
		<p>lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan, termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana prasarana pengujian dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan seperti alat pengukur getar, pengukur bau dan lain-lain; - Belum tersedianya tenaga pengawas lingkungan di Kabupaten Sumedang; - Belum tersedianya data tentang pencemaran dan pelanggaran lingkungan untuk publik; - Kurangnya infrastruktur pengelolaan air limbah (IPAL) yang memadai; - Belum terpenuhinya permintaan bibit tanaman dari masyarakat baik individu maupun komunitas, serta Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah perkotaan, padahal penghijauan merupakan salah satu alternative untuk mengurangi polusi udara perkotaan; - Banyaknya alih fungsi lahan di beberapa wilayah; - Rendahnya sosialisasi pengelolaan limbah industri dan rumah tangga kepada masyarakat; - Belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan generasi lingkungan seperti bank sampah dan taman kota; - Masih tingginya penggunaan plastic sekali pakai di Masyarakat sehingga meningkatkan timbulan sampah.
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan; - Blangko KTP El masih dikelola oleh Ditjen Dukcapil; - Tingkat Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan masih rendah; - Terbatasnya jumlah pegawai dalam menangani pelayanan pendaftaran penduduk; - Masih terpusatnya loket pelayanan sehingga menimbulkan antrian;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan karena terbagi dengan pelayanan MPP, MPP Mini, Online dan lapangan.
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya Kepala Desa yang belum faham arti Desa Mandiri, padahal bila diisi data IDM secara akurat sudah masuk ke Strata Desa mandiri; - Potensi sumber daya alam dan manusia belum dimanfaatkan dengan baik; - Akses fasilitas pendidikan, kesehatan, keuangan, logistik kurang terjangkau, belum tersedia atau berada di desa lain - Penginputan IDM belum optimal sehingga nilai IDM belum berstatus mandiri; - Pengembangan BUMdes sebagai motor ekonomi desa belum optimal; - Belum optimalnya pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa serta pengembangan desa.
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya PUS ber KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); - Masih rendahnya kesertaan pria dalam kegiatan ber KB; - Masih adanya keluarga yang berada pada kategori KS Prasejahtera dan KS I
15	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Makin maraknya parkir liar di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang; - Masih adanya beberapa ruas jalan yang masih minim fasilitas PJU dan rambu lalu lintas; - Tidak berfungsinya beberapa terminal sehingga angkutan umum ngetem Dimana saja yang mengakibatkan kemacetan; - Perlengkapan keselamatan, fasilitas jalan dan jaringan jalan Kabupaten masih belum optimal; - Masih terbatasnya fasilitas ATCS yang hanya dibeberapa titik saja; - Masih rendahnya pemilik kendaraan umum untuk melakukan uji KIR.
16	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait dengan program-program pemerintahan daerah belum sepenuhnya tersampaikan pada masyarakat;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya literasi masyarakat sehingga sulit untuk memahami informasi program pemerintah daerah yang bersifat teknis; - Belum seluruhnya pelayanan kepada Masyarakat optimal sehingga pelayanan yang bersifat konvensional masih lebih banyak digunakan.
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten mengakibatkan proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi menjadi kurang optimal, sehingga masalah dalam koperasi tidak terdeteksi atau diselesaikan dengan baik; - Tidak semua koperasi memiliki standar penilaian kesehatan keuangan dan operasional yang seragam, sehingga hasil penilaian dapat bervariasi; - Masih banyaknya koperasi yang menggunakan sistem penilaian manual, yang rentan terhadap kesalahan manusia dan kurang efisien; - Belum optimalnya sistem digitalisasi koperasi sehingga koperasi belum terhubung dengan pasar yang lebih luas; - Minimnya edukasi dan pelatihan sehingga banyak anggota koperasi, termasuk pengurus, yang tidak mendapatkan pelatihan memadai terkait manajemen, keuangan, dan kewirausahaan; - Keterbatasan Kapasitas SDM seperti kurangnya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan, terutama di bidang teknologi, pemasaran, dan inovasi produk; - Rendahnya Tingkat Literasi Digital seperti Pelaku UMKM kurang memahami penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, penjualan, pengelolaan usaha dan kurangnya pelatihan tentang <i>e-commerce</i> dan penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran; - Masih sulitnya pemasaran produk UMKM di Kabupaten Sumedang.
18	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sumedang masih tergantung pada proyek strategis nasional sehingga

No	Urusan	Permasalahan
		<p>pada saat proyek tersebut rampung maka nilai investasi mengalami penurunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya diversifikasi sumber investasi dari sektor lain selain konstruksi; - Belum optimalnya promosi potensi investasi; - Belum adanya peta potensi di Kabupaten Sumedang.
19	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya peran serta kepemudaan dalam prestasi olahraga yang di raih; - Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Sumedang; - Adanya perubahan pola pikir generasi muda yang lebih tertarik pada kegiatan digital dibandingkan dengan minat untuk berorganisasi; - Fasilitas olahraga belum memadai atau belum sesuai dengan standarisasi; - Pembinaan atlet masih terbatas, belum berkelanjutan dari pemula sampai profesional; - Kurang optimalnya pembinaan dan pendanaan terhadap atlet.
20	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua urusan mempunyai data yang lengkap dan terstandarisasi; - Kurangnya kesadaran para pemangku kebijakan terhadap pentingnya data; - Minimnya tenaga statistisi di kabupaten Sumedang; - Belum optimalnya pemanfaatan data Pembangunan bagi penentuan kebijakan.
21	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sistem persandian di semua Perangkat Daerah; - Belum adanya tenaga ahli persandian yang tersertifikasi; - Belum adanya pembinaan terkait dengan sistem persandian.
22	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; - Tidak semua objek dan cagar budaya yang teridentifikasi dilegalkan sehingga belum masuk ke dalam daftar objek yang dilindungi;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya alokasi anggaran untuk pelestarian dan pemanfaatan objek dan cagar budaya; - Belum tersedianya tenaga ahli di bidang konservasi dan pengelolaan budaya; - Belum optimalnya objek budaya yang dijadikan destinasi wisata.
23	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga pustakawan yang mengelola perpustakaan di semua jenjang; - Kurangnya sosialisasi pada perpustakaan desa serta minimnya perpustakaan desa yang bisa menjadi role model pada pengembangan TPBIS; - Rendahnya literasi dan minat baca Masyarakat sehingga kunjungan perpustakaan semakin menurun; - Belum memadainya fasilitas perpustakaan yang menyebabkan perpustakaan menjadi tempat yang dianggap membosankan; - Koleksi buku dan bahan bacaan masih terbatas; - Keterbatasan koleksi buku elektronik (e-book).
24	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan arsiparis belum optimal; - Masih rendahnya pemahaman pengelolaan arsip dinamis di seluruh Perangkat Daerah; - Masih minimnya perhatian pimpinan Perangkat Daerah terhadap kearsipan; - Tidak teranggarkannya sarana prasarana kearsipan; - Belum tersedianya depo arsip yang memadai; - Belum optimalnya tata Kelola arsip; - Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memenuhi standar di hampie seluruh Perangkat Daerah; - Belum adanya sistem pengelolaan arsip elektronik.
25	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan terutama penangkapan ikan di Bendungan Jatigede; - Belum optimalnya Gerakan Gemar Makan Ikan sehingga konsumsi ikan

No	Urusan	Permasalahan
		<p>masih agak rendah di Kabupaten Sumedang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya inovasi dalam pengolahan ikan sehingga harga jual ikan rendah.
26	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastuktur yang memadai untuk menunjang peningkatan pariwisata; - Masih terbatasnya aksesibilitas ke daerah destinasi wisata; - Belum optimalnya promosi destinasi pariwisata dalam mendongkrak jumlah kunjungan wisata; - Minimnya <i>event</i> budaya untuk menarik wisatawan; - Belum tersedianya SDM pelaku pariwisata; - Belum optimalnya pemanfaatan media social serta teknologi informasi untuk promosi wisata; - Belum optimalnya pengelolaan Lokasi-lokasi wisata; - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk produk hasil ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif; - Masih terbatasnya fasilitas pendukung industri kreatif; - Masih kurangnya program pelatihan terutama dalam desain dan pemasaran digital; - Masih minimnya pelaksanaan event dan pameran ekonomi kreatif sebagai ajang pemasaran produk dan membangun <i>networking</i>; - Masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk membeli produk lokal.
27	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim, bencana alam dan serangan hama menjadi faktor kegagalan panen; - Tingginya harga pupuk dan pestisida; - Distribusi pupuk tidak merata sehingga terkadang terjadi kelangkaan pupuk; - Infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan yang belum memadai; - Masih rendahnya diversifikasi komoditas yang ditanam; - Lahan pertanian semakin berkurang;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya alih fungsi lahan; - Masih minimnya akses terhadap alsintan; - Aksesibilitas pemasaran hasil pertanian terbatas - Tingginya harga pakan ternak; - Belum adanya inovasi dalam pakan alternatif; - Masih sering terjadinya penyakit menular pada hewan ternak; - Masih rendahnya kesadaran peternak akan pentingnya vaksinasi; - Jumlah layanan Kesehatan hewan masih terbatas; - Aksesibilitas permodalan masih terbatas; - Belum adanya rumah potong hewan; - Akses distribusi hasil produksi ternak masih terbatas; - Semakin rendahnya regenerasi peternak dan petani - Penerapan teknologi dalam bidang peternakan belum optimal.
28	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya bangunan masyarakat yang berdempetan dengan patok batas kawasan sehingga menimbulkan kerawanan; - Banyaknya alih fungsi dan degradasi lahan; - Terbatasnya penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan kualitas lahan; - Program penghijauan dan konservasi belum berjalan optimal.
29	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan jumlah Masyarakat yang datang ke pasar tradisional sebagai bagian dari bergesernya dari pola transaksi yang konvensional/cash menjadi transaksi digital/ <i>cashless</i> sehingga mengakibatkan menurunnya omzet para pedagang; - Perkembangan perdagangan digital belum optimal - Fluktuasi harga yang tinggi beberapa komoditas bapokting; - Masih adanya gangguan rantai distribusi yang mengakibatkan kelangkaan atau keterlambatan pasokan barang/komoditas;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha sering kesulitan mendapatkan modal untuk mendukung ekspansi ke pasar internasional sehingga menjadi dampak kepada pelaku usaha karna terbatasnya skala produksi, inovasi, dan promosi produk di pasar global; - Sarana dan prasarana pasar rakyat tidak layak; - Sistem distribusi yang belum tertata dengan baik
30	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya kompetensi SDM seperti kurangnya tenaga kerja terampil; - Minimnya pelatihan dan pendidikan vokasi; - Kesenjangan pengetahuan dan teknologi; - Kurangnya integrasi data dari berbagai sektor industri yang sering kali tersebar di berbagai <i>platform</i> dan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga sulit mendapatkan gambaran yang menyeluruh; - Keterbatasan akses pasar dan belum optimalnya pemanfaatan pemasaran digital atau <i>e-commerce</i>; - Semakin banyaknya produk impor dengan harga yang lebih rendah menghambat daya saing industri lokal.
31	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan alokasi penempatan transmigrasi yang ditentukan secara mendadak oleh Pusat yang mungkin dalam hal penanggaran di tingkat Kabupaten/Kota terhambat atau belum dapat dianggarkan; - Kurangnya pengembangan SDM yang baik untuk mengelola urusan transmigrasi
32	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan sering kali bersifat rektif bukan pro aktif dalam mendeteksi risiko lebih awal; - Masih banyak proses audit yang dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan dan potensi kesalahan - Belum optimalnya strategi pengawasan berbasis risiko untuk memprioritaskan pengawasan pada sektor-sektor rawan penyimpangan; - Belum ada pemetaan risiko yang komprehensif, sehingga pengawasan

No	Urusan	Permasalahan
		<p>tidak terfokus pada area yang memiliki dampak terbesar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya penggunaan data analitik dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini; - Minimnya koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang berindikasi tindak korupsi; - Belum adanya mekanisme berbagi data antar Lembaga pengawas sehingga seringkali terjadi tumpang tindih pemeriksaan; - Masih banyaknya kepala Perangkat Daerah yang belum memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga implementasinya hanya bersifat administratif; - Banyak instansi belum memiliki peta risiko organisasi sebagai dasar penerapan SPIP.
33	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak perencanaan yang dibuat tanpa menggunakan data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi; - Belum optimalnya pengintegrasian data dari berbagai sektor melalui Satu Data Indonesia; - Belum adanya pengintegrasian antara perencanaan dengan GIS (<i>Geographic Information System</i>) untuk pemetaan wilayah prioritas Pembangunan; - Masih lemahnya sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah sehingga sering terjadi duplikasi aktivitas dan sasaran kegiatan; - Adanya perubahan kebijakan anggaran dapat menghambat pencapaian target kinerja; - Terlalu banyak program dengan anggaran kecil, sehingga kurang berdampak signifikan terhadap pembangunan - Masih jarang nya pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi ASN terkait perencanaan dan evaluasi program; - Belum tersedianya sistem untuk mempercepat proses pelaporan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

No	Urusan	Permasalahan
		sehingga pengevaluasian masih dilakukan secara manual.
34	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran, pengajuan pembayaran dan kualitas pelaporan keuangan OPD; - Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah; - Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif untuk menambah PAD; - Belum tercapainya target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); - PAD masih rendah karena belum ada diversifikasi sumber penerimaan yang optimal; - Minimnya inovasi dalam meningkatkan PAD; - Belum tercapainya target penerimaan pajak daerah; - Terdapat regulasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat dinamis sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan; - Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah; - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pembayaran pajak daerah; - Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah sehingga keakuratan penetapan pajak daerah belum bisa optimal - Belum optimalnya pemutakhiran database pajak daerah; - Belum optimalnya pembayaran pajak melalui transaksi digital; - Kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan PAD, sehingga strategi peningkatan pendapatan tidak berjalan optimal.
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil; - Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi

No	Urusan	Permasalahan
		<p>informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sistem <i>talent pool</i> atau <i>assessment center</i>; - Masih terbatasnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi ASN untuk meningkatkan kapasitas; - Tidak adanya mekanisme evaluasi pasca-pelatihan, sehingga sulit mengukur efektivitas pengembangan kompetensi.
36	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan anggaran yang bersumber dari DAU <i>Specific Grant</i> tidak dapat dialihkan lintas kegiatan karena sudah dilaporkan ke kementerian keuangan; - Keterbatasan sumber daya manusia - Kurangnya peneliti dengan kualifikasi dan latar belakang riset; - Belum ada skema yang sistematis untuk pengembangan riset terapan berbasis potensi dan permasalahan daerah; - Belum optimalnya hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, program, maupun perencanaan pembangunan
37	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan daerah; - Rendahnya kajian berbasis data dalam penyusunan kebijakan, menyebabkan kebijakan kurang tepat sasaran; - Belum optimalnya koordinasi antar Bagian; - Belum optimalnya koordinasi antara SKPD dan lembaga mitra tiap Bagian sehingga terdapat kebijakan daerah yang tidak selaras antara perencanaan dengan implementasinya; - Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia terutama yang memiliki kompetensi khusus dalam manajemen pemerintahan; - Belum optimalnya peran Sekretariat Daerah sebagai pengendali koordinasi kebijakan daerah.
37	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya SDM ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang

No	Urusan	Permasalahan
		<p>memiliki kompetensi teknis di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia sistem informasi digital yang mendukung pelaksanaan tugas kedewan; - Forum formal seperti Banggar dan Bamus belum selalu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun sinergi; - Belum adanya tim teknis gabungan untuk percepatan pembahasan anggaran dan regulasi; - Koordinasi internal lemah, sehingga menghambat efektivitas layanan kepada anggota dewan.
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM; - Penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial sangat cepat, berpotensi memicu keresahan dan disinformasi publik; - Penanganan berita hoaks masih lemah karena keterbatasan pengawasan dan literasi digital Masyarakat; - Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing (TPOA); - Belum optimalnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; - Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan konflik sosial; - Literasi politik masyarakat masih terbatas; - Pendidikan demokrasi belum menjadi bagian dari pendekatan sistematis di sekolah, forum pemuda, atau kegiatan warga; - Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Sumedang; - Adanya kesulitan dalam pengecekan keabsahan badan hukum ormas; - Belum optimal peran ormas di masyarakat; - Belum terbentuknya sistem informasi ormas; - Masih adanya potensi radikalisme dan terorisme di Kabupaten Sumedang;

No	Urusan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dan Koordinasi antar unsur Forkopimda belum berjalan optimal; - Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.); - Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah); - Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan 4 (empat) pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI).
39	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak layanan yang berbasis digital, masih belum terintegrasi dan <i>user-friendly</i>; - Masih adanya pegawai yang belum memiliki pelatihan pelayanan prima (<i>service excellence</i>), sehingga terjadi komunikasi buruk, kurangnya rasa empati serta kadang perilaku tidak sopan; - Kelompok disabilitas dan lansia terkadang masih kesulitan mengakses layanan publik karena keterbatasan fasilitas, jarak, dan informasi; - Informasi layanan belum disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan inklusif, sehingga masih sulit difahami oleh masyarakat.

Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang, 2025 (diolah)

2.2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berkenaan hal tersebut, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis SPM urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang

Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas : 1) Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Pendidikan Dasar; dan 3) Pendidikan kesetaraan. Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang untuk urusan Pendidikan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.4 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	37.200	34.366	2.834	92,38
2	Pendidikan Dasar - Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	172.757	164.772	7.985	95,38
3	Pendidikan Kesetaraan - Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	7.233	6.001	1.232	82,97

Sumber : Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang pendidikan belum mencapai 100 persen bahkan untuk layanan Pendidikan kesetaraan masih berada dibawah 90 persen. Beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pendidikan tersebut diatas antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD;
- b. Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi;

- c. Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih bersekolah di tingkat SD;
- d. Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih bersekolah di Tingkat SMP;
- e. Peserta didik yang berada di wilayah perbatasan bersekolah di luar Kabupaten atau dari luar Kabupaten bersekolah ke Kabupaten Sumedang, sehingga angka partisipasi tidak akurat;
- f. Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu;
- g. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil;
- h. Kualitas layanan pendidikan belum merata, baik dari segi tenaga pendidik, sarana-prasarana, maupun kurikulum;
- i. Rendahnya minat masyarakat terhadap program kesetaraan karena stigma negatif atau kurangnya informasi; dan
- j. Belum optimalnya pendataan warga yang butuh layanan pendidikan kesetaraan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar;
- b. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah sesuai analisis kebutuhan; dan
- c. Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satu manfaatnya adalah untuk operasional sekolah, terutama Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin.

2.2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 terdiri dari 12 indikator, yaitu 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; 11) Pelayanan Kesehatan Orang

Terduga Tuberkulosis; 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* (HIV)). Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang dari ke-12 indikator untuk Bidang Kesehatan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.5 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	14.673	13.770	903	93,85
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	14.673	14.668	5	99,97
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	14.680	14.334	346	97,64
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	65.543	62.735	2.808	95,72
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	153.920	153.920	0	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	522.186	413.929	108.257	79,27
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	181.122	181.122	0	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Orang	143.937	121.808	22.129	84,63
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Orang	21.763	21763	0	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Orang	1.757	1.757	0	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	25.486	25.486	0	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Orang	22.937	22.937	0	100

Sumber : Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Kesehatan belum seluruhnya mencapai 100 persen meskipun sudah terdapat beberapa indikator yang 100 persen. Beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Kesehatan tersebut diatas terutama untuk indikator dengan capaian yang masih dibawah 90 persen, antara lain:

- a. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skrining Kesehatan masih rendah;
- b. Belum semua Perempuan usia produktif (usia 30-50 tahun) terakses pemeriksaan IVA atau papsmear untuk mendeteksi dini kanker leher rahim;
- c. Masih rendahnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan (*Antenatal care*);
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek tekanan darah;
- e. Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang Kesehatan; dan
- f. Belum adanya poli khusus geriatric di Kabupaten Sumedang.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan dilakukan beberapa pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus (PPGDON) serta sosialisasi, seminar dan transfer pengetahuan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas;
- b. Optimalisasi peran bidan desa dan Puskesmas;
- c. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sekolah (UKS/Trias UKS).

2.2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah yang, meliputi 1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air

Minum Sehari-hari; dan 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Adapun hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.6 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	Orang	4.952	5.584	0	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	4.040	4.040	0	100

Sumber : Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumah tangga masih bergantung pada sumber air tidak aman seperti sumur dangkal dan sungai;
- b. Masih terbatasnya kapasitas PDAM;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman;
- d. Minimnya anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan air limbah; dan
- e. Keahlian atau kemampuan sumber daya manusia terbatas.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan PDAM, Dinas PUPR, dan pihak swasta untuk pengembangan infrastruktur.

2.2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin pelayanan kepada penduduk miskin dan kelompok rentan berupa pemenuhan hunian layak huni dan permukiman yang sehat, meliputi : 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak

Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun hasil capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.7 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Orang	81	81	0	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	100

Sumber : Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai 100 persen. Adapun untuk SPM terkait dengan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Namun meskipun capaian telah 100 perman, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Lahan yang akan dijadikan tempat relokasi terkadang tidak sesuai;
- b. Sering adanya penolakan dari warga terkait dengan lokasi relokasi dikarenakan tidak strategis atau jauh dari sumber perekonomian;
- c. Belum optimalnya data dan pemetaan korban pasca bencana.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas terkait, dan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan relokasi ataupun pembangunan rumah, serta dengan mengajukan bantuan stimulan atau Pembangunan rumah ke Provinsi atau Pemerintah Pusat.

2.2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan dari pelayanan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah untuk menjamin masyarakat hidup dengan rasa aman dan tenteram, meningkatkan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan dan menyediakan dukungan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat atau bencana. Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; 2) Pelayanan informasi rawan bencana; 3) Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana; 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun hasil capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.8 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	16	16	0	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	802.350	802.350	0	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	856	856	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2.483	2.483	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	116.703	116.703	0	100

Sumber : Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perda/perkada;
- b. Terbatasnya ketersediaan SDM terutama PPNS di Satpol PP;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian SPM seperti mobil dan peralatan pemadam kebakaran, perahu dan logistik penunjang kebencanaan;
- d. Masih banyak daerah belum memiliki rencana kontinjensi atau sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS);
- e. Belum tersedianya data dan peta rawan bencana yang telah dimutakhirkan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- a. Penguatan koordinasi dengan Babinsa dan Linmas;
- b. Kolaborasi aktif dengan BMKG, BNPB, TNI/POLRI dan Pemerintah daerah;
- c. Pengembangan desa tangguh bencana; dan
- d. Simulasi evakuasi rutin bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan Masyarakat.

2.2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar di bidang kesejahteraan social. Beberapa komponen utama SPM bidang sosial, diantaranya: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti; 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban bencana. Adapun hasil capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.9 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	206	206	0	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	62	62	0	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	212	212	0	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	42	42	0	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana	Orang	2.638	2.638	0	100

Sumber : Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Sosial telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya verifikasi data PPKS di Basis Data Terpadu (BDT) sehingga belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
- b. Tingginya mobilitas dan keberulangan gelandangan/pengemis terutama di wilayah perkotaan;
- c. Belum adanya keterbatasan jumlah rumah singgah;
- d. Masih tingginya angka eksploitasi anak di jalanan; dan
- e. Pada saat terjadi bencana terkadang data korban bencana tidak segera tersedia dan terverifikasi

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Sosial, antara lain dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor, penyediaan rumah singgah meskipun belum optimal, pelatihan TAGANA dan pekerja sosial untuk respon darurat dan peningkatan integrasi layanan sosial dengan BPBD, PMI, dan LSM.

2.2.4. Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau *outcome* dari masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan pada tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja/Tingkat Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja/Predikat Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 dapat diketahui bahwa 1) rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Triwulan II sebesar 50,42 persen dengan kriteria rendah; 2) rata-rata realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 45,24 persen dan masih termasuk kedalam kriteria sangat rendah. Adapun tingkat capaian kinerja dan anggaran kegiatan perangkat daerah hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 pada Triwulan II disajikan secara rinci pada Tabel 2.11 di bawah.

Tabel 2.11 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025		Status
						K	Rp (%)	
1	Dinas Pendidikan	967.540.383.997,00	175.042.220.272,00	4	15	65,00	56,72	
2	Dinas Kesehatan	626.658.854.416,00	50.306.723.686,00	7	18	50,00	40,10	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	92.589.615.124,00	5.881.026.690,00	9	20	45,00	23,05	
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25.303.943.841,00	1.646.068.737,00	6	15	46,90	22,05	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	19.943.209.629,00	4.410.253.348,00	3	11	50,00	55,39	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.098.290.636,00	826.784.080,00	2	12	50,00	28,06	
7	Dinas Sosial	14.396.965.220,00	1.712.142.375,00	6	15	50,00	38,21	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.107.032.290,00	1.762.533.644,00	6	16	50,00	46,19	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32.299.573.406,00	6.527.118.438,00	12	21	50,00	45,60	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.827.868.224,00	1.953.446.329,00	4	14	50,00	50,27	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.659.830.334,00	2.619.190.704,00	4	11	50,00	51,31	
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	27.954.883.711,00	2.959.458.349,00	10	26	48,00	34,20	
13	Dinas Perhubungan	30.809.362.148,00	3.772.909.758,00	2	17	45,00	38,28	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian Dan Statistik	17.533.878.046,00	1.754.789.832,00	5	14	50,00	45,71	

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025		Status
						K	Rp (%)	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	13.731.742.370,00	2.709.322.514,00	12	20	47,00	40,00	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.793.125.217,00	2.709.322.514,00	6	13	50,00	48,45	
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.120.069.643,00	1.410.161.385,00	5	14	48,00	39,16	
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	21.494.124.197,00	3.743.589.566,00	10	25	45,00	38,98	
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	16.544.334.090,00	1.784.635.425,00	10	24	46,00	32,95	
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	51.899.345.078,00	8.851.707.670,00	9	20	44,00	39,09	
21	Inspektorat Daerah	27.084.191.364,00	3.720.543.873,00	3	12	50,00	42,57	
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.650.027.717,00	3.180.388.294,00	4	18	50,00	46,03	
23	Badan Pendapatan Daerah	23.482.715.166,00	3.200.930.981,00	2	9	44,00	36,45	
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	561.067.605.851,00	42.960.375.185,00	3	13	47,00	40,11	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.406.098.566,00	2.328.793.009,00	2	12	50,00	45,26	
26	Sekretariat Daerah	72.014.231.334,00	10.096.690.079,00	3	19	55,00	51,90	
27	Sekretariat DPRD	80.749.480.929,00	17.312.458.262,00	2	17	56,00	52,06	
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.961.976.416,00	1.984.199.877,00	6	13	53,00	32,81	
29	Kecamatan Buahdua	3.399.134.173,00	698.434.703,00	6	15	55,00	51,26	
30	Kecamatan Cibugel	3.206.740.101,00	744.203.644,00	6	13	55,00	54,41	

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025		Status
						K	Rp (%)	
31	Kecamatan Cimalaka	3.854.015.959,00	637.494.882,00	6	15	50,00	44,38	
32	Kecamatan Cimanggung	3.709.634.605,00	808.065.640,00	5	13	51,00	50,71	
33	Kecamatan Cisarua	3.241.622.198,00	584.353.219,00	6	14	50,00	43,48	
34	Kecamatan Cisitu	3.138.046.802,00	636.117.495,00	6	15	51,00	50,41	
35	Kecamatan Conggeang	3.728.293.620,00	668.979.688,00	6	13	50,00	45,88	
36	Kecamatan Darmaraja	3.657.524.712,00	807.597.602,00	6	15	51,00	22,08	
37	Kecamatan Ganeas	3.671.161.589,00	799.289.323,00	6	15	50,00	49,12	
38	Kecamatan Jatigede	3.181.053.524,00	744.764.797,00	6	15	53,00	51,21	
39	Kecamatan Jatinangor	3.886.669.510,00	779.585.380,00	6	15	50,00	47,50	
40	Kecamatan Jatinunggal	3.567.872.800,00	721.542.954,00	6	14	53,00	51,58	
41	Kecamatan Pamulihan	3.664.392.126,00	657.953.461,00	6	16	53,00	51,75	
42	Kecamatan Paseh	3.460.120.453,00	631.377.056,00	6	12	50,00	47,21	
43	Kecamatan Rancakalong	3.301.833.452,00	648.781.973,00	6	15	50,00	47,41	
44	Kecamatan Situraja	3.845.841.587,00	853.490.169,00	6	13	51,00	50,94	
45	Kecamatan Sukasari	3.831.110.133,00	757.654.757,00	6	14	50,00	49,19	
46	Kecamatan Sumedang Selatan	10.976.845.606,00	45.480.649.362,00	6	15	50,00	44,44	
47	Kecamatan Sumedang Utara	9.132.871.951,00	1.828.881.218,00	6	15	50,00	48,62	
48	Kecamatan Surian	3.369.194.298,00	748.039.405,00	6	13	55,00	53,36	
49	Kecamatan Tanjungkerta	3.365.136.016,00	686.729.853,00	6	14	53,00	51,09	
50	Kecamatan Tanjungmedar	3.021.657.700,00	587.528.763,00	6	13	53,00	51,53	

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025		Status
						K	Rp (%)	
51	Kecamatan Tanjungsari	3.790.798.672,00	671.807.812,00	6	14	50,00	48,28	
52	Kecamatan Tomo	3.079.921.756,00	617.589.828,00	6	13	55,00	52,64	
53	Kecamatan Ujungjaya	4.176.727.098,00	914.184.043,00	5	13	51,00	50,67	
54	Kecamatan Wado	3.230.235.061,00	579.657.290,00	6	14	50,00	44,05	
Jumlah		2.934.191.214.462,00	430.321.566.800,00	311	820	50,42	45,24	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

Adapun realisasi anggaran dan capaian kinerja per urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.12 dibawah ini.

Tabel 2.12 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Urusan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	1.750.540.072.372,00	464.123.648.850,00	31,98	Sangat Rendah	26,51	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1.747.660.072.372,00	463.240.257.050,00	32,77	Sangat Rendah	26,51	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	212.737.361.580,00	73.285.688.278,00	65,00	Rendah	34,45	Sangat Rendah
	1.01.1.01.0.002. Program Pengelolaan Pendidikan	212.387.361.580,00	73.239.388.278,00	33,90		17,19	
	1.01.1.01.0.002.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	107.427.653.000,00	46.222.047.644,00	25,13		10,64	
	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	610.436.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	5.000.000.000,00	4.998.872.500,00	100,00		99,98	
	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00	8.673.000,00	22,22		4,34	
	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75.000.000,00	8.850.000,00	100,00		11,80	
	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	3.600.000,00	50,00		7,20	
	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.382.230.000,00	41.193.155.244,00	50,00		44,11	
	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.025.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	6.670.000,00	100,00		13,34	
	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	352.609.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.725.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.336.955.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.670.000.000,00	2.226.900,00	5,00		0,05	
	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	321.673.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.002.2.02.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	59.797.693.580,00	17.860.577.134,00	40,77		18,30	
	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	946.489.580,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	5.000.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00	15.147.200,00	100,00		7,57	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	31.425.000,00	100,00		62,85	
	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	35.000.000,00	100,00		70,00	
	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52.139.980.000,00	17.700.975.134,00	50,00		33,95	
	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	5.729.800,00	100,00		5,73	
	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000,00	72.300.000,00	80,00		57,84	
	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	236.224.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.002.2.03.Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24.257.835.000,00	135.813.500,00	19,70		4,35	
	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	200.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	300.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	480.000.000,00	120.000.000,00	50,00		25,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.010.860.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	7.050.000,00	100,00		14,10	
	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	8.763.500,00	66,67		8,76	
	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	5.616.975.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.002.2.04. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.904.180.000,00	9.020.950.000,00	50,00		35,48	
	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00		100,00	
	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.554.180.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	20.950.000,00	100,00		41,90	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.01.1.01.0.003. Program Pengembangan Kurikulum	250.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.003.2.01. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.003.2.01.0002.Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.003.2.01.0004.Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.003.2.02.Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	1.01.1.01.0.004.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100.000.000,00	46.300.000,00	50,00		46,30	
	1.01.1.01.0.004.2.01.Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	46.300.000,00	50,00		46,30	
	1.01.1.01.0.004.2.01.0001.Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	46.300.000,00	100,00		92,60	
	1.01.1.01.0.004.2.01.0002. Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.02	Kesehatan	125.999.913.218,00	26.208.805.561,00	50,00	Sangat Rendah	20,80	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	123.243.122.218,00	26.085.475.411,00	64,47		36,89	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	36.334.669.157,00	4.141.611.420,00	27,04		16,24	
	Pembangunan Puskesmas	5.000.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengembangan Puskesmas	1.280.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.489.408.349,00	361.660.000,00	20,00		10,36	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.348.214.120,00	268.241.120,00	50,00		11,42	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.150.000.000,00	1.476.769.900,00	77,00		68,69	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	21.267.046.688,00	1.882.094.200,00	58,33		8,85	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000,00	152.846.200,00	11,00		30,57	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.573.738.963,00	21.750.007.391,00	30,83		16,21	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.300.000.000,00	1.000.000.000,00	28,74		43,48	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	300.000.000,00	18.940.100,00	32,56		6,31	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000.000,00	14.992.700,00	32,19		7,50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	288.200.000,00	4.500.000,00	100,00		1,56	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	200.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	200.000.000,00	9.900.000,00	11,28		4,95	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	217.850.000,00	2.400.000,00	5,00		1,10	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	200.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	200.000.000,00	12.800.000,00	5,71		6,40	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	200.000.000,00	9.320.000,00	13,14		4,66	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200.000.000,00	7.100.000,00	18,98		3,55	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000.000,00	322.000.000,00	70,00		64,40	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000,00	6.991.500,00	10,00		6,99	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.611.800.000,00	79.323.300,00	50,00		3,04	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	145.471.000,00	23.276.100,00	50,00		16,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	412.935.600,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100.000.000,00	33.330.400,00	100,00		33,33	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	206.645.000,00	15.747.000,00	50,00		7,62	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	350.000.000,00	141.634.000,00	25,00		40,47	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	71.349.976.251,00	18.435.331.531,00	91,67		25,84	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional	240.281.000,00	-	0,00		0,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.769.483.112,00	-	0,00		0,00	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	267.051.000,00	15.052.200,00	10,00		5,64	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.700.000.000,00	589.468.560,00	34,67		34,67	
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.000.000,00	7.900.000,00	55,00		52,67	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.274.046.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	10.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Oprasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00		100,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	234.714.098,00	137.188.700,00	100,00		58,45	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	234.714.098,00	137.188.700,00	100,00		58,45	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	100.000.000,00	56.667.900,00	100,00		56,67	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	56.667.900,00	100,00		56,67	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.529.016.000,00	16.698.000,00	33,33		11,13	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	1.529.016.000,00	16.698.000,00	33,33		11,13	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	16.698.000,00	100,00		33,40	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia kesehatan	53.830.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kopentensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.425.186.000,00	-	0,00		0,00	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	824.775.000,00	11.700.000,00	10,00		1,42	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	824.775.000,00	11.700.000,00	10,00		1,42	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga	824.775.000,00	11.700.000,00	10,00		1,42	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	403.000.000,00	94.932.150,00	39,17		23,32	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000,00	54.975.800,00	58,33		36,65	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000,00	54.975.800,00	58,33		36,65	
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	253.000.000,00	39.956.350,00	20,00		9,99	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000,00	39.956.350,00	40,00		19,98	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	53.000.000,00	-	0,00		0,00	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.486.367.457,00	10.827.676.442,00	45,00	Sangat Rendah	14,54	Sangat Rendah

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.243.629.500,00	350.565.500,00	42,07		11,78	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.243.629.500,00	350.565.500,00	42,07		11,78	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.999.784.000,00	32.691.500,00	35,00		1,63	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.052.687.200,00	57.780.000,00	35,00		1,89	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	596.943.800,00	249.864.000,00	63,30		41,86	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	594.214.500,00	10.230.000,00	35,00		1,72	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.042.121.300,00	1.872.552.250,00	60,00		9,15	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.042.121.300,00	1.872.552.250,00	60,00		9,15	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	199.100.000,00	2.075.000,00	40,00		1,04	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.843.021.300,00	1.870.477.250,00	80,00		17,25	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.625.259.000,00	18.470.700,00	25,00		0,33	
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.625.259.000,00	18.470.700,00	25,00		0,33	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	5.625.259.000,00	18.470.700,00	25,00		0,33	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.319.591.000,00	296.270.400,00	41,09		27,64	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.319.591.000,00	296.270.400,00	41,09		27,64	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	799.400.000,00	24.840.200,00	30,00		3,11	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	520.191.000,00	271.430.200,00	52,18		52,18	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.316.249.300,00	5.382.122.631,00	44,66		40,42	
	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.316.249.300,00	5.382.122.631,00	44,66		40,42	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	13.316.249.300,00	5.382.122.631,00	44,66		40,42	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.098.522.757,00	2.338.033.451,00	22,44		5,92	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	35.098.522.757,00	2.338.033.451,00	22,44		5,92	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	703.608.500,00	59.564.300,00	28,39		8,47	
	Rekonstruksi Jalan	10.567.750.500,00	26.140.169,00	25,11		0,25	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.178.216.700,00	26.580.500,00	25,30		0,64	
	Rehabilitasi Jembatan	200.000.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	434.013.500,00	23.679.300,00	27,33		5,46	
	Rehabilitasi Jalan	10.818.255.696,00	86.577.480,00	25,11		0,80	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.196.677.861,00	2.115.491.702,00	25,81		25,81	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	545.782.300,00	337.434.900,00	48,72		45,46	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	323.665.000,00	271.166.000,00	66,59		66,59	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	299.523.000,00	259.965.500,00	86,79		86,79	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	24.142.000,00	11.200.500,00	46,39		46,39	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	131.445.300,00	23.006.400,00	31,86		22,07	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	38.455.300,00	12.725.900,00	33,09		33,09	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	92.990.000,00	10.280.500,00	30,62		11,06	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	90.672.000,00	43.262.500,00	47,71		47,71	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	90.672.000,00	43.262.500,00	47,71		47,71	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.295.212.300,00	232.226.610,00	39,78		26,36	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota	503.899.900,00	156.546.360,00	39,41		31,07	
	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	503.899.900,00	156.546.360,00	39,41		31,07	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	668.432.700,00	20.452.200,00	35,00		3,06	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	668.432.700,00	20.452.200,00	35,00		3,06	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	122.879.700,00	55.228.050,00	44,94		44,94	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	60.502.900,00	27.124.000,00	44,83		44,83	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	62.376.800,00	28.104.050,00	45,06		45,06	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.308.286.350,00	548.012.995,00	46,90	Sangat Rendah	4,85	Sangat Rendah
	Program Pengembangan Perumahan	1.180.000.000,00	339.220.651,00	33,33		31,83	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	355.000.000,00	339.220.651,00	100,00		95,49	
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000,00	97.300.000,00	100,00		97,30	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	75.000.000,00	72.525.269,00	100,00		96,70	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	80.000.000,00	74.185.873,00	100,00		92,73	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000,00	95.209.509,00	100,00		95,21	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	175.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	75.000.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi untuk Menyetujui Penerimaan dan Jenis Pelayanan	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	650.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	650.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Kawasan Permukiman	1.339.218.000,00	23.617.600,00	33,33		1,76	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.339.218.000,00	23.617.600,00	33,33		1,76	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.339.218.000,00	23.617.600,00	33,33		1,76	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.370.856.350,00	181.823.744,00	3,27		3,26	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.370.856.350,00	181.823.744,00	3,27		3,26	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	583.096.350,00	18.076.900,00	3,85		3,10	
	Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka Pencegahan Terhadap tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.787.760.000,00	163.746.844,00	2,70		3,42	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.418.212.000,00	3.351.000,00	2,50		2,39	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.418.212.000,00	3.351.000,00	2,50		2,39	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	70.000.000,00	3.351.000,00	5,00		4,79	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.348.212.000,00	-	0,00		0,00	
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10.659.906.738,00	4.443.644.621,00	51,50	Rendah	41,69	Sangat Rendah
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.870.267.400,00	2.319.844.800,00	36,33		44,88	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.614.618.400,00	2.173.259.500,00	50,00		63,83	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	93.598.400,00	12.504.500,00	50,00		13,36	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.552.000,00	58.360.900,00	50,00		56,36	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak AsasiManusia	800.000.000,00	799.954.000,00	50,00		99,99	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.053.640.200,00	812.192.400,00	50,00		39,55	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	212.379.200,00	183.842.900,00	50,00		86,56	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	351.448.600,00	306.404.800,00	50,00		87,18	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	229.794.000,00	145.730.300,00	49,00		67,51	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	205.484.800,00	128.059.200,00	48,00		62,32	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.309.200,00	17.671.100,00	50,00		72,69	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.855.000,00	855.000,00	10,00		3,31	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.855.000,00	855.000,00	10,00		3,31	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.050.373.900,00	1.158.260.945,00	49,67		56,48	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.050.373.900,00	1.158.260.945,00	49,67		56,48	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.025.383.900,00	1.144.147.445,00	49,33		56,49	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.990.000,00	14.113.500,00	50,00		56,48	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.739.265.438,00	965.538.876,00	18,97		21,03	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	196.593.000,00	8.050.000,00	13,54		13,53	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	29.743.000,00	8.050.000,00	27,07		27,07	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	66.850.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.052.209.450,00	764.192.200,00	11,11		11,51	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	29.363.200,00	17.040.000,00	50,00		58,03	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.749.143.000,00	-	0,00		0,00	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	26.023.300,00	-	0,00		0,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	36.406.800,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31.620.850,00	-	0,00		0,00	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	95.418.300,00	-	0,00		0,00	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.641.234.000,00	747.152.200,00	50,00		45,52	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	343.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	395.880.988,00	188.696.676,00	47,11		54,99	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	40.321.700,00	17.896.288,00	50,00		44,38	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.117.588,00	26.632.588,00	26,60		26,60	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	218.103.900,00	106.830.000,00	11,84		48,98	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	37.337.800,00	37.337.800,00	100,00		100,00	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	94.582.000,00	4.600.000,00	4,11		4,11	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.350.300,00	-	0,00		0,00	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	16.015.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14.961.200,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.230.300,00	1.790.000,00	8,85		8,85	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	24.025.200,00	2.810.000,00	11,70		11,70	
1.06	Sosial	6.892.731.000,00	1.984.945.462,00	50,00	Sangat Rendah	28,80	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.698.935.800,00	218.680.400,00	49,59		30,46	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.698.935.800,00	218.680.400,00	49,59		30,46	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.125.000,00	4.558.900,00	48,00		12,62	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.111.400,00	5.252.000,00	50,00		3,95	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.508.754.800,00	189.445.900,00	0,36		12,56	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.944.600,00	19.423.600,00	100,00		92,74	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.016.692.700,00	1.310.560.800,00	52,60		35,53	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.870.416.200,00	1.270.112.600,00	49,36		43,27	
	Penyediaan Permakanan	2.067.407.400,00	919.155.800,00	2,86		44,46	
	Penyediaan Sandang	115.172.500,00	48.302.000,00	35,56		41,94	
	Penyediaan Alat Bantu	207.570.100,00	132.378.500,00	42,44		63,78	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.362.500,00	18.256.700,00	5,45		34,21	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.020.000,00	18.986.400,00	100,00		48,66	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36.101.900,00	14.084.700,00	100,00		39,01	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	295.597.300,00	102.035.500,00	51,93		34,52	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.539.300,00	9.426.600,00	78,00		64,84	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.645.200,00	7.486.400,00	28,00		17,98	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	146.276.500,00	40.448.200,00	55,83		27,79	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.058.100,00	17.308.200,00	100,00		44,31	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	34.682.000,00	17.386.500,00	100,00		50,13	
	Penyediaan Permakanan	38.126.500,00	-	0,00		0,00	
	Pemberian Layanan Rujukan	34.409.900,00	5.753.500,00	23,33		16,72	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.244.364.500,00	165.213.600,00	76,25		23,87	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.244.364.500,00	165.213.600,00	76,25		23,87	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	131.760.500,00	93.311.300,00	100,00		70,82	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	193.404.900,00	13.300.000,00	100,00		6,88	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	311.670.900,00	52.180.000,00	100,00		16,74	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	607.528.200,00	6.422.300,00	5,00		1,06	
	PROGRAM PENANGNAN BENCANA	826.618.800,00	246.362.262,00	57,50		37,98	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	397.728.100,00	237.909.100,00	64,71		73,06	
	Penyediaan Makanan	330.084.000,00	174.919.900,00	100,00		52,99	
	Penyediaan Sandang	67.644.100,00	62.989.200,00	29,41		93,12	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	428.890.700,00	8.453.162,00	50,29		2,91	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.897.200,00	1.800.000,00	5,00		4,10	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	384.993.500,00	6.653.162,00	95,59		1,73	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	106.119.200,00	44.128.400,00	50,00		37,55	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	106.119.200,00	44.128.400,00	50,00		37,55	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	70.119.200,00	35.128.400,00	50,00		50,10	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	36.000.000,00	9.000.000,00	50,00		25,00	
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	320.199.930.556,00	89.530.764.264,00	50,00	Sangat Rendah	27,96	Sangat Rendah
2.07	Tenaga Kerja	4.709.396.500,00	915.160.700,00	50,00	Sangat Rendah	19,43	Sangat Rendah
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.880.000.000,00	883.391.800,00	31,19		20,39	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.500.000.000,00	574.569.400,00	53,57		38,30	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.500.000.000,00	574.569.400,00	53,57		38,30	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.000.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.350.000.000,00	308.822.400,00	40,00		22,88	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.350.000.000,00	308.822.400,00	40,00		22,88	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	291.246.500,00	10.711.900,00	23,78		2,72	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	185.000.000,00	3.880.600,00	43,69		1,29	
	Pelayanan Antar Kerja	150.000.000,00	3.880.600,00	87,39		2,59	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	35.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	106.246.500,00	6.831.300,00	3,86		4,14	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	82.500.000,00	6.831.300,00	7,72		8,28	
	Job Fair/Bursa Kerja	23.746.500,00	-	0,00		0,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.538.150.000,00	21.057.000,00	16,67		3,97	
	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	1.390.415.000,00	18.517.600,00	25,00		4,74	
	Pengesahaan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	40.415.000,00	3.381.600,00	25,00		8,37	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.350.000.000,00	15.136.000,00	25,00		1,12	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat di Daerah Kabupaten/Kota	147.735.000,00	2.539.400,00	8,33		3,20	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.300.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	26.435.000,00	2.539.400,00	25,00		9,61	
	Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	-	0,00		0,00	
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.322.440.500,00	466.890.400,00	48,00	Sangat Rendah	20,10	Sangat Rendah
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.030.300.000,00	36.266.100,00	9,89		6,91	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	2.343.000,00	2,50		2,34	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	50.000.000,00	2.343.000,00	5,00		4,69	
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	580.400.000,00	9.854.100,00	12,50		3,62	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	60.000.000,00	3.631.400,00	15,00		6,05	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	520.400.000,00	6.222.700,00	10,00		1,20	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	349.900.000,00	24.069.000,00	14,67		14,75	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.400.000,00	24.069.000,00	44,00		44,24	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	256.000.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.500.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Perlindungan Perempuan	96.300.000,00	26.507.300,00	20,50		22,09	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	26.507.300,00	41,00		44,18	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	26.507.300,00	41,00		44,18	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.300.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.300.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	661.000.000,00	35.027.400,00	5,00		5,50	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	661.000.000,00	35.027.400,00	5,00		5,50	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	361.000.000,00	12.000.000,00	3,00		3,32	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	23.027.400,00	7,00		7,68	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	29.300.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.300.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.300.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	112.900.000,00	4.900.000,00	6,50		4,89	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.900.000,00	4.900.000,00	6,50		4,89	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	68.000.000,00	1.500.000,00	5,00		2,21	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.900.000,00	3.400.000,00	8,00		7,57	
	Program Perlindungan Khusus Anak	392.640.500,00	364.189.600,00	88,00		95,74	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.500.000,00	278.164.600,00	134,00		149,95	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.500.000,00	278.164.600,00	134,00		149,95	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.140.500,00	86.025.000,00	42,00		41,53	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	207.140.500,00	86.025.000,00	42,00		41,53	
2.09	Pangan	5.302.032.100,00	328.525.500,00	44,00	Sangat Rendah	6,20	Sangat Rendah
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5.302.032.100,00	328.525.500,00	44,00	Sangat Rendah	6,20	Sangat Rendah
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	491.266.700,00	2.184.000,00	5,00		0,44	
	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	491.266.700,00	2.184.000,00	5,00		0,44	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	491.266.700,00	2.184.000,00	5,00		0,44	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.163.006.000,00	319.311.000,00	15,00		13,61	
	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	607.089.100,00	171.619.500,00	15,00		10,87	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	87.261.800,00	9.489.200,00	10,00		10,87	
	Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota	497.095.200,00	162.130.300,00	50,00		32,62	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	15.782.100,00	-	0,00		0,00	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan Nbm	6.950.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.062.707.100,00	-	0,00		0,00	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.062.707.100,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	493.209.800,00	147.691.500,00	30,00		29,94	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	493.209.800,00	147.691.500,00	30,00		29,94	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	510.097.600,00	3.480.000,00	2,50		0,35	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	510.097.600,00	3.480.000,00	2,50		0,35	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	491.931.000,00	3.480.000,00	5,00		0,71	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota	18.166.600,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	137.661.800,00	3.550.500,00	8,33		4,19	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	137.661.800,00	3.550.500,00	8,33		4,19	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.243.200,00	3.550.500,00	25,00		12,57	
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	94.833.400,00	-	0,00		0,00	
	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	14.585.200,00	-	0,00		0,00	
2.10	Pertanahan	7.740.205.000,00	1.673.235.700,00	46,90	Sangat Rendah	21,62	Sangat Rendah
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	7.740.205.000,00	1.673.235.700,00	33,33		21,62	
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.740.205.000,00	1.673.235.700,00	33,33		21,62	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.740.205.000,00	1.673.235.700,00	33,33		21,62	
2.11	Lingkungan Hidup	6.066.489.800,00	3.479.865.940,00	50,00	Sangat Rendah	57,36	Rendah
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	275.000.000,00	47.350.000,00	50,00		47,35	
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000,00	47.350.000,00	50,00		47,35	
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	225.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.350.000,00	100,00		94,70	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	727.324.100,00	265.329.250,00	50,00		36,48	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	727.324.100,00	265.329.250,00	50,00		36,48	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	727.324.100,00	265.329.250,00	50,00		36,48	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	230.843.200,00	10.767.700,00	10,00		5,05	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	230.843.200,00	10.767.700,00	10,00		5,05	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000,00	1.662.100,00	10,00		1,66	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil emisi GRK	49.435.200,00	9.000.000,00	20,00		18,21	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup	31.408.000,00	105.600,00	10,00		0,34	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	575.500.000,00	106.679.800,00	16,67		15,18	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	575.500.000,00	106.679.800,00	16,67		15,18	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	25.500.000,00	6.505.100,00	25,00		25,51	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	500.000.000,00	100.174.700,00	25,00		20,03	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati lainnya	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	130.000.000,00	37.436.600,00	40,00		28,80	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	65.000.000,00	18.735.600,00	50,00		28,82	
	Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	65.000.000,00	18.735.600,00	50,00		28,82	
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	18.701.000,00	30,00		28,77	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	65.000.000,00	18.701.000,00	30,00		28,77	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	490.828.700,00	32.518.200,00	15,00		14,61	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	490.828.700,00	32.518.200,00	15,00		14,61	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	21.500.000,00	517.900,00	5,00		2,41	
	Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha dan atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	35.575.300,00	13.192.700,00	33,33		37,08	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	433.753.400,00	18.807.600,00	6,67		4,34	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	42.550.000,00	12.247.600,00	27,50		28,06	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.550.000,00	12.247.600,00	27,50		28,06	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	21.850.000,00	11.965.800,00	50,00		54,76	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	20.700.000,00	281.800,00	5,00		1,36	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.822.200,00	1.363.300,00	10,00		7,65	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.822.200,00	1.363.300,00	10,00		7,65	
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.822.200,00	1.363.300,00	10,00		7,65	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	18.761.800,00	2.489.300,00	25,00		13,27	
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	18.761.800,00	2.489.300,00	25,00		13,27	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	18.761.800,00	2.489.300,00	25,00		13,27	
	Program Pengelolaan Persampahan	3.557.859.800,00	2.963.684.190,00	32,50		95,39	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	3.557.859.800,00	2.963.684.190,00	32,50		95,39	
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	31.671.400,00	-	0,00		0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.340.000.000,00	1.961.000,00	10,00		0,08	
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	576.188.400,00	2.879.391.472,00	100,00		499,73	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100.000.000,00	19.476.300,00	25,00		19,48	
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	75.000.000,00	35.000.000,00	50,00		46,67	
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	435.000.000,00	27.855.418,00	10,00		6,40	
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1.419.080.500,00	559.547.500,00	50,00	Sangat Rendah	39,43	Sangat Rendah
	Program Pendaftaran Penduduk	990.118.800,00	440.050.500,00	100,00		40,06	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	877.415.800,00	401.302.700,00	100,00		45,74	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	877.415.800,00	401.302.700,00	100,00		45,74	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	112.703.000,00	38.747.800,00	100,00		34,38	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait PendaftaranPenduduk	112.703.000,00	38.747.800,00	100,00		34,38	
	Program Pencatatan Sipil	244.376.000,00	78.033.900,00	50,00		24,73	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	65.000.000,00	13.216.100,00	50,00		20,33	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	65.000.000,00	13.216.100,00	50,00		20,33	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	179.376.000,00	64.817.800,00	50,00		29,13	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	119.376.000,00	60.028.600,00	50,00		50,29	
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	60.000.000,00	4.789.200,00	50,00		7,98	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	184.585.700,00	41.463.100,00	50,00		27,78	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	36.097.600,00	10.505.700,00	50,00		29,10	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	36.097.600,00	10.505.700,00	50,00		29,10	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	148.488.100,00	30.957.400,00	50,00		26,46	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.072.600,00	15.387.300,00	50,00		23,65	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	21.573.500,00	10.121.900,00	50,00		46,92	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	61.842.000,00	5.448.200,00	50,00		8,81	
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.277.253.262,00	4.580.050.337,00	50,00	Sangat Rendah	49,37	Sangat Rendah
	Program Penataan Desa	215.080.000,00	75.307.600,00	50,00		35,01	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	215.080.000,00	75.307.600,00	50,00		35,01	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	215.080.000,00	75.307.600,00	50,00		35,01	
	Program Peningkatan Kerjasama antar Desa	42.000.000,00	10.980.000,00	25,00		26,14	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	42.000.000,00	10.980.000,00	25,00		26,14	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	42.000.000,00	10.980.000,00	25,00		26,14	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.645.411.662,00	3.533.081.537,00	30,29		32,24	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.645.411.662,00	3.533.081.537,00	30,29		32,24	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	305.000.450,00	41.137.200,00	30,00		13,49	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	31.700.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.464.321.812,00	3.160.464.537,00	55,00		57,84	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	303.655.000,00	184.335.000,00	11,73		60,71	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	510.000.000,00	136.498.600,00	50,00		26,76	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.734.400,00	10.646.200,00	35,00		34,64	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.374.761.600,00	960.681.200,00	29,29		26,28	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.374.761.600,00	960.681.200,00	29,29		26,28	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	145.000.000,00	44.711.300,00	30,00		30,84	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	275.000.000,00	111.881.400,00	50,00		40,68	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.252.713.600,00	730.544.400,00	60,00		58,32	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	56.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	89.720.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	56.328.000,00	25.010.400,00	50,00		44,40	
	Fasilitasi TIM Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00	48.533.700,00	15,00		9,71	
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.995.820.000,00	3.010.270.419,00	48,00	Sangat Rendah	30,12	Sangat Rendah
	Program Pengendalian Penduduk	807.347.000,00	318.723.930,00	48,17		48,46	
	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	50.000.000,00	29.940.000,00	60,00		59,88	
	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal	50.000.000,00	29.940.000,00	60,00		59,88	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota	757.347.000,00	288.783.930,00	36,33		37,05	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	148.947.000,00	45.553.400,00	30,00		30,58	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	296.400.000,00	154.373.000,00	51,00		52,08	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	312.000.000,00	88.857.530,00	28,00		28,48	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.762.473.000,00	2.671.048.089,00	30,43		25,28	
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	2.128.400.000,00	459.450.589,00	19,20		17,54	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengendalian Program KKBPK	53.600.000,00	2.880.000,00	5,00		5,37	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.274.000.000,00	310.540.589,00	24,00		24,38	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	520.000.000,00	89.800.000,00	17,00		17,27	
	Promosi dan KIE program Bangsa Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	130.800.000,00	32.830.000,00	25,00		25,10	
	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	150.000.000,00	23.400.000,00	25,00		15,60	
	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	3.049.000.000,00	1.485.598.100,00	45,00		48,31	
	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1.449.000.000,00	580.000.000,00	40,00		40,03	
	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	1.600.000.000,00	905.598.100,00	50,00		56,60	
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	2.343.073.000,00	376.744.400,00	17,00		16,70	
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	105.400.000,00	8.656.400,00	8,00		8,21	
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	2.023.673.000,00	344.382.700,00	20,00		17,02	
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	105.800.000,00	2.150.000,00	2,00		2,03	
	Peningkatan kesertaan KB pria	75.000.000,00	5.190.100,00	6,00		6,92	
	Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan	33.200.000,00	16.365.200,00	49,00		49,29	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1.242.000.000,00	349.255.000,00	40,50		18,57	
	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	138.800.000,00	8.705.000,00	50,00		6,27	
	Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung Keluarga Berkualitas	1.103.200.000,00	340.550.000,00	31,00		30,87	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	426.000.000,00	20.498.400,00	31,13		22,55	
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	392.500.000,00	6.032.600,00	19,25		1,92	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	66.200.000,00	841.000,00	25,00		1,27	
	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50.000.000,00	1.470.200,00	2,00		2,94	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	107.300.000,00	3.721.400,00	50,00		3,47	
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	33.500.000,00	14.465.800,00	43,00		43,18	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33.500.000,00	14.465.800,00	43,00		43,18	
2.15	Perhubungan	16.907.143.393,00	4.357.026.544,00	45,00	Sangat Rendah	25,77	Sangat Rendah
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.907.143.393,00	4.357.026.544,00	12,92		5,58	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	350.000.000,00	18.946.200,00	10,00		5,41	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	350.000.000,00	18.946.200,00	10,00		5,41	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	7.240.000.000,00	2.947.381.362,00	16,39		33,08	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	50.000.000,00	8.743.900,00	10,00		17,49	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.500.000.000,00	112.854.100,00	10,00		3,22	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	50.000.000,00	17.222.800,00	10,00		34,45	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.640.000.000,00	2.808.560.562,00	35,55		77,16	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	400.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	200.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.800.000.000,00	511.220.882,00	45,00		9,65	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.650.000.000,00	511.220.882,00	90,00		19,29	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.398.143.393,00	57.600.100,00	22,43		1,92	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	44.008.700,00	52,00		7,33	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	373.143.393,00	2.100.000,00	32,56		0,56	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	315.000.000,00	11.491.400,00	50,00		3,65	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.929.000.000,00	754.577.000,00	31,25		10,19	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	110.809.300,00	50,00		9,23	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50.000.000,00	3.100.000,00	25,00		6,20	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.529.000.000,00	640.667.700,00	50,00		25,33	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	150.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	90.000.000,00	11.258.100,00	30,00		12,51	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	90.000.000,00	11.258.100,00	30,00		12,51	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.000.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	26.401.600,00	25,00		13,20	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	26.401.600,00	25,00		13,20	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	29.641.300,00	25,00		7,41	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000,00	29.641.300,00	50,00		14,82	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
2.16	Komunikasi dan Informatika	9.694.867.300,00	1.961.260.400,00	50,00	Sangat Rendah	20,23	Sangat Rendah
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.735.521.200,00	401.500.933,00	25,00		10,78	
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten/Kota	2.735.521.200,00	401.500.933,00	25,00		10,78	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	99.854.900,00	1.816.900,00	25,00		1,82	
	Pelayanan Informasi Publik	534.846.200,00	26.877.097,00	25,00		5,03	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	95.642.000,00	12.459.000,00	25,00		13,03	
	Diseminasi Informasi	636.084.900,00	91.876.100,00	25,00		14,44	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.369.093.200,00	268.471.836,00	25,00		19,61	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.959.346.100,00	1.559.759.467,00	11,46		9,50	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.833.600,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Nama Domain dan Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.	27.833.600,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.931.512.500,00	1.559.759.467,00	22,92		19,00	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	480.000.000,00	150.000.000,00	16,67		31,25	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	495.058.500,00	67.061.800,00	25,00		13,55	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota Cerdas	198.174.900,00	16.154.380,00	25,00		8,15	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	5.758.279.100,00	1.326.543.287,00	25,00		23,04	
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.425.915.709,00	223.071.859,00	47,00	Sangat Rendah	9,20	Sangat Rendah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	28.773.500,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	28.773.500,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	28.773.500,00	-	0,00		0,00	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	47.262.300,00	-	0,00		0,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.262.300,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	47.262.300,00	-	0,00		0,00	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.819.195.000,00	53.414.800,00	100,00		2,94	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.819.195.000,00	53.414.800,00	100,00		2,94	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.819.195.000,00	53.414.800,00	100,00		2,94	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	161.454.300,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	161.454.300,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	161.454.300,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengembangan UMKM	369.230.609,00	169.657.059,00	4,86		45,95	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	369.230.609,00	169.657.059,00	4,86		45,95	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	369.230.609,00	169.657.059,00	4,86		45,95	
2.18	Penanaman Modal	586.438.450,00	111.070.800,00	50,00	Sangat Rendah	18,94	Sangat Rendah
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	279.968.400,00	13.279.600,00	4,67		4,74	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	279.968.400,00	13.279.600,00	4,67		4,74	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	93.322.800,00	4.658.400,00	5,00		4,99	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	93.322.800,00	3.962.800,00	4,00		4,25	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	93.322.800,00	4.658.400,00	5,00		4,99	
	Program Promosi Penanaman Modal	79.715.600,00	19.778.400,00	25,00		24,81	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	79.715.600,00	19.778.400,00	25,00		24,81	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	79.715.600,00	19.778.400,00	25,00		24,81	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	155.527.950,00	44.174.400,00	23,00		22,74	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	155.527.950,00	44.174.400,00	23,00		22,74	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.668.150,00	32.862.400,00	45,00		45,22	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan	21.128.150,00	1.504.200,00	8,00		7,12	
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	61.731.650,00	9.807.800,00	16,00		15,89	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	48.581.000,00	18.165.700,00	25,00		24,73	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	48.581.000,00	18.165.700,00	25,00		24,73	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	11.850.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengawasan Penanaman Modal	36.731.000,00	18.165.700,00	50,00		49,46	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	22.645.500,00	15.672.700,00	69,00		69,21	
	Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	22.645.500,00	15.672.700,00	69,00		69,21	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.645.500,00	15.672.700,00	69,00		69,21	
2.19	Kepemudaan dan Olahraga				Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.20	Statistik	220.817.400,00	69.830.200,00	50,00	Sangat Rendah	31,62	Sangat Rendah
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	220.817.400,00	69.830.200,00	37,50		35,78	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	220.817.400,00	69.830.200,00	37,50		35,78	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	68.391.400,00	31.936.200,00	50,00		46,70	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	152.426.000,00	37.894.000,00	25,00		24,86	
2.21	Persandian	445.163.400,00	19.771.200,00	50,00	Sangat Rendah	4,44	Sangat Rendah
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamnan Informasi	445.163.400,00	19.771.200,00	20,00		3,18	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	445.163.400,00	19.771.200,00	20,00		3,18	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.630.700,00	910.000,00	25,00		3,42	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.971.800,00	959.300,00	25,00		1,60	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	160.808.100,00	1.358.000,00	25,00		0,84	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	165.003.700,00	16.543.900,00	25,00		10,03	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.749.100,00	-	0,00		0,00	
2.22	Kebudayaan				Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.23	Perpustakaan	1.366.473.000,00	474.949.992,00	48,00	Sangat Rendah	34,76	Sangat Rendah
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.336.473.000,00	474.949.992,00	30,62		24,17	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	735.685.800,00	298.749.992,00	36,25		26,84	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.439.600,00	26.224.350,00	62,00		29,65	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	160.018.400,00	55.578.142,00	44,21		34,73	
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	33.294.200,00	12.867.500,00	41,33		38,65	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	52.130.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	15.800.100,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	217.578.800,00	157.580.000,00	72,42		72,42	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	118.424.700,00	46.500.000,00	70,00		39,27	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.787.200,00	176.200.000,00	25,00		21,50	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.797.200,00	-	0,00		0,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	33.700.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	310.140.000,00	23.250.000,00	25,00		7,50	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	152.950.000,00	152.950.000,00	100,00		100,00	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	30.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30.000.000,00	-	0,00		0,00	
2.24	Kearsipan	244.938.300,00	70.032.200,00	48,00	Sangat Rendah	28,59	Sangat Rendah
	Program Pengelolaan Arsip	146.859.900,00	47.300.000,00	13,57		12,97	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	131.793.600,00	47.300.000,00	27,14		25,93	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	33.709.800,00	9.000.000,00	30,33		26,70	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.133.800,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	74.950.000,00	38.300.000,00	51,10		51,10	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	15.066.300,00	-	0,00		0,00	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	15.066.300,00	-	0,00		0,00	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	98.078.400,00	22.732.200,00	30,26		25,67	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	57.092.600,00	6.000.000,00	10,51		10,51	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	57.092.600,00	6.000.000,00	10,51		10,51	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	40.985.800,00	16.732.200,00	50,00		40,82	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	40.985.800,00	16.732.200,00	50,00		40,82	
3	URUSAN PILIHAN	85.273.159.912,00	11.647.012.724,00	27,39	Sangat Rendah	13,66	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	6.739.263.000,00	731.762.854,00	45,00	Sangat Rendah	10,86	Sangat Rendah
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	212.299.400,00	39.724.900,00	40,67		47,59	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	126.943.400,00	9.954.600,00	36,00		34,27	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.735.100,00	7.094.700,00	67,00		66,09	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	116.208.300,00	2.859.900,00	5,00		2,46	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota	62.600.800,00	16.346.800,00	41,67		37,66	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000,00	9.166.000,00	33,33		18,33	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	12.600.800,00	7.180.800,00	50,00		56,99	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.044.600,00	8.802.900,00	25,00		58,51	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.044.600,00	8.802.900,00	25,00		58,51	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.710.600,00	4.620.600,00	60,00		59,93	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	7.710.600,00	4.620.600,00	60,00		59,93	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	626.202.600,00	103.008.550,00	30,69		32,22	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	62.831.900,00	27.670.200,00	27,50		37,23	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000,00	24.368.300,00	30,00		48,74	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12.831.900,00	3.301.900,00	25,00		25,73	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	563.370.700,00	75.338.350,00	33,89		27,20	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.548.000,00	10,00		3,10	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	495.362.500,00	61.902.150,00	16,67		12,50	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.008.200,00	11.888.200,00	75,00		66,02	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	36.406.800,00	7.694.000,00	20,40		21,13	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	36.406.800,00	7.694.000,00	20,40		21,13	
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	36.406.800,00	7.694.000,00	20,40		21,13	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23.281.500,00	7.574.200,00	26,67		32,53	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.281.500,00	7.574.200,00	26,67		32,53	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	23.281.500,00	7.574.200,00	26,67		32,53	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.201.135.500,00	496.295.364,00	30,97		21,36	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	57.474.900,00	-	0,00		0,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	17.718.100,00	-	0,00		0,00	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	39.756.800,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	38.893.100,00	12.179.800,00	35,00		31,32	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	38.893.100,00	12.179.800,00	35,00		31,32	
	Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	5.104.767.500,00	484.115.564,00	57,90		32,77	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.078.591.100,00	469.378.064,00	73,81		9,24	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/KotaLain	26.176.400,00	14.737.500,00	42,00		56,30	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	520.762.700,00	3.861.600,00	12,50		9,30	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	500.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembangunan, Rehabilitasidan operasionalisasi Rumah potong Hewan	500.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	20.762.700,00	3.861.600,00	25,00		18,60	
	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	20.762.700,00	3.861.600,00	25,00		18,60	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	107.860.300,00	72.486.840,00	55,56		66,04	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaam daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,00	30.564.400,00	50,00		61,13	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	30.564.400,00	50,00		61,13	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota	31.938.100,00	30.605.540,00	66,67		95,83	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	31.938.100,00	30.605.540,00	66,67		95,83	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	25.922.200,00	11.316.900,00	50,00		41,18	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	9.905.800,00	4.071.600,00	50,00		41,10	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.899.100,00	6.884.300,00	75,00		77,36	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	7.117.300,00	361.000,00	25,00		5,07	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.830.600,00	320.000,00	25,00		4,09	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	7.830.600,00	320.000,00	25,00		4,09	
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	7.830.600,00	320.000,00	25,00		4,09	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	3.483.600,00	797.400,00	25,00		22,89	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.483.600,00	797.400,00	25,00		22,89	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.483.600,00	797.400,00	25,00		22,89	
3.26	Pariwisata	829.045.800,00	60.303.800,00	25,00	Sangat Rendah	7,27	Sangat Rendah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	341.967.000	15.575.000	20,00		40,62	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	26.270.000	15.575.000	60,00		59,29	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	26.270.000	15.575.000	60,00		59,29	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	108.161.000	-	0,00		0,00	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	108.161.000	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	207.536.000	-	0,00		0,00	
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	207.536.000	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pemasaran Pariwisata	487.078.800	44.728.800	30,00		21,94	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	487.078.800	44.728.800	30,00		21,94	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	63.377.800	41.551.600	70,00		65,56	
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar negeri	48.555.000	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	336.226.000	895.400	25,00		0,27	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	38.920.000	2.281.800	25,00		5,86	
3.27	Pertanian	11.882.330.503,00	1.880.364.927,00	44,00	Sangat Rendah	15,82	Sangat Rendah
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.997.506.500,00	986.626.927,00	10,00		2,79	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.629.100.100,00	986.329.727,00	10,00		5,50	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.238.246.500,00	967.649.027,00	25,00		22,83	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	455.380.000,00	5.759.500,00	10,00		1,26	
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	590.013.200,00	10.001.200,00	5,00		1,70	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	173.882.800,00	1.581.300,00	5,00		0,91	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	171.577.600,00	1.338.700,00	5,00		0,78	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	368.406.400,00	297.200,00	10,00		0,08	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	368.406.400,00	297.200,00	10,00		0,08	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.347.161.003,00	603.913.600,00	22,50		17,29	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	256.353.300,00	40.761.000,00	30,00		24,22	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	81.353.300,00	38.234.400,00	50,00		47,00	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	175.000.000,00	2.526.600,00	10,00		1,44	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.090.807.703,00	563.152.600,00	15,00		10,36	
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	887.913.500,00	6.922.800,00	10,00		0,78	
	Pembangunan,Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	499.551.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.646.057.100,00	352.909.300,00	25,00		21,44	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.057.286.103,00	203.320.500,00	25,00		19,23	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	97.151.200,00	49.100.000,00	50,00		49,74	
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	97.151.200,00	49.100.000,00	50,00		49,74	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	97.151.200,00	49.100.000,00	50,00		49,74	
	Program Penyuluhan Pertanian	1.440.511.800,00	240.724.400,00	31,25		24,47	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.440.511.800,00	240.724.400,00	31,25		24,47	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	640.257.300,00	42.560.000,00	10,00		6,65	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa	427.832.200,00	30.288.000,00	10,00		7,08	
	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	212.422.300,00	134.632.900,00	75,00		63,38	
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	160.000.000,00	33.243.500,00	30,00		20,78	
3.28	Kehutanan	327.536.900,00	52.948.600,00	25,00	Sangat Rendah	16,17	Sangat Rendah
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	327.536.900,00	52.948.600,00	25,00		15,48	
	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	327.536.900,00	52.948.600,00	25,00		15,48	
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	48.363.300,00	7.013.300,00	25,00		14,50	
	Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	279.173.600,00	45.935.300,00	25,00		16,45	
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral				Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
3.30	Perdagangan	1.105.187.500,00	179.887.600,00	47,00	Sangat Rendah	16,28	Sangat Rendah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	654.846.200,00	-	0,00		0,00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	654.846.200,00	-	0,00		0,00	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	654.846.200,00	-	0,00		0,00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	226.355.700,00	87.064.600,00	30,09		38,06	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	76.712.900,00	21.249.300,00	36,11		47,56	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15.016.300,00	8.754.200,00	50,00		58,30	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8.570.100,00	6.220.100,00	33,33		72,58	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	53.126.500,00	6.275.000,00	25,00		11,81	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	131.192.900,00	64.653.000,00	41,67		54,74	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.322.300,00	6.920.800,00	25,00		22,82	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	73.608.400,00	30.470.000,00	25,00		41,39	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27.262.200,00	27.262.200,00	75,00		100,00	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.449.900,00	1.162.300,00	12,50		11,87	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.893.900,00	1.162.300,00	25,00		23,75	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.556.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengembangan Ekspor	92.599.400,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.599.400,00	-	0,00		0,00	
	Pameran Dagang Lokal	92.599.400,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	24.616.300,00	4.546.000,00	18,18		18,47	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	24.616.300,00	4.546.000,00	18,18		18,47	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	24.616.300,00	4.546.000,00	18,18		18,47	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	106.769.900,00	88.277.000,00	50,00		49,47	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	106.769.900,00	88.277.000,00	50,00		49,47	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	89.231.600,00	88.277.000,00	100,00		98,93	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	17.538.300,00	-	0,00		0,00	
3.31	Perindustrian	400.000.000,00	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	400.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	400.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	200.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	200.000.000,00	-	0,00		0,00	
3.32	Transmigrasi	139.705.100,00	25.941.600,00	6,25	Sangat Rendah	18,57	Sangat Rendah
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	128.090.100,00	25.941.600,00	12,50		12,97	
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.090.100,00	25.941.600,00	12,50		12,97	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.118.000,00	-	0,00		0,00	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.972.100,00	-	0,00		0,00	
	Penyuluhan Transmigran	50.000.000,00	25.941.600,00	50,00		51,88	
	Pelatihan Transmigran	30.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	11.615.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	11.615.000,00	-	0,00		0,00	
	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	11.615.000,00	-	0,00		0,00	
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	97.689.378.452,00	54.999.739.189,00	56,13	Rendah	56,30	Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	21.102.492.188,00	11.454.398.626,00	55,00	Rendah	54,28	Rendah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9.541.475.388,00	4.508.840.345,00				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.913.398.388,00	1.064.379.570,00	54,17		39,61	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.494.853.588,00	419.996.212,00	50,00		28,10	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	399.344.800,00	271.284.350,00	66,67		67,93	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	24.470.880,00	50,00		24,47	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	919.200.000,00	348.628.128,00	50,00		37,93	
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	527.542.000,00	388.028.048,00	67,31		67,29	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	249.497.200,00	227.746.745,00	91,28		91,28	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	200.044.800,00	121.338.153,00	60,66		60,66	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	78.000.000,00	38.943.150,00	50,00		49,93	
	Penataan Organisasi	350.432.400,00	130.498.300,00	46,00		38,00	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	116.466.600,00	29.639.800,00	25,00		25,45	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	34.148.900,00	895.300,00	5,00		2,62	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	111.076.500,00	39.919.100,00	50,00		35,94	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.951.200,00	11.642.000,00	50,00		30,68	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.789.200,00	48.402.100,00	100,00		95,30	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.750.102.600,00	2.925.934.427,00	61,11		49,45	
	Fasilitasi Keprotokolan	3.332.088.600,00	1.849.353.627,00	50,00		55,50	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.625.260.200,00	664.886.700,00	83,33		40,91	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	792.753.800,00	411.694.100,00	50,00		51,93	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.262.116.450,00	6.534.426.331,00	57,50		52,64	
	Administrasi Tata Pemerintahan	536.865.200,00	260.148.365,00	68,33		63,23	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	394.474.950,00	153.811.965,00	50,00		38,99	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	81.588.500,00	57.715.500,00	75,00		70,74	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	60.801.750,00	48.620.900,00	80,00		79,97	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.127.851.600,00	6.020.125.945,00	58,33		56,50	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	752.000.000,00	391.988.600,00	55,00		52,13	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8.337.126.400,00	5.608.737.545,00	70,00		67,27	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	38.725.200,00	19.399.800,00	50,00		50,10	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	325.769.750,00	136.732.320,00	50,00		41,50	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	137.877.500,00	61.219.870,00	50,00		44,40	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	108.951.000,00	44.565.850,00	50,00		40,90	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	78.941.250,00	30.946.600,00	50,00		39,20	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	271.629.900,00	117.419.701,00	53,33		49,34	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	64.761.700,00	33.947.200,00	55,00		52,42	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	69.593.000,00	49.119.901,00	75,00		70,58	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	137.275.200,00	34.352.600,00	30,00		25,02	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.298.900.350,00	411.131.950,00	49,17		39,94	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	493.535.800,00	56.536.600,00	25,00		11,58	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	239.559.400,00	37.739.900,00	25,00		15,75	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	253.976.400,00	18.796.700,00	25,00		7,40	
	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	324.990.000,00	53.211.150,00	25,00		16,37	
	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian kehutanan , kelautan	324.990.000,00	53.211.150,00	25,00		16,37	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	215.534.200,00	193.914.200,00	100,00		95,97	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	16.371.200,00	16.371.200,00	100,00		100,00	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20.163.000,00	20.163.000,00	100,00		100,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	179.000.000,00	157.380.000,00	100,00		87,92	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	264.840.350,00	107.470.000,00	46,67		35,83	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	141.918.300,00	47.147.800,00	50,00		33,22	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	82.027.950,00	59.716.200,00	75,00		72,80	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.894.100,00	606.000,00	15,00		1,48	
4.02	Sekretariat DPRD	13.279.409.700,00	9.182.144.685,00	65,00	Rendah	69,15	Sedang
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	13.279.409.700,00	9.182.144.685,00	61,37		61,17	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	453.175.000,00	388.208.411,00	75,00		84,60	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	101.222.000,00	83.699.044,00	100,00		82,69	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	351.953.000,00	304.509.367,00	50,00		86,52	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.340.084.000,00	171.008.000,00	16,67		13,13	
	Pembahasan KUA dan PPAS	377.709.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	377.709.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembahasan APBD	18.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	314.147.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembahasan Laporan Semester	35.390.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	217.129.000,00	171.008.000,00	100,00		78,76	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	720.833.000,00	533.073.600,00	47,92		56,40	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	48.200.000,00	27.325.800,00	33,33		56,69	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24.400.000,00	9.075.000,00	33,33		37,19	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48.200.000,00	33.790.800,00	33,33		70,11	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48.200.000,00	27.252.400,00	33,33		56,54	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24.910.000,00	24.438.100,00	100,00		98,11	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	13.945.000,00	3.600.000,00	25,00		25,82	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	105.870.000,00	9.505.000,00	25,00		8,98	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	407.108.000,00	398.086.500,00	100,00		97,78	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.328.098.900,00	1.344.712.962,00	48,33		45,54	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pendalaman Tugas DPRD	869.089.900,00	825.503.462,00	100,00		94,98	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	958.877.000,00	359.710.000,00	41,67		37,51	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000,00	105.000.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120.600.000,00	54.499.500,00	50,00		45,19	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	169.532.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.612.938.000,00	920.462.400,00	50,00		47,60	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	301.490.000,00	282.857.200,00	100,00		93,82	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.600.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Reses	1.301.848.000,00	637.605.200,00	50,00		48,98	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	67.145.000,00	62.389.600,00	100,00		92,92	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	67.145.000,00	62.389.600,00	100,00		92,92	
	Fasilitasi Tugas DPRD	6.757.135.800,00	5.762.289.712,00	91,67		88,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.661.019.800,00	4.818.793.768,00	91,67		85,12	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	253.091.000,00	242.174.200,00	100,00		95,69	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	843.025.000,00	701.321.744,00	83,33		83,19	
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.918.376.951.100,00	27.504.329.380,00	40,77	Sangat Rendah	1,43	Sangat Rendah

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.01	Perencanaan	3.590.000.000,00	1.315.841.270,00	50,00	Sangat Rendah	36,65	Sangat Rendah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.465.000.000,00	544.080.100,00	54,81		28,62	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.279.500.000,00	507.064.900,00	64,43		47,47	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	183.586.400,00	1.800.000,00	1,00		0,98	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	10.020.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	47.372.500,00	20.386.200,00	100,00		43,03	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	29.935.100,00	29.935.100,00	100,00		100,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	366.637.500,00	226.817.500,00	100,00		61,86	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19.811.900,00	18.363.100,00	100,00		92,69	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	622.136.600,00	209.763.000,00	50,00		33,72	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85.500.000,00	5.451.200,00	50,00		6,82	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.208.900,00	2.641.100,00	50,00		16,29	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	67.433.700,00	2.810.100,00	50,00		4,17	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.857.400,00	-	50,00		0,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	31.564.000,00	50,00		31,56	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	31.564.000,00	50,00		31,56	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.125.000.000,00	771.761.170,00	49,83		37,63	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	555.000.000,00	198.347.000,00	73,75		52,92	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.537.800,00	29.826.800,00	100,00		73,58	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.039.800,00	23.839.800,00	100,00		99,17	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.559.600,00	10.719.900,00	50,00		17,70	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	69.547.100,00	9.276.800,00	50,00		13,34	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.537.800,00	29.485.800,00	100,00		72,74	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.039.800,00	23.839.800,00	100,00		99,17	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	154.681.200,00	46.160.300,00	50,00		29,84	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	141.056.900,00	25.197.800,00	40,00		17,86	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	555.000.000,00	85.509.540,00	10,50		11,35	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.500.000,00	8.122.540,00	18,00		21,66	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	32.500.000,00	4.060.700,00	15,00		12,49	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	257.500.000,00	46.693.600,00	18,00		18,13	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000,00	3.269.500,00	18,00		10,90	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	32.500.000,00	4.060.700,00	15,00		12,49	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	128.000.000,00	19.302.500,00	0,00		15,08	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.015.000.000,00	487.904.630,00	65,25		48,61	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	270.000.000,00	184.774.230,00	75,00		68,43	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	155.000.000,00	16.841.400,00	25,00		10,87	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	210.000.000,00	186.909.000,00	91,00		89,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	380.000.000,00	99.380.000,00	70,00		26,15	
5.02	Keuangan	469.065.345.625,00	3.641.736.220,00	45,50	Sangat Rendah	0,78	Sangat Rendah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.541.322.575,00	1.341.386.660,00	36,67		25,60	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.541.322.575,00	1.341.386.660,00	36,67		25,60	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	340.638.950,00	183.007.597,00	33,33		53,72	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	344.767.780,00	78.993.830,00	33,33		22,91	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	383.600.000,00	31.603.800,00	50,00		8,24	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	551.022.680,00	116.786.000,00	25,00		21,19	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	344.177.380,00	128.136.100,00	40,00		37,23	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	709.970.000,00	209.307.200,00	50,00		29,48	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.050.000,00	-	0,00		0,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	31.576.100,00	12.220.600,00	50,00		38,70	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	401.486.600,00	113.631.200,00	50,00		28,30	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	126.264.900,00	64.515.000,00	36,67		51,09	
	Penagihan Pajak Daerah	1.466.761.020,00	346.818.700,00	50,00		23,65	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	672.005.500,00	48.806.633,00	33,33		7,26	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	69.001.665,00	7.560.000,00	25,00		10,96	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	461.758.587.050,00	1.252.940.050,00	30,20		30,96	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.442.692.650,00	716.756.450,00	37,90		42,59	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	156.485.400,00	93.052.000,00	75,00		59,46	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	106.037.200,00	47.609.000,00	15,00		44,90	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	120.590.100,00	1.800.000,00	2,00		1,49	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	87.298.200,00	66.425.400,00	60,00		76,09	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	87.298.200,00	43.400.000,00	6,00		49,71	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	121.121.850,00	8.237.500,00	1,00		6,80	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	226.155.400,00	151.507.300,00	55,00		66,99	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	399.985.900,00	220.751.250,00	80,00		55,19	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	128.670.800,00	83.974.000,00	85,00		65,26	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	9.049.600,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	602.590.200,00	293.956.100,00	44,20		42,54	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	127.805.600,00	74.493.600,00	58,00		58,29	
	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	14.847.900,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	68.846.400,00	40.595.100,00	68,00		58,96	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	175.471.800,00	117.786.100,00	67,00		67,13	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	215.618.500,00	61.081.300,00	28,00		28,33	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	524.917.200,00	242.227.500,00	38,70		38,70	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	15.247.900,00	11.378.900,00	75,00		74,63	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	10.294.300,00	9.017.700,00	88,00		87,60	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	61.463.100,00	24.148.300,00	39,00		39,29	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	127.831.700,00	91.317.100,00	71,00		71,44	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	138.280.300,00	35.567.900,00	26,00		25,72	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.028.300,00	1.360.700,00	27,00		27,06	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	9.317.000,00	-	0,00		0,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	20.833.400,00	-	0,00		0,00	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	23.275.300,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	113.345.900,00	69.436.900,00	61,00		61,26	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	459.188.387.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	400.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	408.165.772.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19.100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	31.522.615.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.765.436.000,00	1.047.409.510,00	38,40		38,45	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.765.436.000,00	1.047.409.510,00	38,40		38,45	
	Penyusunan Standar Harga	169.280.000,00	154.686.800,00	91,00		91,38	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	64.035.000,00	59.191.900,00	92,00		92,44	
	Penatausahaan Barang Milik daerah	137.588.500,00	3.371.900,00	2,00		2,45	
	Inventarisasi barang Milik daerah	41.598.900,00	6.183.900,00	15,00		14,87	
	Pengamanan Barang Milik daerah	951.922.200,00	713.441.010,00	75,00		74,95	
	Penilaian Barang Milik Daerah	61.022.000,00	2.500.000,00	4,00		4,10	
	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	48.478.000,00	6.155.600,00	13,00		12,70	
	Optimaliasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	179.182.000,00	69.850.000,00	39,00		38,98	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	60.829.600,00	32.028.400,00	53,00		52,65	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	51.499.800,00	-	0,00		0,00	
5.03	Kepegawaian	4.064.841.900,00	1.384.576.755,00	50,00	Sangat Rendah	34,06	Sangat Rendah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.064.841.900,00	1.384.576.755,00	36,67		30,19	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	749.828.600,00	350.672.952,00	34,00		27,40	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	457.951.600,00	306.134.602,00	75,00		66,85	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	66.863.200,00	37.485.850,00	60,00		56,06	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	50.013.800,00	7.052.500,00	35,00		14,10	
	Mutasi dan Promosi ASN	374.183.400,00	231.559.900,00	56,67		52,83	
	Pengelolaan Mutasi ASN	36.370.200,00	14.198.200,00	45,00		39,04	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	108.469.600,00	50.812.300,00	50,00		46,84	
	Pengelolaan Promosi ASN	229.343.600,00	166.549.400,00	75,00		72,62	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	192.729.400,00	11.798.303,00	15,00		8,82	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.407.200,00	5.073.500,00	35,00		30,92	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	154.309.100,00	6.724.803,00	25,00		4,36	
	Pembinaan disiplin ASN	12.828.800,00	-	0,00		0,00	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	9.184.300,00	-	0,00		0,00	
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	2.748.100.500,00	790.545.600,00	41,00	Sangat Rendah	28,77	Sangat Rendah
	Program Kepegawaian Daerah	2.748.100.500,00	790.545.600,00	41,00			
	Pengembangan Kompetensi ASN	2.748.100.500,00	790.545.600,00	41,00		31,72	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	507.309.100,00	20.565.900,00	35,00		4,05	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.903.798.400,00	543.678.800,00	30,00		28,56	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	214.261.500,00	185.790.900,00	90,00		86,71	
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	19.613.700,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	103.117.800,00	40.510.000,00	50,00		39,29	
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.500.000.000,00	138.655.300,00	43,75	Sangat Rendah	9,24	Sangat Rendah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.500.000.000,00	138.655.300,00	43,75		10,94	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	325.000.000,00	55.463.900,00	60,00		17,07	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	325.000.000,00	55.463.900,00	60,00		17,07	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	600.000.000,00	35.569.000,00	20,00		3,39	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	525.000.000,00	35.569.000,00	40,00		6,78	
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	75.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	175.000.000,00	35.424.000,00	80,00		20,24	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	175.000.000,00	35.424.000,00	80,00		20,24	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	400.000.000,00	12.198.400,00	15,00		3,05	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	400.000.000,00	12.198.400,00	15,00		3,05	
5.06	Penghubung				Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
5.07	Pengelolaan Perbatasan Daerah				Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.555.445.500,00	1.374.440.000,00	42,62	Sangat Rendah	20,97	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	6.555.445.500,00	1.374.440.000,00	42,62	Sangat Rendah	20,97	Sangat Rendah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.100.000.000,00	1.054.911.000,00	45,48		27,55	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.400.000.000,00	870.941.000,00	64,29		34,35	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	850.000.000,00	18.572.000,00	33,33		2,18	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	42.500.000,00	50,00		17,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Reviu Laporan Kinerja	700.000.000,00	88.570.000,00	50,00		12,65	
	Reviu Laporan Keuangan	200.000.000,00	93.840.000,00	66,67		46,92	
	Pengawasan Desa	500.000.000,00	78.200.000,00	50,00		15,64	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00		100,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	650.000.000,00	299.259.000,00	100,00		46,04	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	700.000.000,00	183.970.000,00	26,67		20,76	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000,00	3.600.000,00	20,00		1,44	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	450.000.000,00	180.370.000,00	33,33		40,08	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.455.445.500,00	319.529.000,00	39,77		10,33	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.300.000.000,00	136.994.000,00	41,67		9,50	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	800.000.000,00	112.004.000,00	50,00		14,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	500.000.000,00	24.990.000,00	33,33		5,00	
	Pendampingan dan Asistensi	1.155.445.500,00	182.535.000,00	37,88		11,17	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	55.445.500,00	8.545.000,00	100,00		15,41	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	250.000.000,00	4.760.000,00	9,09		1,90	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	650.000.000,00	165.410.000,00	33,33		25,45	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	200.000.000,00	3.820.000,00	9,09		1,91	
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	18.656.376.610,00	5.651.546.275,00	50,00	Sangat Rendah	30,29	Sangat Rendah
7.01	Kecamatan	18.656.376.610,00	5.651.546.275,00	50,00	Sangat Rendah	30,29	Sangat Rendah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	511.690.000,00	227.291.000,00	33,33		32,33	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00		50,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.290.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.290.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	481.000.000,00	226.091.000,00	50,00		47,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	481.000.000,00	226.091.000,00	50,00		47,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.998.800,00	7.200.000,00	25,00		6,78	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.998.800,00	7.200.000,00	25,00		6,78	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	53.098.800,00	7.200.000,00	50,00		13,56	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.900.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	9.000.000,00	-	0,00		0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.000.000,00	6.750.000,00	50,00		37,50	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000,00	6.750.000,00	50,00		37,50	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.000.000,00	6.750.000,00	50,00		37,50	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.981.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.981.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	6.981.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN RANCAKALONG						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	495.805.100,00	208.570.000,00	33,33		18,62	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.737.200,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.737.200,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	29.929.000,00	3.400.000,00	50,00		11,36	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.929.000,00	3.400.000,00	50,00		11,36	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	461.138.900,00	205.170.000,00	50,00		44,49	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	461.138.900,00	205.170.000,00	50,00		44,49	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.020.500,00	3.600.000,00	25,00		4,10	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49.020.500,00	3.600.000,00	25,00		4,10	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.873.600,00	3.600.000,00	50,00		8,21	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.146.900,00	-	0,00		0,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.554.800,00		50,00		20,25	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.554.800,00	1.530.000,00	50,00		20,25	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.554.800,00	1.530.000,00	50,00		20,25	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.200.000,00	6.600.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	13.200.000,00	6.600.000,00	50,00		50,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.200.000,00	6.600.000,00	50,00		50,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.034.500,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.034.500,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.720.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.414.500,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.900.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN TANJUNGPURA						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.480.000,00	7.870.000,00	25,00		21,42	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.370.000,00	7.870.000,00	50,00		42,84	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instransi Vertikal Terkait	18.370.000,00	7.870.000,00	50,00		42,84	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	492.110.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	472.110.000,00	-	0,00		0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.490.000,00	8.980.000,00	50,00		30,45	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.490.000,00	8.980.000,00	50,00		30,45	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.490.000,00	8.980.000,00	50,00		30,45	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.240.000,00	6.120.000,00	50,00		50,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.240.000,00	6.120.000,00	50,00		50,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.240.000,00	6.120.000,00	50,00		50,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.693.800,00	13.093.800,00	50,00		45,63	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.693.800,00	13.093.800,00	50,00		45,63	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.693.800,00	13.093.800,00	50,00		45,63	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.600.200,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.600.200,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.600.200,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN PAMULIHAN						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	465.841.400,00	205.850.000,00	33,33		30,02	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.342.000,00	1.020.000,00	50,00		43,55	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.342.000,00	1.020.000,00	50,00		43,55	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.004.400,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.004.400,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	440.495.000,00	204.830.000,00	50,00		46,50	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	440.495.000,00	204.830.000,00	50,00		46,50	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.873.300,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.079.500,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.079.500,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28.793.800,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	28.793.800,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.259.600,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.259.600,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.259.600,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.600.000,00	5.427.300,00	100,00		43,07	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.600.000,00	5.427.300,00	100,00		43,07	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.600.000,00	5.427.300,00	100,00		43,07	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.553.600,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.553.600,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	980.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.600.900,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.972.700,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN CISARUA						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	471.036.400,00	204.150.000,00	25,00		23,31	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.056.900,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.056.900,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	437.979.500,00	204.150.000,00	50,00		46,61	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	437.979.500,00	204.150.000,00	50,00		46,61	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.232.900,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.232.900,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	21.232.900,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.400.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.400.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.400.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.600.000,00	6.750.000,00	50,00		31,25	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000,00	6.750.000,00	50,00		31,25	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000,00	6.750.000,00	50,00		31,25	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.909.900,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daerah	13.909.900,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.589.900,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.320.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN BUAHDUA						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	474.727.100,00	223.764.300,00	50,00		29,79	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.210.000,00	3.070.300,00	50,00		30,07	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.210.000,00	3.070.300,00	50,00		30,07	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.083.100,00	2.550.000,00	50,00		9,42	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.083.100,00	2.550.000,00	50,00		9,42	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Masyarakat	437.434.000,00	218.144.000,00	50,00		49,87	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	437.434.000,00	218.144.000,00	50,00		49,87	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.696.000,00	6.240.900,00	16,67		10,28	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60.696.000,00	6.240.900,00	16,67		10,28	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	60.696.000,00	6.240.900,00	16,67		10,28	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.800.000,00	12.291.700,00	33,33		42,68	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.800.000,00	12.291.700,00	33,33		42,68	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.800.000,00	12.291.700,00	33,33		42,68	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.904.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daaerah	8.904.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.452.000,00	-	0,00		0,00	
	koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.452.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KECAMATAN JATINANGOR						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	489.412.200,00	166.319.400,00	38,00		28,08	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.000.000,00	3.150.000,00	50,00		35,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.000.000,00	3.150.000,00	50,00		35,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.231.800,00	3.836.000,00	14,00		14,09	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.231.800,00	3.836.000,00	14,00		14,09	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Masyarakat	453.180.400,00	159.333.400,00	50,00		35,16	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	453.180.400,00	159.333.400,00	50,00		35,16	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71.532.800,00	9.072.900,00	7,00		6,80	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	71.532.800,00	9.072.900,00	7,00		6,80	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	66.732.800,00	9.072.900,00	14,00		13,60	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.352.800,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.352.800,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.352.800,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.358.300,00		50,00		45,19	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.358.300,00		50,00		45,19	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.358.300,00	11.008.300,00	50,00		45,19	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.529.200,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daaerah	15.529.200,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.529.200,00	-	0,00		0,00	
	koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.000.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN SITURAJA						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	459.771.500,00	164.080.000,00	25,00		19,02	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.537.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.537.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	431.234.500,00	164.080.000,00	50,00		38,05	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	431.234.500,00	164.080.000,00	50,00		38,05	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.483.500,00	3.000.000,00	4,00		3,95	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.483.500,00	3.000.000,00	4,00		3,95	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.293.600,00	3.000.000,00	12,00		11,86	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.040.500,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.149.400,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.051.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.051.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.051.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.024.700,00		50,00		20,43	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.024.700,00		50,00		20,43	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.024.700,00	4.500.000,00	50,00		20,43	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.715.400,00	4.530.000,00	30,33		30,35	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daerah	13.715.400,00	4.530.000,00	30,33		30,35	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.412.500,00	3.000.000,00	47,00		46,78	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.457.400,00	1.530.000,00	44,00		44,25	
	koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.845.500,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN TANJUNGSARI						

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	564.655.900,00	274.579.900,00	50,00		29,35	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24.873.300,00	2.043.500,00	50,00		8,22	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.873.300,00	2.043.500,00	50,00		8,22	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	539.782.600,00	272.536.400,00	50,00		50,49	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	539.782.600,00	272.536.400,00	50,00		50,49	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.865.000,00	6.512.700,00	50,00		14,20	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	45.865.000,00	6.512.700,00	50,00		14,20	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	45.865.000,00	6.512.700,00	50,00		14,20	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.750.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.750.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	14.750.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.412.500,00	10.411.200,00	50,00		48,62	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.412.500,00	10.411.200,00	50,00		48,62	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.412.500,00	10.411.200,00	50,00		48,62	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.368.900,00	5.491.500,00	50,00		19,88	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.368.900,00	5.491.500,00	50,00		19,88	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.934.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.593.500,00	2.611.500,00	100,00		30,39	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.841.400,00	2.880.000,00	50,00		29,26	
	KECAMATAN JATINUNGGAL						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	520.772.300,00	212.886.000,00	16,67		15,08	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.628.300,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.628.300,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.564.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.564.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	470.580.000,00	212.886.000,00	50,00		45,24	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	470.580.000,00	212.886.000,00	50,00		45,24	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	73.200.900,00	10.265.900,00	25,00		7,50	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.200.900,00	10.265.900,00	25,00		7,50	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	68.396.300,00	10.265.900,00	50,00		15,01	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.804.600,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.700.500,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.700.500,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.700.500,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.892.000,00	9.180.000,00	50,00		43,94	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.892.000,00	9.180.000,00	50,00		43,94	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.892.000,00	9.180.000,00	50,00		43,94	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.399.300,00	2.950.000,00	50,00		31,39	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.399.300,00	2.950.000,00	50,00		31,39	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.399.300,00	2.950.000,00	50,00		31,39	
	KECAMATAN UJUNGJAYA						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	452.600.000,00		33,33		31,03	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.600.000,00	10.800.000,00	50,00		50,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.600.000,00	10.800.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	411.000.000,00		50,00		43,10	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	411.000.000,00	177.150.000,00	50,00		43,10	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	91.361.200,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	91.361.200,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	91.361.200,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.840.000,00	45.833.000,00	100,00		99,98	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.840.000,00	45.833.000,00	100,00		99,98	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.840.000,00	45.833.000,00	100,00		99,98	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.033.100,00	18.966.525,00	50,00		47,38	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.033.100,00	18.966.525,00	50,00		47,38	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.033.100,00	18.966.525,00	50,00		47,38	
	KECAMATAN JATIGEDE						

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	466.326.000,00		38,75		35,61	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	8.800.000,00	4.000.000,00	50,00		45,45	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.800.000,00	4.000.000,00	50,00		45,45	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	25.000.000,00	10.537.500,00	35,00		42,15	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	10.537.500,00	35,00		42,15	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	486.981.600,00	219.082.000,00	50,00		34,30	
	Pelaksanaan Urusan Kewenangan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	432.526.000,00	207.900.000,00	50,00		48,07	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54.455.600,00	11.182.000,00	50,00		20,53	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	54.455.600,00	11.182.000,00	20,00		20,53	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	54.455.600,00	11.182.000,00	20,00		20,53	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.301.200,00	-	20,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.301.200,00	-	20,00		0,00	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	8.301.200,00	-	20,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.700.000,00	8.250.000,00	50,00		46,61	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	17.700.000,00	8.250.000,00	50,00		46,61	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	17.700.000,00	8.250.000,00	50,00		46,61	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.940.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.940.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.940.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN CIMALAKA						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	470.293.200,00	212.150.000,00	31,82		31,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.215.000,00	6.000.000,00	45,45		45,40	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.215.000,00	6.000.000,00	45,45		45,40	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.980.600,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.980.600,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	433.097.600,00	206.150.000,00	50,00		47,60	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	433.097.600,00	206.150.000,00	50,00		47,60	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55.653.300,00	11.175.000,00	50,00		20,08	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	55.653.300,00	11.175.000,00	50,00		20,08	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	55.653.300,00	11.175.000,00	50,00		20,08	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.200.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.076.800,00	7.950.000,00	50,00		41,67	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.076.800,00	7.950.000,00	50,00		41,67	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.076.800,00	7.950.000,00	50,00		41,67	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.718.800,00		33,33		30,61	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.718.800,00	5.050.000,00	33,33		30,61	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000,00	5.050.000,00	100,00		91,82	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.600.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.618.800,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN CIBUGEL						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	438.141.600,00	178.200.000,00	25,00		21,31	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	418.141.600,00	178.200.000,00	50,00		42,62	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	418.141.600,00	178.200.000,00	50,00		42,62	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61.374.000,00	19.688.800,00	25,00		17,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	61.374.000,00	19.688.800,00	25,00		17,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	57.901.000,00	19.688.800,00	50,00		34,00	
	Fasilitas Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.473.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.280.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.280.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.280.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.241.600,00	9.081.600,00	50,00		44,87	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	20.241.600,00	9.081.600,00	50,00		44,87	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.241.600,00	9.081.600,00	50,00		44,87	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.272.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.272.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	462.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.810.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN CONGGEANG						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	498.689.100,00	248.800.000,00	33,33		35,73	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.800.000,00	4.800.000,00	50,00		54,55	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.800.000,00	4.800.000,00	50,00		54,55	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.365.200,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.365.200,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	463.523.900,00	244.000.000,00	50,00		52,64	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	463.523.900,00	244.000.000,00	50,00		52,64	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.571.000,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	42.571.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	38.565.800,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.005.200,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.488.800,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.488.800,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.488.800,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.400.000,00	4.200.000,00	50,00		29,17	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.400.000,00	4.200.000,00	50,00		29,17	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.400.000,00	4.200.000,00	50,00		29,17	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.665.200,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.665.200,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.665.200,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN GANEAS						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	664.666.600,00	295.007.800,00	53,33		49,26	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.300.000,00	7.650.000,00	50,00		50,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.300.000,00	7.650.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.000.000,00	18.651.000,00	50,00		51,81	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000,00	18.651.000,00	50,00		51,81	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.210.000,00	209.641.200,00	50,00		46,57	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.210.000,00	209.641.200,00	50,00		46,57	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.470.900,00	27.590.900,00	100,00		82,43	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.470.900,00	27.590.900,00	100,00		82,43	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	129.685.700,00	31.474.700,00	16,67		15,50	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.586.000,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	67.699.700,00	31.474.700,00	50,00		46,49	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	58.400.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	7.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.096.000,00	8.696.000,00	50,00		61,69	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.096.000,00	8.696.000,00	50,00		61,69	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.096.000,00	8.696.000,00	50,00		61,69	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.010.000,00	12.174.100,00	75,00		75,84	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.010.000,00	12.174.100,00	75,00		75,84	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.010.000,00	5.174.100,00	50,00		51,69	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00		100,00	
	KECAMATAN TANJUNGMEDAR						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	459.150.000,00	204.150.000,00	25,00		23,06	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.510.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.510.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	442.640.000,00	204.150.000,00	50,00		46,12	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	442.640.000,00	204.150.000,00	50,00		46,12	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.942.050,00	9.000.000,00	33,33		21,98	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.942.050,00	9.000.000,00	33,33		21,98	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.942.050,00	9.000.000,00	33,33		21,98	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	6.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.200.000,00	7.750.000,00	100,00		75,98	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.200.000,00	7.750.000,00	100,00		75,98	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.200.000,00	7.750.000,00	100,00		75,98	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.400.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.400.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	1.900.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.500.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN CISITU						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	484.560.000,00		50,00		31,65	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.520.000,00	4.800.000,00	50,00		41,67	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.520.000,00	4.800.000,00	50,00		41,67	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	23.000.000,00	1.500.000,00	50,00		6,52	
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.000.000,00	1.500.000,00	50,00		6,52	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.040.000,00	210.478.000,00	50,00		46,77	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.040.000,00	210.478.000,00	50,00		46,77	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	62.263.200,00	15.663.900,00	25,00		13,83	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	62.263.200,00	15.663.900,00	25,00		13,83	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	56.620.500,00	15.663.900,00	50,00		27,66	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.642.700,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.500.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.500.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	5.500.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.123.900,00	13.500.000,00	50,00		49,77	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.123.900,00	13.500.000,00	50,00		49,77	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.123.900,00	13.500.000,00	50,00		49,77	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.873.900,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.873.900,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.873.900,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN CIMANGGUNG						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	484.180.000,00	244.680.000,00	50,00		38,49	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.580.000,00	2.240.000,00	50,00		62,57	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.580.000,00	2.240.000,00	50,00		62,57	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.180.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.180.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	458.420.000,00	242.440.000,00	100,00		52,89	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	458.420.000,00	242.440.000,00	100,00		52,89	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.680.000,00	7.460.000,00	25,00		8,67	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	47.680.000,00	7.460.000,00	25,00		8,67	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.030.200,00	7.460.000,00	50,00		17,34	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.649.800,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.800.000,00	11.550.000,00	66,67		44,77	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.800.000,00	11.550.000,00	66,67		44,77	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.800.000,00	11.550.000,00	66,67		44,77	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.410.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daaerah	16.410.000,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.830.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.580.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN WADO						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	483.343.000,00	221.650.000,00	25,00		24,35	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28.175.500,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.175.500,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	455.167.500,00	221.650.000,00	50,00		48,70	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	455.167.500,00	221.650.000,00	50,00		48,70	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.412.800,00	-	0,00		0,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.412.800,00	-	0,00		0,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9.412.800,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.405.200,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.405.200,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.405.200,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00		50,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00		50,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.257.400,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.257.400,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.204.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.431.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.622.400,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN PASEH						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	490.000.000,00	204.719.900,00	25,00		21,78	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	470.000.000,00	204.719.900,00	50,00		43,56	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	470.000.000,00	204.719.900,00	50,00		43,56	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69.784.000,00	6.330.600,00	50,00		9,07	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	69.784.000,00	6.330.600,00	50,00		9,07	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	69.784.000,00	6.330.600,00	50,00		9,07	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.529.000,00	11.187.200,00	60,00		63,82	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.529.000,00	11.187.200,00	60,00		63,82	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.529.000,00	11.187.200,00	60,00		63,82	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.800.000,00	5.400.000,00	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.800.000,00	5.400.000,00	50,00		50,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.800.000,00	5.400.000,00	50,00		50,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.250.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.750.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN TOMO						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	470.040.000,00	215.874.000,00	50,00		44,43	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000,00	8.560.000,00	50,00		42,80	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	8.560.000,00	50,00		42,80	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	450.040.000,00	207.314.000,00	50,00		46,07	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.040.000,00	207.314.000,00	50,00		46,07	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.820.000,00	2.540.000,00	50,00		11,64	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.820.000,00	2.540.000,00	50,00		11,64	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	21.820.000,00	2.540.000,00	50,00		11,64	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.910.000,00		0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.910.000,00		0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.910.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.400.000,00	7.250.000,00	50,00		41,67	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.400.000,00	7.250.000,00	50,00		41,67	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.400.000,00	7.250.000,00	50,00		41,67	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.810.000,00		0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.810.000,00		0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi dan Pendampingan Desa di wilayahnya	4.810.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN SURIAN						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	594.993.300,00	310.406.000,00	27,25		27,25	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	25.403.300,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.403.300,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	569.590.000,00	310.406.000,00	54,50		54,50	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	569.590.000,00	310.406.000,00	54,50		54,50	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.060.000,00	3.300.000,00	2,01		2,01	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	65.060.000,00	3.300.000,00	2,01		2,01	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	54.760.000,00	3.300.000,00	6,03		6,03	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.650.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.650.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.590.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.590.000,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.590.000,00	-	0,00		0,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.020.000,00	5.400.000,00	21,58		21,58	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	25.020.000,00	5.400.000,00	21,58		21,58	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.020.000,00	5.400.000,00	21,58		21,58	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.760.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.760.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.410.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.450.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.900.000,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	109.462.700,00	7.500.000,00	44,00		24,04	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.600.000,00	7.500.000,00	88,00		48,08	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.600.000,00	7.500.000,00	88,00		48,08	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	93.862.700,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.862.700,00	-	0,00		0,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.582.002.870,00	662.350.550,00	31,04		19,90	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.920.346.900,00	654.661.050,00	49,33		32,76	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63.169.000,00	37.476.000,00	100,00		59,33	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.229.184.460,00	52.400.000,00	5,00		4,26	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.627.993.440,00	564.785.050,00	43,00		34,69	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	661.655.970,00	7.689.500,00	12,75		7,04	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	562.065.830,00	2.942.000,00	10,00		0,52	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	70.306.240,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17.190.000,00	4.747.500,00	41,00		27,62	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.093.900,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.665.990,00	9.208.400,00	89,00		32,12	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.665.990,00	9.208.400,00	89,00		32,12	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.665.990,00	9.208.400,00	89,00		32,12	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.200.200,00	9.900.000,00	48,00		28,95	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.200.200,00	9.900.000,00	48,00		28,95	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.200.200,00	9.900.000,00	48,00		28,95	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.107.200,00	6.750.000,00	17,67		8,98	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daaerah	97.107.200,00	6.750.000,00	17,67		8,98	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.056.600,00	6.750.000,00	53,00		26,94	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.400.000,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	45.650.600,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN SUMEDANG UTARA						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	507.331.700,00		35,00		36,47	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.744.100,00	7.500.000,00	39,00		40,01	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.744.100,00	7.500.000,00	39,00		40,01	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	45.573.000,00	9.987.000,00	21,00		21,91	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.573.000,00	9.987.000,00	21,00		21,91	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	443.014.600,00	210.341.900,00	45,00		47,48	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	443.014.600,00	210.341.900,00	45,00		47,48	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	62.269.700,00	21.237.700,00	14,67		15,62	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	62.269.700,00	21.237.700,00	14,67		15,62	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	45.331.400,00	21.237.700,00	44,00		46,85	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.350.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.588.300,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.914.400,00	10.818.200,00	59,00		60,39	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.914.400,00	10.818.200,00	59,00		60,39	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.914.400,00	10.818.200,00	59,00		60,39	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.947.900,00	10.650.000,00	47,00		48,52	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.947.900,00	10.650.000,00	47,00		48,52	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.947.900,00	10.650.000,00	47,00		48,52	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.398.300,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daaerah	32.398.300,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.838.600,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.013.200,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.546.500,00	-	0,00		0,00	
	KECAMATAN SUKASARI						

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	486.399.500,00	208.751.600,00	44,44		26,64	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.620.500,00	3.300.000,00	66,67		34,30	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.620.500,00	3.300.000,00	66,67		34,30	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.462.600,00	-	0,00		0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.462.600,00	-	0,00		0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.316.400,00	205.451.600,00	66,67		45,62	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.316.400,00	205.451.600,00	66,67		45,62	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88.127.400,00	9.700.000,00	16,67		6,10	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	88.127.400,00	9.700.000,00	16,67		6,10	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	79.492.000,00	9.700.000,00	33,33		12,20	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.635.400,00	-	0,00		0,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.338.700,00	-	0,00		0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.338.700,00	-	0,00		0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.338.700,00	-	0,00		0,00	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.451.000,00	10.094.000,00	33,33		43,04	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.451.000,00	10.094.000,00	33,33		43,04	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.451.000,00	10.094.000,00	33,33		43,04	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.203.700,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Daaerah	15.203.700,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.227.000,00	-	0,00		0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.946.700,00	-	0,00		0,00	
	koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.030.000,00	-	0,00		0,00	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.499.188.400,00	1.627.765.500,00	53,00	Rendah	21,71	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.499.188.400,00	1.627.765.500,00	53,00	Rendah	21,71	Sangat Rendah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.000.000.000,00	87.950.400,00				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.000.000.000,00	87.950.400,00	37,50		5,50	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000,00	-	20,00		0,00	
	Pembentukan Paskibraka	800.000.000,00	87.950.400,00	55,00		10,99	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	2.093.319.000,00	32.761.200,00	37,50		21,84	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.093.319.000,00	32.761.200,00	37,50		21,84	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.018.319.000,00	-	20,00		0,00	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75.000.000,00	32.761.200,00	55,00		43,68	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	225.000.000,00	70.290.100,00	46,25		35,31	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	225.000.000,00	70.290.100,00	46,25		35,31	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.000.000,00	10.137.000,00	55,00		40,55	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000,00	60.153.100,00	37,50		30,08	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	250.000.000,00	-	32,92		14,25	

	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	250.000.000,00	-	20,00		0,00	
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000,00	-	20,00		0,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000,00	-	20,00		0,00	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik	3.930.869.400,00	1.436.763.800,00	45,83		28,49	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.930.869.400,00	1.436.763.800,00	45,83		36,55	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.321.980.500,00	1.048.711.700,00	47,50		45,16	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160.797.500,00	9.884.900,00	37,50		6,15	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.448.091.400,00	378.167.200,00	52,50		26,11	
	TOTAL	3.884.590.572.346,00	566.928.481.918,00	41,74	Sangat Rendah	14,59	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan Evaluasi RKPD pada Triwulan II Tahun 2025 pada tabel diatas, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Triwulan II sebesar **41,74** persen, sehingga sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja pada capaian triwulan II yaitu masuk pada kategori **sangat rendah**.
2. Rata-rata tingkat realisasi penyerapan anggaran kegiatan pada RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Triwulan II adalah **14,59** persen. Nilai tersebut masuk kriteria penilaian **sangat rendah**.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat diidentifikasi menjadi beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target pembangunan, serta sebagai dasar identifikasi Isu Strategis yang akan dijadikan dasar penyusunan perencanaan serta mengarahkan pada kebijakan dan prioritas pembangunan. Berikut ini adalah penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumedang pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.13 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
1	Upaya meningkatkan akses pendidikan	Pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas guru, dan program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
		Penerapan kurikulum merdeka melalui tahapan dan proses yang terencana dan sistematis.	
2	Upaya optimalisasi kualitas dan implementasi sistem pelayanan kesehatan	Penginputan Data kedalam SI PTM belum Maksimal karena kurangnya tenaga Operator di Puskesmas	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan gerakan hidup sehat
		Aksi bergizi belum semua kegiatan bisa di laksanakan	
3	Upaya Penanganan konflik pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi	Belum adanya kejelasan skema distribusi prioritas pemanfaatan air	Peningkatan pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi
		Belum optimalnya sinergi antara SKPD, PDAM dan kelompok tani dalam pengelolaan air	

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
	Upaya Peningkatan Bangunan gedung pemerintahan dan publik yang belum memadai	Belum semua gedung pemerintah dan publik yang ramah difabel	Peningkatan Bangunan gedung pemerintahan dan publik yang belum memadai dan Kondisi Baik
		Masih banyaknya gedung pemerintah yang digunakan melebihi kapasitas normal	
4	Upaya Penguatan Penegakan Regulasi Daerah Dalam Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya sosialisasi terkait Perda dan Perkada sehingga pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih rendah	Penguatan Penegakan Regulasi Daerah Dalam Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Sedikitnya pegawai yang memiliki kualifikasi Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
5	Upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Belum diperbaharuinya peta kebencanaan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Belum tersedianya lokasi khusus untuk kantor BPBD	
6	Upaya Peningkatan Efektivitas pelayanan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penanganan PPKS Tingkat Desa dan Kelurahan belum optimal	Peningkatan Efektivitas pelayanan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Pemutahiran DTKS belum optimal	
		Sarana dan Prasarana Pendukung Kedaruratan Bencana Terbatas	
		Personil TAGANA Kab. Sumedang relative Sedikit	
		Kurang tertibnya atau tersusunnya Data-Data Calon Penerima Bantuan Sosial	
7	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Ketenagakerjaan yang memadai	Belum optimalnya pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, seperti digital marketing, menjahit, dan budidaya ternak sehingga belum semua bidang mendapatkan penyerapan kerja yang optimal	Peningkatan sarana dan prasarana Ketenagakerjaan yang memadai
		Jumlah pencari kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja	
		SDM tenaga kerja yang relatif rendah baik tingkat pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki,	

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
		<p>sehingga berdampak pada ketidaksesuaian dengan kualifikasi pekerjaan</p> <p>Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat</p> <p>Penyebaran tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak merata</p>	
8	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup yang memadai	<p>Belum tersedianya lahan untuk penambahan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di perkotaan sedangkan timbulan sampah semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga daya tampung TPS melebihi kapasitas</p> <p>Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah, kondisi ini dicirikan dengan masih banyaknya titik lokasi pembuangan sampah liar</p> <p>Belum tersedianya data tentang pencemaran dan pelanggaran lingkungan untuk publik</p> <p>Belum tersedianya tenaga pengawas lingkungan di Kabupaten Sumedang</p>	Peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup yang memadai
9	Upaya Pemerataan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<p>Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>Tingkat Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan masih rendah</p> <p>Belum optimalnya pelayanan karena terbagi dengan pelayanan MPP, MPP Mini, Online dan lapangan</p>	Peningkatan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
10	Upaya Peningkatan Kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan	Masih adanya Kepala Desa yang belum faham arti Desa Mandiri, padahal bila diisi data IDM secara akurat sudah masuk ke Strata Desa mandiri	Peningkatan Kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
	teknologi tepat guna dan BUMDes menjadi sumber utama pendapatan desa	<p>Potensi sumber daya alam dan manusia belum termanfaatkan dengan baik</p> <p>Pengembangan BUMdes sebagai motor ekonomi desa belum optimal</p> <p>Belum optimalnya pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa serta pengembangan desa.</p>	teknologi tepat guna dan BUMDes menjadi sumber utama pendapatan desa
11	Upaya peningkatan pengendalian penduduk melalui KB dan optimalisasi kemandirian keluarga peserta KB	Masih rendahnya kepesertaan KB pria	Peningkatan pengendalian penduduk melalui KB dan optimalisasi kemandirian keluarga peserta KB
		Masih tingginya angka <i>Unmeet Need</i> (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	
	Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan	Data gender dan anak belum akurat	Peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan
		Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
12	Upaya Peningkatan Kenyamanan, keselamatan dan ketertiban pengguna jalan	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Jalan yang Terpasang di Jaringan Jalan Kabupaten Masih Kurang	Peningkatan Kenyamanan, keselamatan dan ketertiban pengguna jalan
		Umur Kendaraan Angkutan Umum Sudah Tua Harus Dilakukan Peremajaan Kembali Sehingga Semakin Berkurang Dikarenakan Kepemilikan Secara Perorangan	
		Kurangnya Sarana dan Prasarana Parkir di Tempat Pelayanan Parkir Resmi	
		Tempat Parkir yang Dikelola oleh Parkir Liar Belum Tertangani dengan Baik	
13	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai	Informasi terkait dengan program-program pemerintahan daerah belum sepenuhnya tersampaikan pada masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
		Belum seluruhnya pelayanan kepada masyarakat optimal sehingga pelayanan yang bersifat konvensional masih lebih banyak digunakan	
14	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memadai	<p>Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten mengakibatkan proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi menjadi kurang optimal, sehingga masalah dalam koperasi tidak terdeteksi atau diselesaikan dengan baik</p> <p>Tidak semua koperasi memiliki standar penilaian kesehatan keuangan dan operasional yang seragam, sehingga hasil penilaian dapat bervariasi</p> <p>Rendahnya Tingkat Literasi Digital seperti Pelaku UMKM kurang memahami penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, penjualan, pengelolaan usaha dan kurangnya pelatihan tentang <i>e-commerce</i> dan penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran</p> <p>Masih sulitnya pemasaran produk UMKM di Kabupaten Sumedang</p>	Peningkatan sarana dan prasarana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memadai
15	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Penanaman Modal yang memadai	<p>Belum adanya diversifikasi sumber investasi dari sektor lain selain konstruksi</p> <p>Belum optimalnya promosi potensi investasi</p> <p>Belum adanya peta potensi di Kabupaten Sumedang</p>	Peningkatan sarana dan prasarana Penanaman Modal yang memadai
16	Upaya peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	<p>Kurangnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi dan SDM Perpustakaan binaan</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana Layanan Perpustakaan Rujukan khususnya koleksi buku</p>	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
		sesuai keminatan masyarakat	
		Keterbatasan Sumber daya dalam melaksanakan dan mensosialisasikan budaya baca pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
17	Upaya peningkatan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Pemerataan arsiparis belum optimal	Peningkatan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
		Masih rendahnya pemahaman pengelolaan arsip dinamis di seluruh Perangkat Daerah	
18	Upaya peningkatan produktifitas perikanan	Budidaya ikan masih dalam tahap pengembangan	Peningkatan produktifitas perikanan
		Masih rendahnya inovasi dalam pengolahan ikan sehingga harga jual ikan rendah	
19	Upaya peningkatan nilai tukar petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penambahan Jumlah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.	Peningkatan nilai tukar petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Penguatan Kelembagaan Petani untuk memperkuat posisi tawar petani.	
		Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman	
20	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Inpektorat yang memadai	Masih banyaknya kepala Perangkat Daerah yang belum memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga implementasinya hanya bersifat administratif	Peningkatan sarana dan prasarana Inpektorat yang memadai
		Belum optimalnya strategi pengawasan berbasis risiko untuk memprioritaskan pengawasan pada sektor-sektor rawan penyimpangan	
		Masih banyak proses audit yang dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan dan potensi kesalahan	
21	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Perencanaan yang memadai	Belum optimalnya pengintegrasian data dari berbagai sektor melalui Satu Data Indonesia	Peningkatan sarana dan prasarana Perencanaan yang memadai

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
		<p>Belum adanya pengintegrasian antara perencanaan dengan GIS (<i>Geographic Information System</i>) untuk pemetaan wilayah prioritas Pembangunan</p> <p>Belum optimalnya sistem untuk mempercepat proses pelaporan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sehingga pengevaluasian masih dilakukan secara manual.</p>	
22	Upaya Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam pelayanan kepegawaian	Sistem operasi yang tidak/belum optimal dalam pelayanan kepegawaian dapat menyebabkan beberapa masalah, oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan integrasi antara berbagai sistem informasi, meningkatkan keamanan data, dan meningkatkan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi di bidang pelayanan kepegawaian	Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam pelayanan kepegawaian
23	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Keuangan yang memadai	<p>Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran, pengajuan pembayaran dan kualitas pelaporan keuangan OPD</p> <p>PAD masih rendah karena belum ada diversifikasi sumber penerimaan yang optimal</p> <p>Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah sehingga keakuratan penetapan pajak daerah belum bisa optimal</p>	Peningkatan sarana dan prasarana Keuangan yang memadai
24	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah yang memadai	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia terutama yang memiliki kompetensi khusus dalam manajemen pemerintahan	Peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah yang memadai

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
		Belum optimalnya peran Sekretariat Daerah sebagai pengendali koordinasi kebijakan daerah	
25	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD yang memadai	Masih rendahnya SDM ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi teknis di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan	Peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD yang memadai
		Forum formal seperti Banggar dan Bamus belum selalu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun sinergi	
26	Upaya peningkatan cipta kondisi kondusif	Penanganan berita hoaks masih lemah karena keterbatasan pengawasan dan literasi digital Masyarakat	Peningkatan cipta kondisi kondusif
		Masih adanya potensi konflik dan unjuk rasa, masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	
27	Upaya peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan yang memadai	Banyak layanan yang berbasis digital, masih belum terintegrasi dan <i>user-friendly</i>	Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan yang memadai
		Informasi layanan belum disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan inklusif, sehingga masih sulit difahami oleh masyarakat	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dirumuskan dengan menggunakan dirumuskan dengan cara : 1) melakukan analisis data makro daerah; 2) melakukan evaluasi capaian RKPD maupun RPD; 3) melakukan penyaringan dan penentuan prioritas dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang kritis; 4) melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; dan 5) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, sehingga dapat ditetapkan 4 (empat) isu strategis sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

- a. Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah;
- b. Prevelensi stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting;
- c. Peningkatan pelayanan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
- d. Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat;
- e. Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- f. Pelayanan pendidikan di setiap wilayah belum optimal;
- g. Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya;
- h. Masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat
- i. Daya saing pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal;
- j. Masih terdapatnya mismatch dan miseducation antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta desakan transformasi ekonomi:
- k. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
- l. Masih rendahnya literasi digital masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi

- a. Nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang masih rendah;
- b. Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi dan cuaca ekstrem;
- c. Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi UMKM;
- d. Belum optimalnya penguatan destinasi, promosi, industri dan kelembagaan pariwisata.
- e. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri;
- f. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sektor perdagangan;
- g. Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat;
- h. Belum optimalnya peningkatan nilai investasi Daerah.

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

- a. Belum meratanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah;

- b. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim;
- c. Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar (Air bersih dan Sanitasi layak);
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik;
- f. Belum optimalnya Penataan Ruang;
- g. Masih rendahnya intensitas pemeliharaan infrastruktur (Jalan, jembatan, irigasi dll).

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Belum Optimalnya dampak penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
- b. Belum optimalnya penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah;
- c. Kinerja aparatur masih kurang efektif dan efisien;
- d. Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN belum merata;
- e. Belum optimalnya Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta Ekosistem Inovasi di Kabupaten Sumedang;
- f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi PAD dalam peningkatan Pendapatan Daerah;
- g. Masih rendahnya literasi digital aparatur.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan ekonomi daerah berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan ditetapkan 3 (tiga) fokus pembangunan pada Tahun 2025 yaitu (1) Sumber Daya Manusia Berkualitas, (2) Infrastruktur Berkualitas, (3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mengusung tema **“Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa untuk mendukung kemandirian masyarakat Jawa Barat diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal mendapatkan pelayanan dan belum memiliki nilai strategis tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Jawa Barat. Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur dan jasa; pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Kabupaten Sumedang pada 2025 merumuskan Tema pembangunan **“Ekonomi Daerah yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan”** sebagai cerminan komitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, merata, dan ramah lingkungan.

Ekonomi yang tangguh mengacu pada ketahanan terhadap berbagai tantangan eksternal, seperti perubahan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan bencana alam. Hal ini dapat dicapai dengan diversifikasi ekonomi,

memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya tahan tinggi, dan menciptakan jaringan kelembagaan yang kuat untuk menghadapi risiko.

Ekonomi yang inklusif berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang rentan dan terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Ini melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, perempuan, dan kelompok minoritas untuk ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi.

Ekonomi yang berkelanjutan berfokus pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pelestarian lingkungan.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, Kabupaten Sumedang berupaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang, yang tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, tetapi juga inklusif bagi seluruh masyarakat, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Diharapkan, setiap langkah pembangunan ekonomi yang diambil akan mengarah pada kesejahteraan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, saat ini maupun di masa depan.

Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah untuk memenuhi target-target pembangunan yang tertuang pada RPD. Berdasarkan tema pembangunan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumedang di tahun 2025 adalah:

1. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan memperkuat sektor-sektor yang sudah ada. Seiring dengan meningkatnya aksesibilitas seperti jalan tol Cisumdawu dan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, serta berkembangnya wilayah metropolitan Bandung Raya dan Cirebon Raya yang mengapit Kabupaten Sumedang, terdapat potensi kunjungan wisata ke Kabupaten Sumedang. Sektor pariwisata, UMKM baik ekonomi kreatif maupun penyedia makan minum, dan penyediaan perumahan atau real estate menjadi sektor potensial untuk dikembangkan,

selain penguatan sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi melalui program pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke modal usaha. Pemberdayaan ekonomi ini termasuk masyarakat pedesaan, perempuan, dan kelompok disabilitas, sehingga akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas pembangunan.
3. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transportasi yang efisien, energi terbarukan, dan teknologi informasi menjadi infrastruktur penting dalam membangun ekonomi tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ke wilayah pertumbuhan ekonomi baru seperti kawasan wisata Jatigede dan kawasan perkotaan Jatinangor, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas dengan pasar yang lebih luas.
4. Menerapkan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pelestarian lingkungan, pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi Tampomas, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan yang menjadi hajat hidup sebagian besar masyarakat di Sumedang. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak lingkungan.
5. Mendorong inovasi teknologi dan riset dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, perdagangan, dan layanan pemerintah. Inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan menghasilkan layanan yang lebih berkualitas dan mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Mendorong kerjasama antar pihak dalam pengembangan kebijakan dan implementasi program-program pembangunan ekonomi. Kolaborasi ini akan memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sumedang menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia dan sosial-ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan yang mengembirakan, mencerminkan kualitas hidup dan akses layanan dasar yang semakin

membaik. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai membuahkan hasil nyata. Distribusi pendapatan juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan tingkat ketimpangan, sehingga kesenjangan sosial dapat diredam secara lebih efektif. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, terutama karena kontraksi pada sektor industri dan konstruksi yang masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor-sektor lainnya. Namun, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan bahwa secara umum pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terus membaik.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Variabel	Satuan	2024			2025	
		Target	Realisasi	Ketercapaian	Target	Perubahan
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,11	74,57	Tercapai. Lebih tinggi dari 2023 (74.02)	74,48	75,06
Tingkat Kemiskinan	Persen	9,50	9,10	Tercapai. Lebih rendah dari 2023 (9,36%)	9,09-8,23	9,09-8,23
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,00	6,16	Tercapai. Lebih rendah dari 2023 (6,94%)	6,70-6,15	6,68 - 6,13
Gini Ratio	Poin	0,36	0,337	Tercapai, lebih rendah dari 2023 (0,366)	0,354-0,341	0,360 - 0,335
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	4,05	Tidak tercapai. Sektor industri dan konstruksi berkontraksi	4,79-5,20	4,79 - 5,20
PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	36,20	39,7	Tercapai. Lebih tinggi dari 2023 (Rp 36,77 juta)	38,18-40,24	39,91 - 40,78

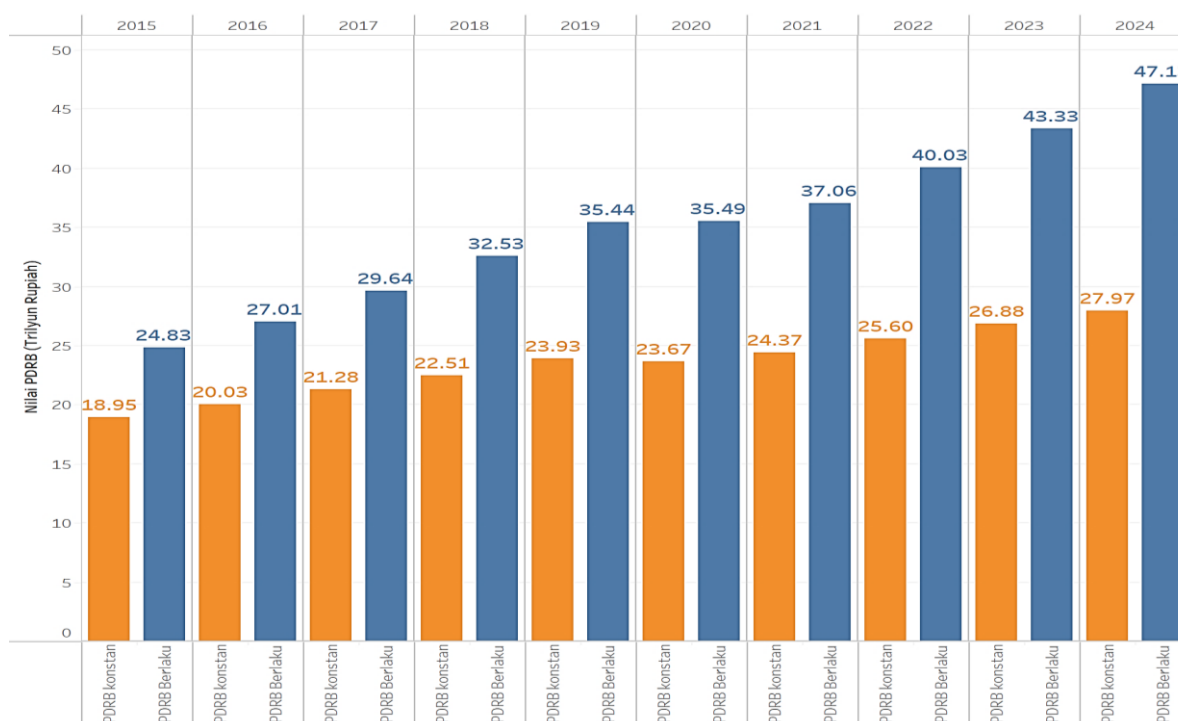
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025

Melangkah ke tahun 2025, Sumedang menargetkan kesinambungan peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan fokus yang kuat pada pengurangan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Pemerintah daerah tetap waspada terhadap dinamika ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian sektor industri dan konstruksi. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi

kunci untuk memastikan pertumbuhan yang lebih stabil dan peningkatan kesejahteraan yang merata. Peningkatan signifikan pada PDRB per kapita juga menjadi indikator positif bahwa hasil pembangunan ekonomi akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

3.2. Kinerja Ekonomi Daerah

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi indikator utama untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut dalam periode tertentu. PDRB memberikan gambaran tentang ukuran dan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, serta bagaimana sektor-sektor ekonomi berkontribusi terhadap kemajuan daerah.



Grafik 3.1 Tren PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Grafik ini menggambarkan PDRB Konstan dan PDRB Berlaku Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 hingga 2024, yang menunjukkan perubahan dalam nilai ekonomi berdasarkan harga konstan (d disesuaikan dengan inflasi) dan harga berlaku (tanpa disesuaikan dengan inflasi). Pada PDRB Konstan, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, Sumedang mengalami peningkatan dari 18,95 triliun Rupiah pada tahun 2015 menjadi 47,13 triliun Rupiah pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan, mencerminkan perbaikan yang stabil dalam perekonomian kabupaten ini, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, PDRB Berlaku (dengan harga nominal atau tidak disesuaikan dengan inflasi) juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015, PDRB Berlaku tercatat sebesar 24,83 triliun Rupiah, dan pada tahun 2024 mencapai 27,97 triliun Rupiah. Meskipun ada peningkatan dalam nilai nominal PDRB, laju pertumbuhannya tidak secepat PDRB Konstan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumedang dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 PDRB Tahun 2024 menurut Pengeluaran

Komponen Pengeluaran Tahun 2024	ADHB (Milyar Rp)	Share (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31,817	67.51
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,289	21.83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,531	7.49
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	759	1.61
Net Ekspor Barang dan Jasa	569	1.21
Perubahan Inventori	163	0.35
Produk Domestik Regional Bruto	47,128	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025

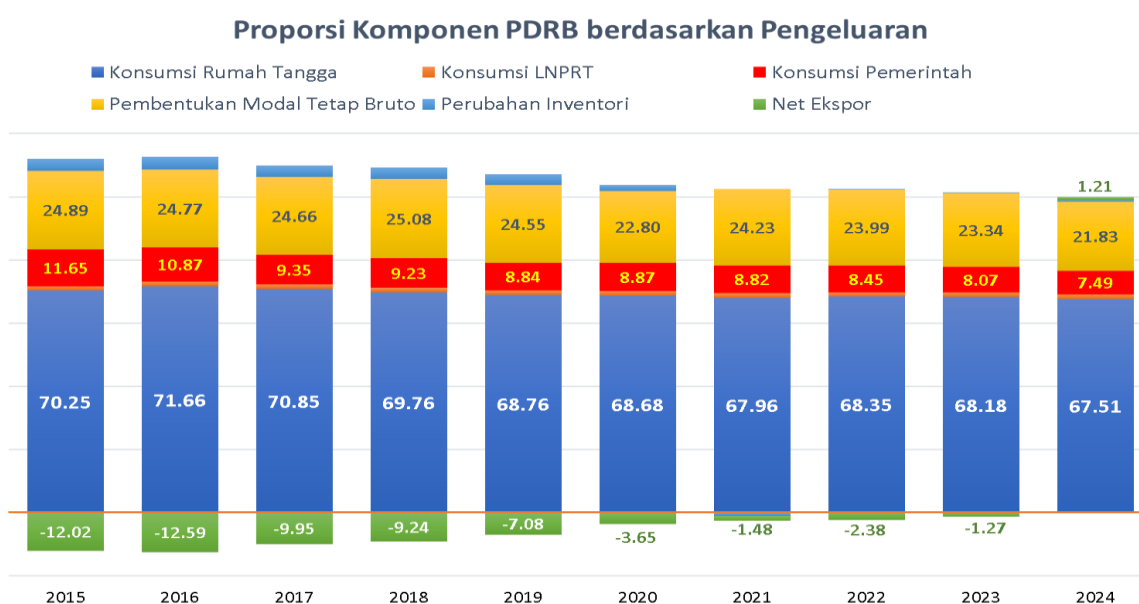
Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 mencerminkan struktur ekonomi daerah ini yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Secara keseluruhan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang tercatat sebesar 47,128 triliun Rupiah, dengan dua komponen pengeluaran utama yang memberikan kontribusi besar terhadap total PDRB.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen utama dalam perekonomian Sumedang, dengan kontribusi mencapai 67,51% dari total PDRB. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama aktivitas ekonomi di Sumedang. Konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran, seperti belanja barang dan jasa, yang mendominasi permintaan agregat. Tingginya kontribusi sektor ini juga mencerminkan tingkat konsumsi yang tinggi di kalangan penduduk Sumedang, yang merupakan indikasi positif terhadap daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dalam barang modal, yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas produksi, mencatatkan kontribusi sebesar 21,83% terhadap PDRB Sumedang. PMTB ini

mencakup investasi dalam sektor-sektor produktif seperti industri, infrastruktur, dan pembangunan fisik lainnya. Walaupun kontribusinya lebih rendah dibandingkan konsumsi rumah tangga, angka ini menunjukkan bahwa Sumedang juga mengalami investasi yang cukup besar, yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi yang baik akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung transformasi ekonomi daerah.

Komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Sumedang menunjukkan perekonomian yang cukup bergantung pada konsumsi domestik, namun juga menunjukkan adanya investasi yang semakin tumbuh, yang dapat memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi daerah. Perpaduan antara konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Sumedang yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.



Grafik 3.2 Proporsi Komponen PDRB Tahun 2015-2024 berdasarkan Pengeluaran

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

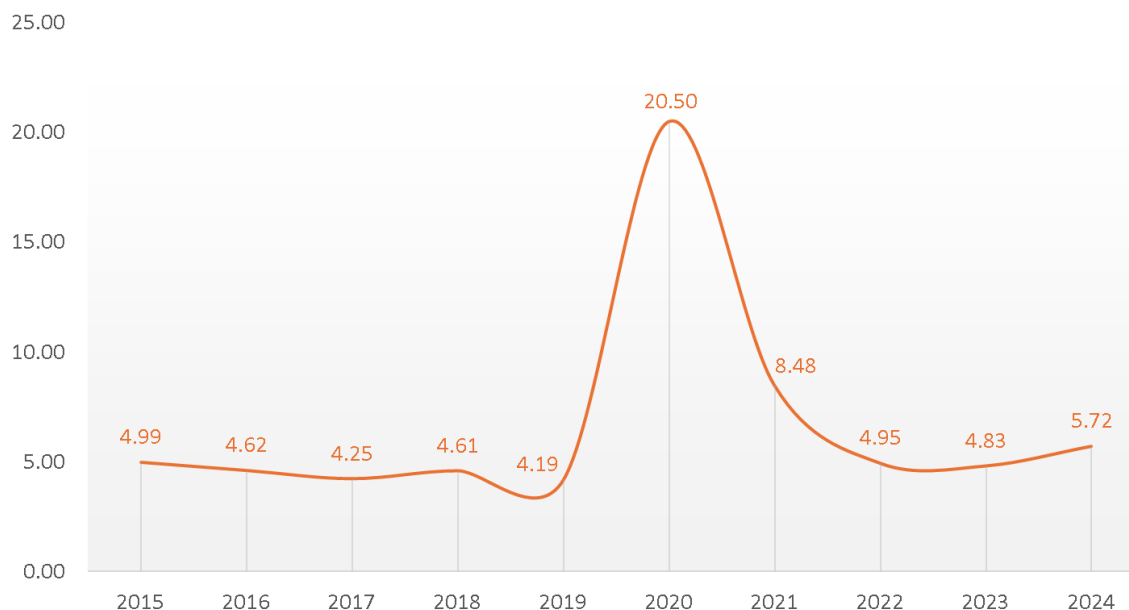
Grafik ini menunjukkan komposisi komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang berdasarkan pengeluaran dari tahun 2015 hingga 2024. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama perekonomian Sumedang, dengan kontribusi yang sangat besar, mencapai sekitar 67% hingga 71% dari total PDRB. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, yang menjadi indikator penting dalam perekonomian daerah ini. Stabilitas dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga menggambarkan bahwa daya beli masyarakat berperan besar dalam menjaga laju ekonomi Sumedang.

Di sisi lain, sektor pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi dalam aset tetap seperti bangunan dan mesin, memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yakni sekitar 21% hingga 25%. Peningkatan investasi ini menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur dan kapasitas produksi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Sumedang. Meskipun demikian, konsumsi pemerintah, yang mencakup belanja pemerintah daerah, cenderung stabil namun lebih kecil dibandingkan dengan dua sektor utama ini, dengan kontribusi sekitar 8% hingga 9%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan dan sosial, proporsinya terhadap total PDRB relatif kecil.

Sementara itu, net ekspor menunjukkan tren yang menarik, di mana pada awal periode nilai net ekspor berada di posisi negatif dengan angka cukup besar, menandakan bahwa impor lebih besar daripada ekspor. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai net ekspor terus membaik dan bergerak mendekati titik nol, bahkan pada periode 2024 menunjukkan nilai positif sebesar 1,21. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dari defisit perdagangan menuju surplus kecil, yang berarti ekspor mulai melebihi impor.

Namun, perlu diperhatikan bahwa surplus net ekspor ini bisa jadi tidak semata-mata disebabkan oleh peningkatan ekspor, melainkan juga karena kontraksi pada sektor industri pengolahan. Penurunan aktivitas di sektor ini kemungkinan mengurangi kebutuhan akan bahan baku impor dari luar daerah, sehingga impor menurun drastis. Dengan demikian, positifnya net ekspor tersebut bisa saja mencerminkan penurunan impor akibat melemahnya sektor industri pengolahan, bukan hanya peningkatan daya saing produk ekspor. Kondisi ini memberikan gambaran yang lebih kompleks, di mana perbaikan net ekspor sekaligus menjadi sinyal perlambatan produksi di lokal Sumedang.

Tren ICOR Kab. Sumedang 2015-2023



Grafik 3.3 Tren ICOR Tahun 2015-2024 Kabupaten Sumedang
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Grafik yang ditampilkan menggambarkan tren ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 hingga 2024. ICOR adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam meningkatkan output ekonomi. Semakin rendah angka ICOR, semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada periode 2015 hingga 2019, ICOR Sumedang cenderung stabil dengan angka yang relatif rendah, berkisar antara 4,19 hingga 4,99, yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang cukup baik. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan tajam pada nilai ICOR yang mencapai 20,50, yang mungkin disebabkan oleh dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Lonjakan ini menggambarkan penurunan efisiensi investasi yang drastis, di mana investasi yang dilakukan pada tahun tersebut tidak menghasilkan output yang sebanding dengan ekspektasi, kemungkinan disebabkan oleh gangguan pada sektor-sektor ekonomi akibat pandemi.

Setelah 2020, grafik menunjukkan penurunan yang signifikan dalam nilai ICOR, dengan angka yang kembali menurun secara bertahap. Pada tahun 2021, ICOR menurun menjadi 8,48, dan terus menurun hingga 2024, dengan angka terakhir sebesar 5,72. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam efisiensi investasi yang dilakukan, namun masih belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal seperti sebelum pandemi.

Tren ICOR Sumedang menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam efisiensi investasi setelah lonjakan besar pada tahun 2020, masih ada

tantangan dalam meningkatkan kualitas dan dampak dari investasi terhadap perekonomian. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas investasi dan optimasi sektor-sektor produktif.

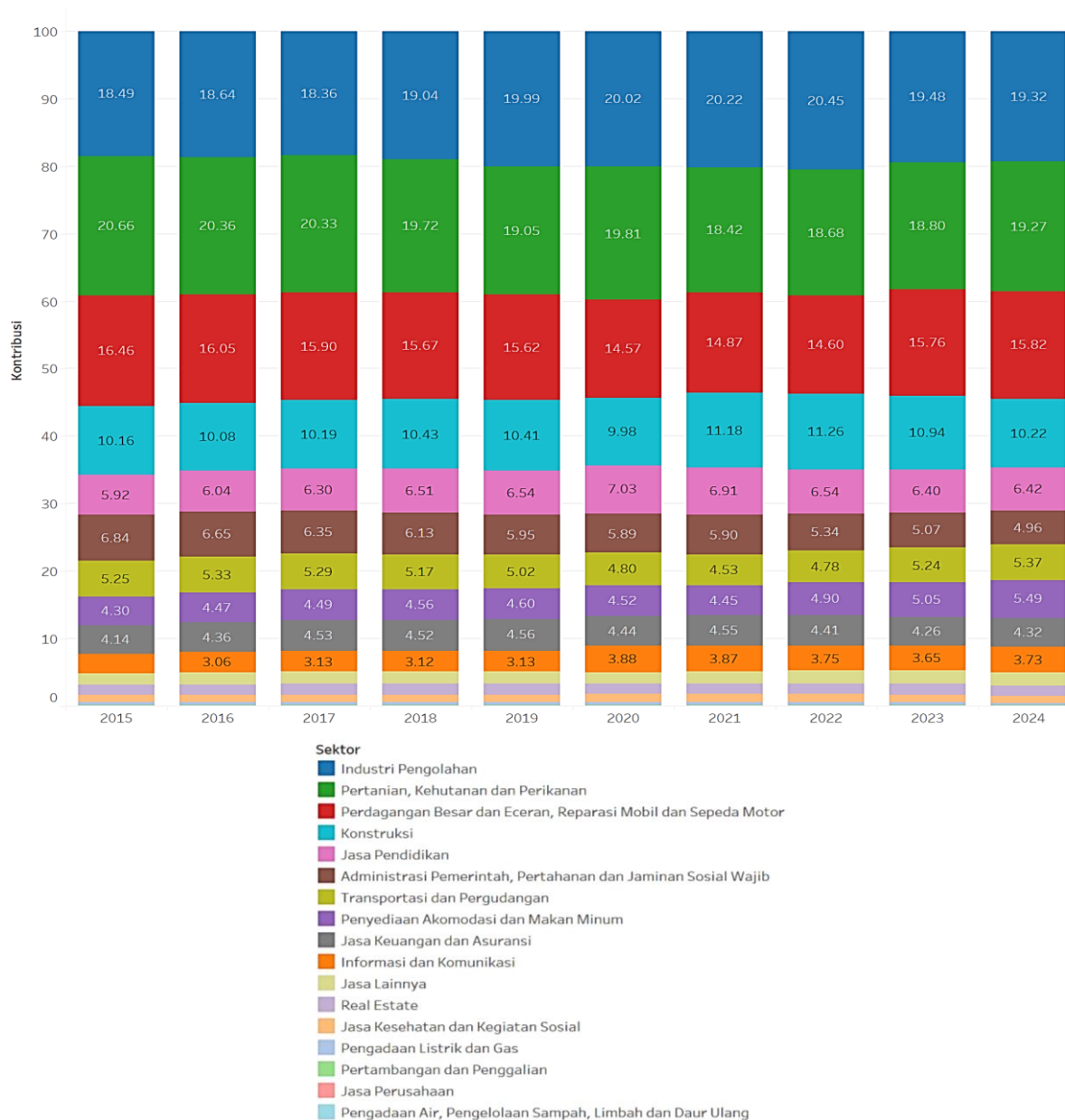
Berdasarkan data lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2024, dapat dilihat bahwa sektor-sektor utama pendorong ekonomi daerah ini melibatkan industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan. Industri Pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumedang, dengan kontribusi sebesar 19,32%. Ini menunjukkan bahwa sektor industri, yang meliputi produksi barang dan pengolahan bahan mentah, memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Sektor ini berkontribusi besar terhadap penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja, yang mendukung peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Sumedang.

Tabel 3.3 PDRB Tahun 2024 berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha Tahun 2024	ADHB (Milyar Rp)	Share (%)
Industri Pengolahan	9,103	19.32
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,084	19.27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi...	7,456	15.82
Konstruksi	4,819	10.22
Jasa Pendidikan	3,027	6.42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,587	5.49
Transportasi dan Pergudangan	2,529	5.37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan...	2,339	4.96
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,035	4.32
Informasi dan Komunikasi	1,757	3.73
Jasa Lainnya	967	2.05
Real Estat	684	1.45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	501	1.06
Pengadaan Listrik dan Gas	145	0.31
Jasa Perusahaan	45	0.1
Pertambangan dan Penggalian	39	0.08
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah...	11	0.02
Produk Domestik Regional Bruto	47,128	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025

Di samping itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memberikan kontribusi yang signifikan, yakni 19,27% dari total PDRB. Sektor ini menandakan bahwa Sumedang masih sangat bergantung pada sektor primer, dengan pertanian menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sektor ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan daerah.



Grafik 3.4 Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Selanjutnya, Perdagangan Besar dan Eceran, yang meliputi aktivitas jual beli barang dan jasa, berkontribusi sebesar 15,82% terhadap perekonomian Sumedang. Ini mencerminkan pentingnya sektor perdagangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, serta berperan besar dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah.

Sektor Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 10,22% terhadap PDRB Sumedang. Kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan proyek pembangunan fisik lainnya, memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja.

Beberapa sektor utama perekonomian daerah ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan proporsi yang relatif stabil sepanjang periode tersebut, meskipun terdapat beberapa fluktuasi.

Industri Pengolahan (warna biru) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (warna hijau) adalah sektor yang paling dominan dalam perekonomian Sumedang, dengan kontribusi mereka masing-masing terus mendominasi PDRB sepanjang tahun. Sektor industri pengolahan mencatatkan kontribusi sekitar 20% hingga 21%, sementara sektor pertanian memberikan kontribusi yang hampir sama, berkisar 19% hingga 20%. Kedua sektor ini menunjukkan bahwa Sumedang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor primer dan industri dalam perekonomiannya.

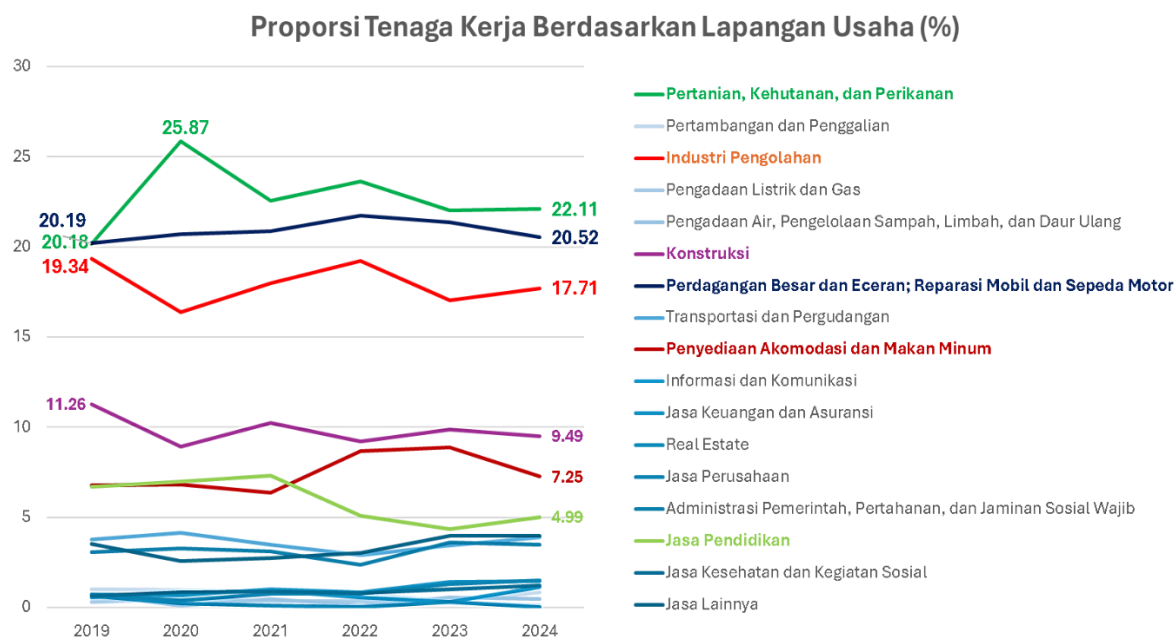
Perdagangan Besar dan Eceran (warna merah), yang mencakup sektor perdagangan barang dan jasa, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Sumedang, dengan angka yang terus meningkat dari 15% pada 2015 hingga 15% hingga 16% pada 2024. Ini menunjukkan pentingnya sektor perdagangan dalam perekonomian daerah, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun sektor distribusi barang.

Konstruksi (warna ungu muda), meskipun kontribusinya lebih kecil, terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari 6% pada 2015 menjadi 10% pada 2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan konstruksi lainnya yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, sektor-sektor seperti Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Real Estate mengalami kontribusi yang lebih kecil namun stabil, yang menunjukkan sektor-sektor ini masih penting dalam memberikan layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari sisi serapan tenaga kerja, meskipun sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sumedang, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2024, sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 25,87% dari total

tenaga kerja, sementara industri pengolahan menyerap 20,52%. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sektor industri memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dalam bentuk nilai tambah, sektor pertanian masih menjadi sektor yang lebih dominan dalam hal penyerapan tenaga kerja di Sumedang.



Grafik 3.5 Proporsi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

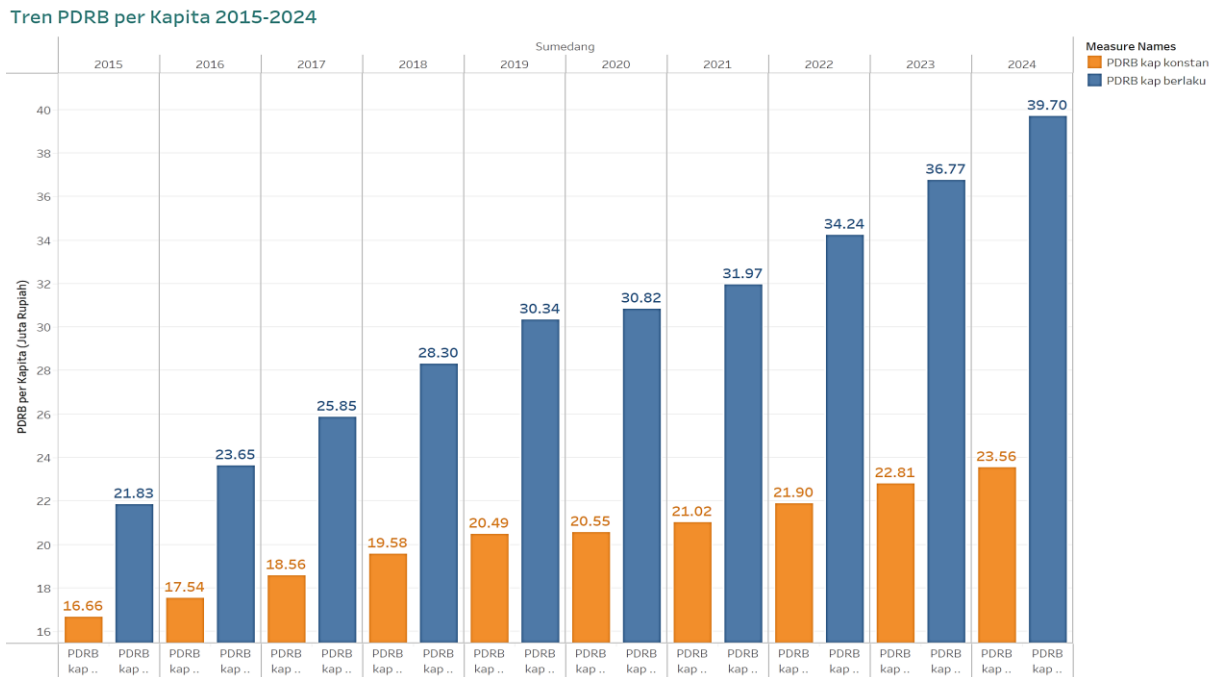
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Fenomena ini juga sejalan dengan tren umum dalam ketenagakerjaan sektoral di banyak daerah yang masih mengandalkan sektor primer seperti pertanian untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja, sementara sektor industri, meskipun berkontribusi lebih besar terhadap PDRB, cenderung memiliki kemampuan serapan tenaga kerja yang lebih rendah. Sektor industri pengolahan seringkali lebih padat modal dan teknologi, sehingga tidak sebanyak sektor pertanian yang membutuhkan tenaga kerja langsung dalam jumlah besar.

Selain itu, sektor Konstruksi dan Perdagangan juga mengalami kontribusi yang cukup signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun tidak sebanding dengan sektor pertanian. Jasa Pendidikan, yang meningkat sedikit, juga menunjukkan potensi sektor jasa untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, seiring dengan berkembangnya kebutuhan terhadap tenaga pendidik dan tenaga profesional di bidang pendidikan.

Dengan demikian, meskipun ada transformasi menuju sektor industri dan jasa, sektor pertanian tetap menjadi sektor utama dalam menyerap tenaga kerja, yang menunjukkan pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian

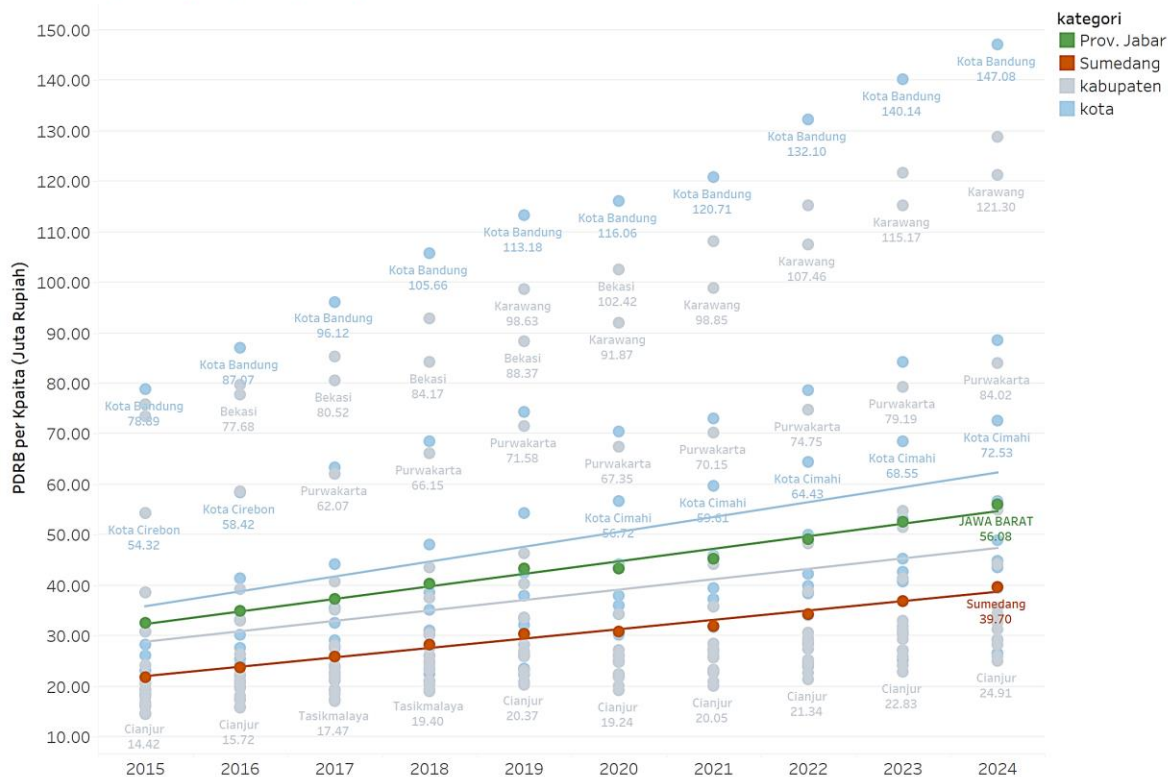
lokal, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Mengingat sektor pertanian relatif terbatas dalam memberikan nilai tambah terhadap perekonomian jika dibandingkan dengan sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa, maka nilai PDRB per kapita Kabupaten Sumedang belum setinggi wilayah lain yang struktur perekonomiannya sudah lebih banyak mengandalkan selain pertanian.



Grafik 3.6 Tren PDRB per Kapita Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Pada tahun 2024, PDRB per kapita Sumedang tercatat sebesar 39,70 juta Rupiah dengan menggunakan harga berlaku. Namun, jika dilihat berdasarkan PDRB per kapita dengan harga konstan, yang mencerminkan pertumbuhan yang disesuaikan dengan inflasi, PDRB per kapita Sumedang hanya tercatat 23,56 juta Rupiah pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan yang signifikan, perekonomian Sumedang masih relatif rendah dibandingkan dengan wilayah yang lebih maju di Jawa Barat. Sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan, namun ketergantungan terhadap sektor-sektor ini dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Tren PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Kota di Jawa Barat



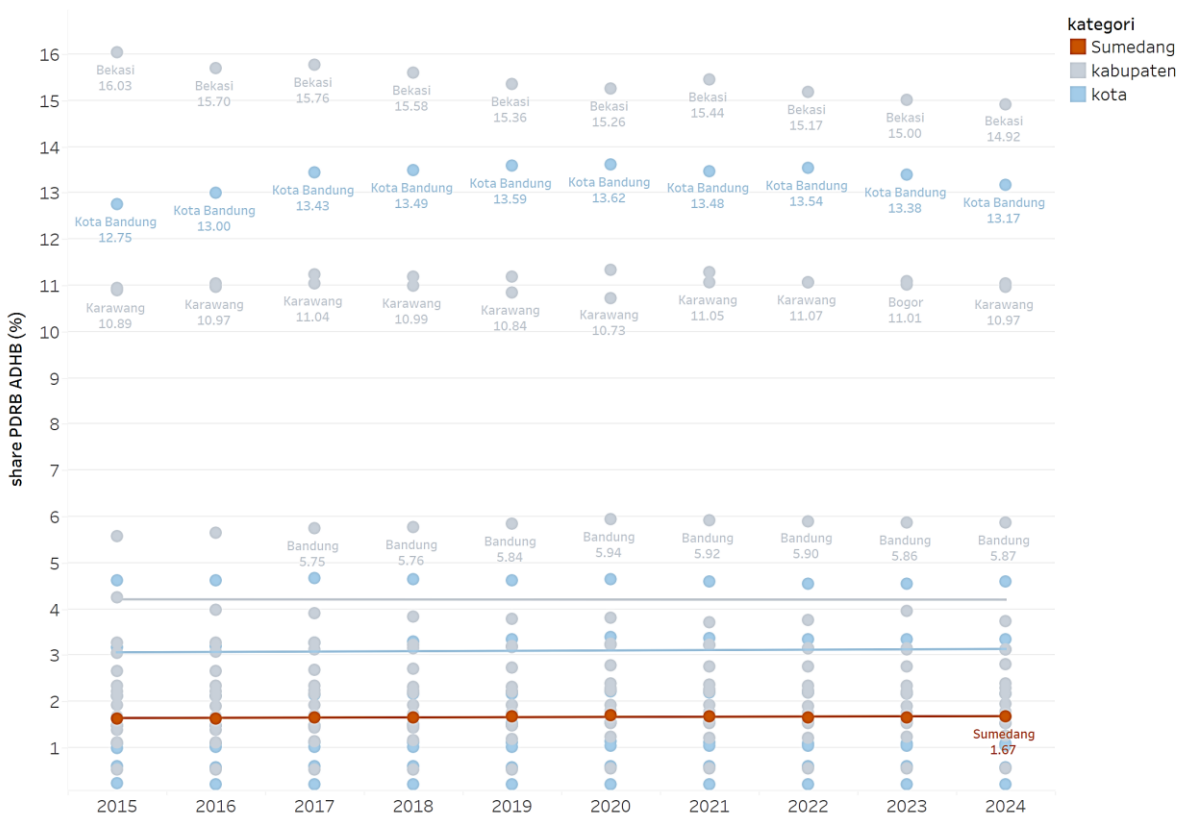
Grafik 3.7 Tren dan Komparasi PDRB per Kapita Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Tren kontribusi PDRB Kabupaten Sumedang dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat bahwa Sumedang (warna oranye) memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total PDRB di Jawa Barat, dengan kontribusinya tetap stabil di sekitar 1,67% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, kontribusi Sumedang terhadap PDRB Jawa Barat masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bekasi dan Bandung.

Bekasi dan Bandung menunjukkan kontribusi yang lebih besar dan stabil sepanjang periode tersebut, dengan Bekasi memberikan kontribusi yang sangat signifikan, mencatatkan sekitar 15% pada 2024, sementara Bandung juga tetap berada di kisaran 13%. Kedua kota besar ini memiliki kontribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota Sumedang, yang mencerminkan perbedaan besar dalam kapasitas ekonomi antara kota-kota besar dan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat.

Tren Kontribusi PDRB Kabupaten Kota di Jawa Barat



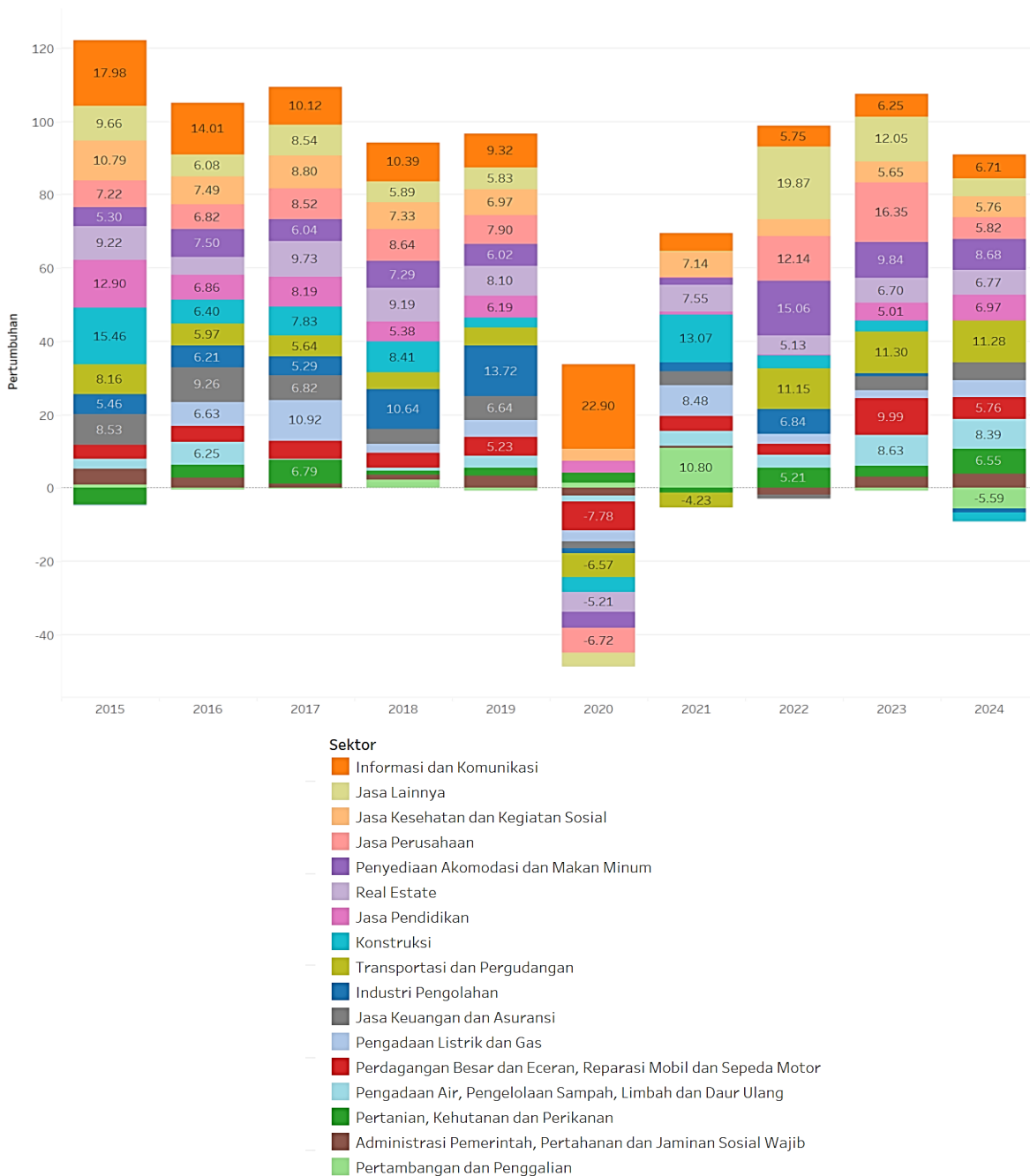
Grafik 3.8 Tren dan Kontribusi PDRB Sumedang terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Sumedang, meskipun berada di posisi yang lebih rendah dalam hal kontribusi terhadap PDRB, menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil meskipun berada di bawah kota-kota besar. Ini menandakan bahwa, meskipun ada tantangan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi secara keseluruhan, kabupaten seperti Sumedang tetap memainkan peran yang penting dalam mendukung perekonomian regional. Keterbatasan kontribusi ini menunjukkan pentingnya pengembangan sektor-sektor produktif dan investasi untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi di masa depan.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sektor Informasi dan Komunikasi (warna oranye) mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 dengan kontribusi mencapai 22,90%, mencerminkan adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan digitalisasi dan teknologi. Meskipun pada tahun tersebut sektor lainnya seperti Pertanian dan Industri Pengolahan (warna hijau dan merah) mengalami penurunan yang tajam akibat gangguan pandemi, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang paling resilient, mencatatkan pertumbuhan 22,90% pada 2020.

Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang 2015-2024



Grafik 3.9 Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

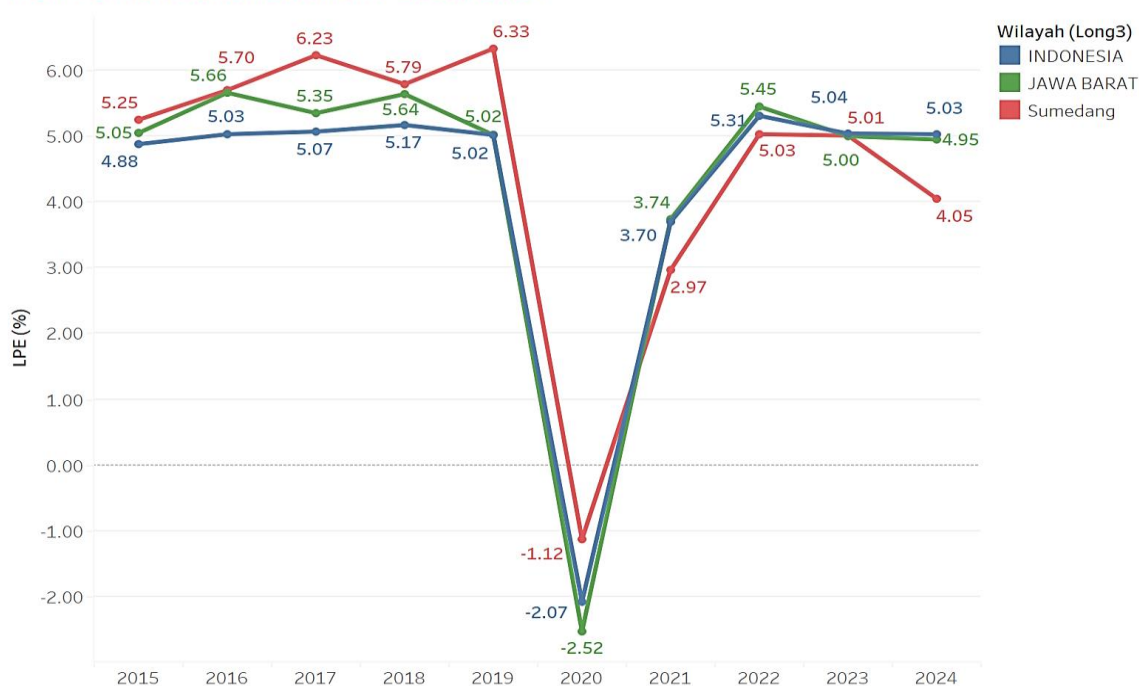
Sektor Jasa Lainnya, yang mencakup berbagai kegiatan non-produktif dan jasa, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, juga mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2020, dengan kontribusi besar dalam mengisi gap yang ditinggalkan oleh sektor lainnya yang terpuruk akibat pandemi. Jasa Pendidikan (warna hijau muda) juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik, meskipun sempat menurun tajam pada 2020 akibat penutupan sementara fasilitas pendidikan selama pandemi.

Setelah tahun 2020, grafik menunjukkan pemulihan yang relatif kuat pada beberapa sektor, seperti Pertanian (warna hijau), yang mengalami

kenaikan lagi pada tahun 2021 dan 2022, mencerminkan keberlanjutan sektor ini sebagai pilar ekonomi Sumedang. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan pemulihan pasca-pandemi, meskipun lebih lambat dibandingkan sektor lainnya, dengan kontribusi yang tetap signifikan.

Pertumbuhan lapangan usaha di Sumedang menunjukkan cepatnya pertumbuhan sektor-sektor yang lebih berbasis pada jasa, seperti Informasi dan Komunikasi, dibandingkan sektor yang lebih tradisional seperti Pertanian dan Industri Pengolahan. Sektor-sektor yang lebih terdiversifikasi dan berbasis teknologi menunjukkan ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis ekonomi global, sementara sektor-sektor tradisional lebih rentan terhadap guncangan eksternal seperti yang terjadi pada tahun 2020.

Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2024



Grafik 3.10 Komparasi Tren LPE Sumedang, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami dinamika dalam 10 tahun terakhir. Pada awal periode, sekitar tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang menunjukkan angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencatatkan angka sekitar 5,25% hingga 6,33%. Namun, saat memasuki tahun 2020, dampak besar dari pandemi COVID-19 sangat terlihat dalam grafik.

Seperti yang dapat dilihat, pertumbuhan ekonomi Sumedang mengalami penurunan tajam menjadi -1,12% pada tahun tersebut, mencerminkan krisis ekonomi global yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi. Penurunan

ini sangat mencolok, meskipun tidak seburuk beberapa wilayah lain di regional Jawa Barat dan nasional, namun tetap menjadi tantangan berat bagi ekonomi daerah. Setelah mengalami penurunan yang dalam pada 2020, ekonomi Kabupaten Sumedang mulai menunjukkan pemulihan namun menjadi tertinggal dibandingkan Jawa Barat secara umum dan nasional. Bahkan, di tahun 2024 LPE Sumedang semakin tertinggal karena mengalami perlambatan menjadi 4,05%.

Tren Prtumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Jawa Barat



Grafik 3.11 Komparasi Tren LPE Sumedang dan Wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Grafik ini menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2024. Tren LPE menunjukkan bagaimana perekonomian daerah berkembang dan bagaimana Sumedang menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi di tingkat provinsi dan nasional.

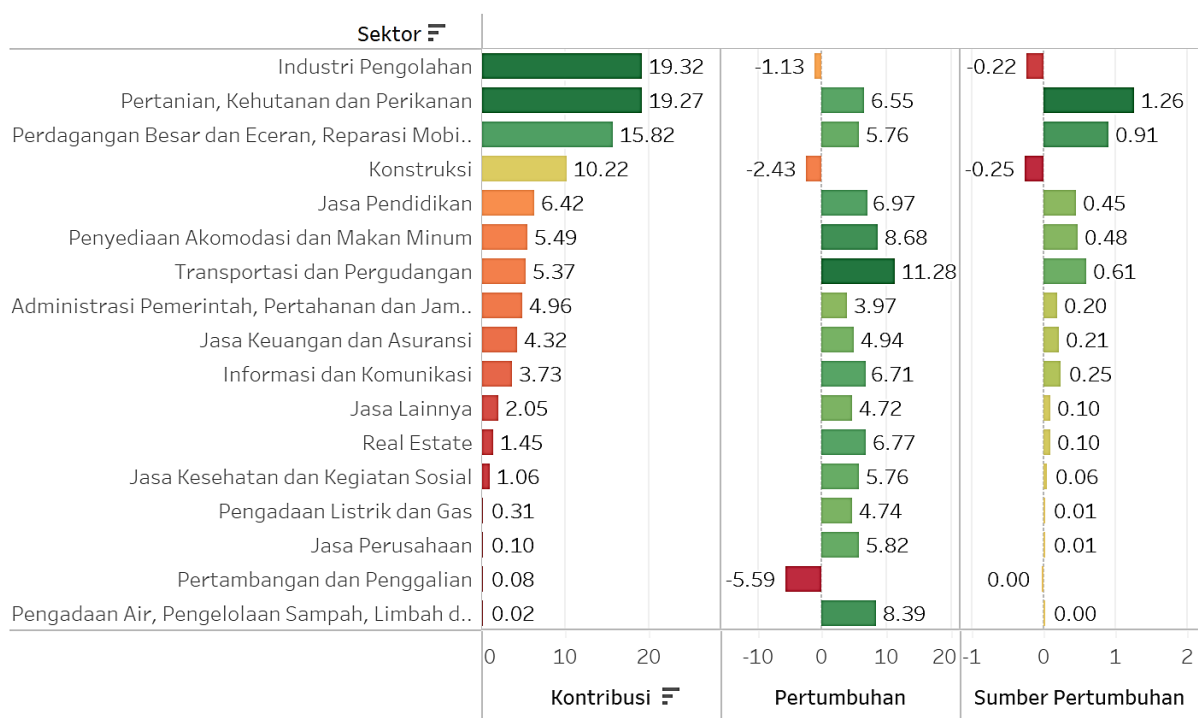
Secara keseluruhan, Sumedang mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan LPE yang tercatat pada angka 4,05% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit pemulihan pasca-pandemi, pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan dengan Jawa Barat yang mencatatkan LPE sekitar 4,95% pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan, Sumedang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Sementara itu, beberapa kabupaten lain seperti Karawang, Bekasi, dan Bandung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil, dengan kontribusi besar terhadap PDRB Jawa Barat. Perbedaan ini mencerminkan diversifikasi sektor ekonomi yang lebih baik di kabupaten/kota besar, yang mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang lebih berkembang.

Meskipun Sumedang mengalami tantangan dalam mengejar ketertinggalannya, sektor-sektor seperti pertanian dan perdagangan masih menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah ini, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak secepat sektor industri atau jasa.

Grafik berikut ini menunjukkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, beserta dampak pertumbuhannya, yang memberikan gambaran tentang dinamika sektor-sektor utama dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumedang tercatat sebesar 4,05%, dengan sektor-sektor tertentu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan, sementara beberapa sektor mengalami kontraksi yang mengurangi laju pertumbuhan secara keseluruhan.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024



Grafik 3.12 Kontribusi dan pertumbuhan PDRB Tahun 2024

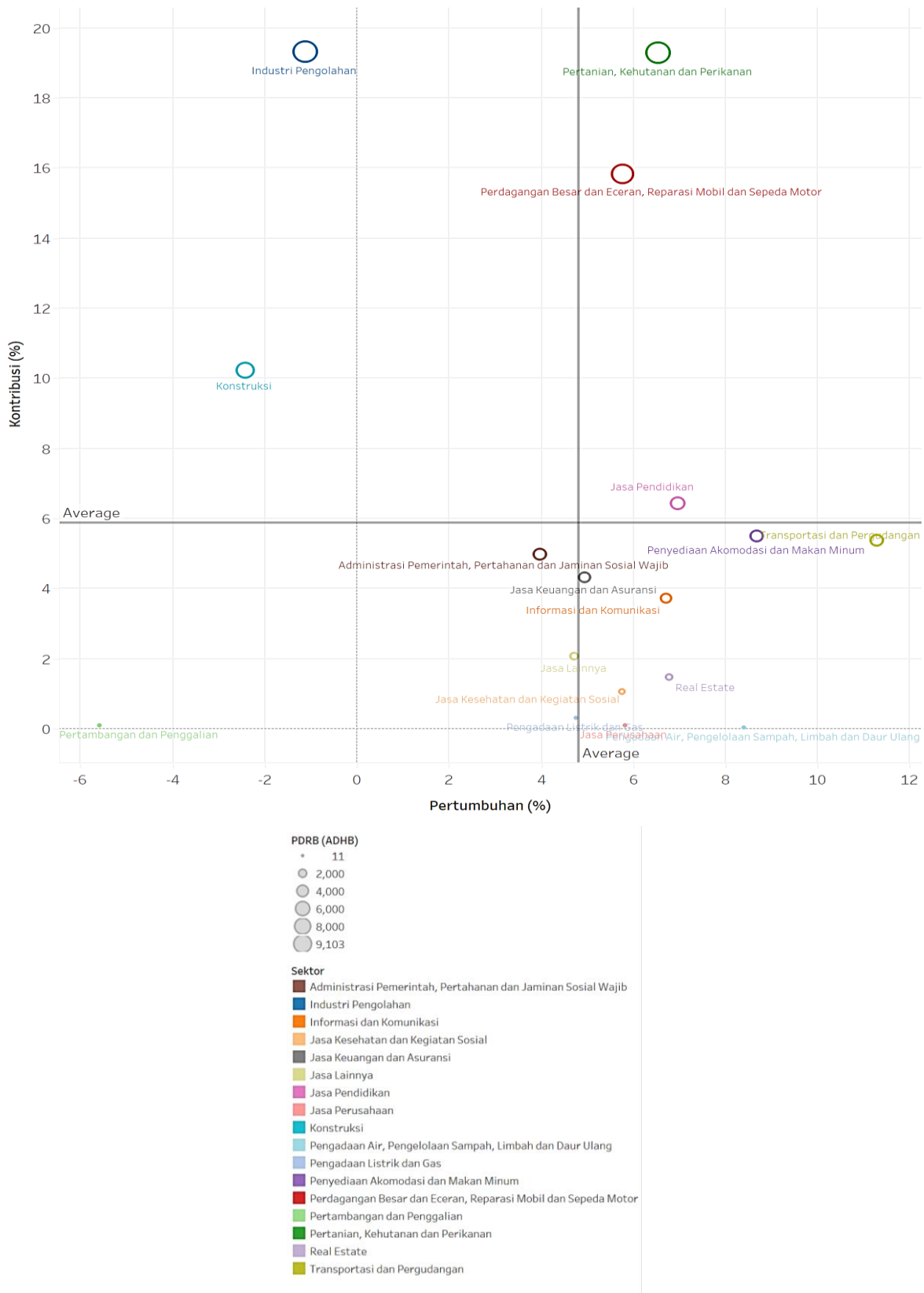
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Secara khusus, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi besar terhadap LPE, dengan 1,26% dari total

pertumbuhan yang disumbangkan oleh sektor ini. Sektor pertanian yang dominan ini menunjukkan pentingnya sektor primer dalam perekonomian Sumedang, meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor industri. Kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertanian masih memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung sektor-sektor lain.

Namun, ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-masing mengalami kontraksi pada tahun 2024. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Sumedang, mencapai 29,49% dari total PDRB, namun penurunan di kedua sektor ini mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan industri lokal, menunjukkan tanda-tanda perlambatan akibat faktor eksternal maupun perubahan dalam pola investasi.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2024



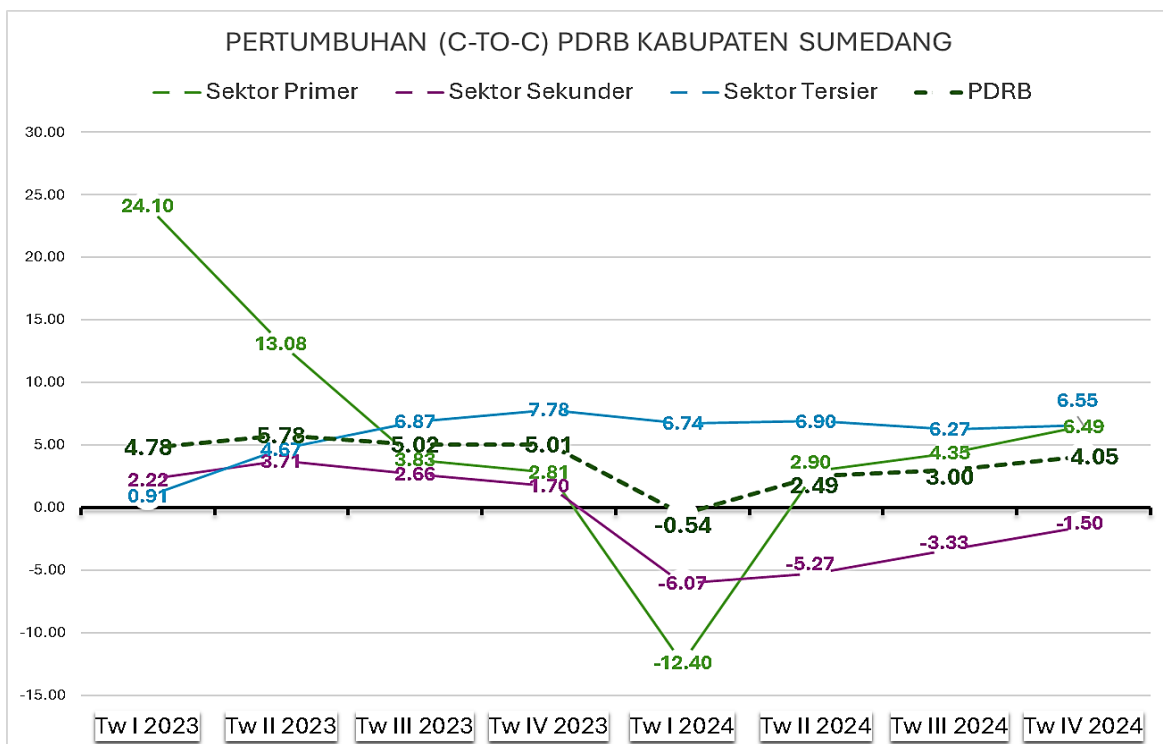
Grafik 3.13 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Dengan adanya kontraksi pada sektor-sektor penting ini, Sumedang perlu mengevaluasi kembali strategi investasi dan kebijakan industri untuk mempercepat pemulihan. Terlepas dari itu, sektor Pertanian tetap menjadi sumber pertumbuhan yang stabil, dengan sektor lainnya, seperti Perdagangan

dan Jasa Pendidikan, turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung ekonomi lokal. Keseimbangan antara sektor primer dan sektor industri serta jasa akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Perlambatan ekonomi di Sumedang sudah mulai terlihat, terutama pada sektor sekunder, sejak Triwulan I 2024. Pada sektor sekunder (digambarkan dengan garis warna ungu), yang mencakup sektor industri dan konstruksi, terdapat penurunan tajam sejak Triwulan I 2024, dengan angka -6,07% pada Triwulan I 2024 dan -5,27% pada Triwulan II 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan konstruksi yang biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumedang mulai mengalami perlambatan yang signifikan.



Grafik 3.14 Pertumbuhan Lapangan Usaha Triwulanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Sebaliknya, sektor primer (warna hijau) menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun masih fluktuatif. Pada Triwulan I 2024, sektor ini mengalami penurunan sebesar -12,40%, tetapi mulai menunjukkan pemulihan dengan angka positif pada Triwulan II dan III 2024. Sektor tersier (warna biru), yang mencakup sektor jasa, juga mengalami penurunan ringan, tetapi secara keseluruhan kontribusinya terhadap PDRB Sumedang lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi tajam seperti sektor sekunder.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor industri dan konstruksi, yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumedang, kini mulai menghadapi tantangan, yang mungkin dipicu oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, keterbatasan investasi, atau masalah dalam rantai pasokan. Sementara itu, sektor pertanian dan jasa masih mampu memberikan kontribusi positif meskipun ada penurunan di sektor sekunder.

Dengan demikian, perlambatan ekonomi Sumedang pada awal 2024 lebih jelas terlihat pada sektor-sektor yang bergantung pada industri dan konstruksi, dan ini harus menjadi perhatian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan antar sektor.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD meliputi arah kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pendapatan Daerah meliputi:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - b) Peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan dan penyesuaian regulasi yang berlaku;
 - c) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
 - d) Meningkatkan akurasi perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan baru;

- e) Mendayagunakan kekayaan atau asset-aset yang idle, dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - f) Koordinasi dan konsultasi yang intens Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
 - g) Digitalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Strategi Pendapatan Daerah
- a) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b) Peningkatan kapasitas sdm pengelola pendapatan daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c) Peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;
 - d) Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;
 - e) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah; dan
 - g) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.

Memperhatikan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 serta Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah, maka Realisasi dan Proyeksi/Target perubahan Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2025, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	2.845.322.438.547,44	3.057.028.925.544,16
1.1	Pendapatan Asli Daerah	518.684.991.990,44	566.234.387.379,16
1.1.1	Pajak Daerah	222.791.864.642,00	242.774.020.628,00
1.1.2	Retribusi Daerah	8.533.635.358,00	300.554.502.830,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.491.956.500,00	11.880.680.700,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	274.867.535.490,44	11.025.183.221,16
1.2	Pendapatan Transfer	2.326.100.313.524,00	2.485.804.727.800,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.020.724.604.782,00	2.216.858.539.145,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	305.375.708.742,00	268.946.188.655,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	537.133.033,00	4.989.810.365,00
1.2.1	Pendapatan Hibah	537.133.033,00	4.989.810.365,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.845.322.438.547,44	3.057.028.925.544,16

Sumber:

- Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (audited BPK RI).
- Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 20234 (Database SIPKD per 31 Desember 2024).

Tabel 3.4 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	RKPD Tahun 2025	APBD Tahun 2025	Pergeseran APBD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8
1	Pendapatan Daerah	3.013.394.661.518,00	2.934.191.214.462,00	2.928.164.871.662,00	2.928.164.871.662,00	(85.229.789.856,00)	(2,83)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	675.641.567.038,00	691.065.244.064,00	691.065.244.064,00	691.065.244.064,00	15.423.677.026,00	2,28
1.1.1	Pajak Daerah	333.888.308.744,00	335.877.042.225,00	335.877.042.225,00	335.877.042.225,00	1.988.733.481,00	0,59
1.1.2	Retribusi Daerah	316.833.002.972,00	335.006.946.517,00	335.006.946.517,00	335.006.946.517,00	18.173.943.545,00	5,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.236.555.322,00	13.236.555.322,00	13.236.555.322,00	13.236.555.322,00	-	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	11.683.700.000,00	6.944.700.000,00	6.944.700.000,00	6.944.700.000,00	(4.739.000.000,00)	(40,56)
1.2	Pendapatan Transfer	2.337.753.094.480,00	2.243.125.970.398,00	2.237.099.627.598,00	2.237.099.627.598,00	(100.653.466.882,00)	(4,31)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.215.169.552.480,00	2.121.098.454.000,00	2.100.264.566.000,00	2.100.264.566.000,00	(114.904.986.480,00)	(5,19)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.583.542.000,00	122.027.516.398,00	136.835.061.598,00	136.835.061.598,00	14.251.519.598,00	
	Jumlah Pendapatan	3.013.394.661.518,00	2.934.191.214.462,00	2.928.164.871.662,00	2.915.522.333.662,40	2.928.164.871.662,00	

Sumber: BAPENDA Kabupaten Sumedang, 2025

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam Tahun Anggaran Berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian diantaranya:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan;
- c. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran;
- e. Sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diantaranya dipengaruhi oleh:

1. Perubahan Penjabaran APBD

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD

yaitu dengan merubah Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi RKPD dan KUA Berkenaan

Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta proyeksi Penerimaan Daerah yang dapat berupa:

- a. Penyesuaian capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
- b. Penyesuaian capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA;
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

3. Adanya pergeseran anggaran

Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, Pergeseran Anggaran dapat berupa:

- a. Pergeseran Antar Organisasi;
- b. Pergeseran Antar Unit Organisasi;
- c. Pergeseran Antar Program;
- d. Pergeseran Antar Kegiatan;
- e. Pergeseran Antar Sub Kegiatan;
- f. Pergeseran Antar Kelompok;
- g. Pergeseran Antar Jenis.

4. Penggunaan Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Penggunaan Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia diantaranya dapat berupa:

1. Menutupi defisit anggaran;
2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
4. Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

5. Prioritas Belanja pada Perubahan

Prioritas Pendanaan Belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan Pendanaan atas kebutuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- b. Pemenuhan capaian target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi semester II;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- d. Penyusunan Peraturan tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Penguatan pencapaian target pembangunan daerah melalui transfer keuangan kepada Pemerintah Desa.

Memperhatikan hal dimaksud maka Perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Maka Perubahan proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2023 – 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
2	BELANJA DAERAH	2.919.935.326.859,00	3.083.037.976.547,00
2.1	Belanja Operasi	2.067.545.086.538,00	2.261.695.440.153,00
1.1	Belanja Pegawai	1.136.204.761.480,00	1.211.094.932.494,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	855.904.168.659,00	924.352.551.239,00
1.3	Belanja Subsidi	450.000.000,00	700.000.000,00
1.4	Belanja Hibah	65.146.756.399,00	121.284.456.420,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.839.400.000,00	4.263.500.000,00
2.2	Belanja Modal	405.717.844.656,00	372.319.512.856,00
01	Belanja Modal Tanah	3.486.649.000,00	6.851.074.864,00
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.167.717.934,00	127.770.957.756,00
03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.018.035.799,00	126.419.853.149,00
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	175.796.888.261,00	90.256.809.864,00
05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.324.226.162,00	17.768.245.223,00
06	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.924.327.500,00	3.252.572.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.967.211.399,00	1.262.126.299,00
01	Belanja Tidak Terduga	6.967.211.399,00	1.262.126.299,00
	Belanja Transfer	439.705.184.266,00	447.760.897.239,00
01	Belanja Bagi Hasil	30.551.038.950,00	31.519.669.750,00
02	Belanja Bantuan Keuangan	409.154.145.316,00	416.241.227.489,00
	JUMLAH BELANJA	2.919.935.326.859,00	3.083.037.976.547,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(74.612.888.311,56)	(26.009.051.002,84)

Sumber: diolah BKAD dan BAPPPEDA, 2025

Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Uraian	RKPD Tahun 2025	APBD Tahun 2025	Pergeseran APBD Tahun 2025 (Rp)	Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Belanja Operasi	2.188.406.942.986,56	2.337.269.789.758,00	2.324.190.521.976,00	2.567.694.928.962,87	379.287.985.976,31	17,33
5.1.1	Belanja Pegawai	1.287.941.141.577,00	1.327.455.653.342,00	1.331.227.109.542,00	1.341.122.054.894,00	53.180.913.317,00	4,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	756.682.744.136,01	950.969.807.416,00	934.119.083.434,00	1.147.794.366.268,87	391.111.622.132,86	51,69
5.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	1.400.000.000,00	900.000.000,00	180,00
5.1.4	Belanja Hibah	123.283.057.273,55	55.599.479.000,00	55.599.479.000,00	74.813.657.800,00	(48.469.399.473,55)	(39,32)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000.000,00	2.844.850.000,00	2.844.850.000,00	2.564.850.000,00	(17.435.150.000,00)	(87,18)
5.2	Belanja Modal	1.393.575.528.827,50	124.012.408.813,00	135.835.915.323,00	303.249.341.030,00	(1.090.326.187.797,50)	(78,24)
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	23.588.141.491,00	19.929.468.142,00	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	66,67
5.4	Belanja Transfer	919.156.636.360,00	444.820.874.400,00	444.820.874.400,00	458.000.000.000,00	(461.156.636.360,00)	(50,17)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	36.833.327.000,00	35.138.866.000,00	35.138.866.000,00	40.000.000.000,00	3.166.673.000,00	8,60
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	882.323.309.360,00	409.682.008.400,00	409.682.008.400,00	418.000.000.000,00	(464.323.309.360,00)	(52,63)
TOTAL BELANJA DAERAH		882.323.309.360,00	409.682.008.400,00	409.682.008.400,00	3.353.944.269.922,87	(1.162.194.838.181,19)	(25,73)
SURPLUS/DEFISIT		4.516.139.108.174,06	2.929.691.214.462,00	2.924.776.779.841,00	(425.779.398.330,87)	1.071.965.048.325,19	(71,67)

Sumber: diolah BKAD dan BAPPPEDA, 2025

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Perubahan Kebijakan Penerimaan Daerah

Perubahan Kebijakan Penerimaan Daerah Tahun 2024 diantaranya dipengaruhi oleh adanya penyesuaian Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

B. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Daerah

1. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Daerah Tahun 2024 diantaranya dipengaruhi oleh pemenuhan anggaran bersifat mandatory yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan perincian sebagai berikut:
2. Penyesuaian Anggaran untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
3. Penyesuaian Anggaran untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
4. Penyesuaian Anggaran untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
5. Pemenuhan Anggaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan arah kebijakan perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dengan perincian sebagai tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	161.615.426.739,74	96.681.587.819,18
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	161.530.195.031,74	56.002.538.428,18
6.1.2	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat		40.614.170.831,00
6.1.3	Pencairan Dana Cadangan	85.231.708,00	64.878.560,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan NETTO	130.615.426.739,74	94.681.587.819,18
	SILPA	56.002.538.428,18	68.672.536.816,34

Sumber:

- Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (audited BPK RI).
- Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 20234 (Database SIPKD per 31 Desember 2024).

Tabel 3.8 Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	RKPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Pergeseran APBD Tahun 2025 (Rp)	Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
1	2	3	4	5	6	7=6-3	8
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	1.111.908.179,00	1.111.908.179,00	1.111.908.179,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	1.111.908.179,00	1.111.908.179,00	1.111.908.179,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	(5.500.000.000,00)	(122,22)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	(5.500.000.000,00)	(122,22)
	PEMBIYAAAN NETTO	(10.000.000.000,00)	(4.500.000.000,00)	(3.388.091.821,00)	(3.388.091.821,00)	6.611.908.179,00	(66,12)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	(1.512.744.446.656,06)	0,00	0,00	(429.167.490.151,87)	1.083.576.956.504.19	

Sumber:

- Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (audited BPK RI).
- Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2023/2024 (Database SIPKD per 31 Desember 2024).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah tahapan perencanaan tahunan yang mengalami perubahan atau revisi dari dokumen RKPD yang telah disusun sebelumnya. RKPD sendiri merupakan dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk mengatur program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Namun disisi lain dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029 tentunya Perubahan RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan Dokumen tersebut.

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Melalui adanya penyusunan dokumen Perubahan RKPD, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat mengantisipasi dan menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan dinamika yang terjadi secara fleksibel dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual yang ada.

1. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut;
2. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing- masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya;
3. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Dengan telah ditetapkannya yaitu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maka akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Visi Indonesia Emas 2045 pada Rencana Pembanguna Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah **“Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu , Berdaulat , Maju Dan Berkelanjutan”** dengan Visi abadi Indonesia yaitu **“Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”**

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara di Tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 8 misi (Asta Cita) yaitu:

- Asta Cita Satu** : Memperkokoh Ideologi Pancasila, dan Hak Azasi Manusia
- Asta Cita Dua** : Memantapkan Sistem Pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Asta Cita Tiga** : Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktiv koperasi.

- Asta Cita Empat** : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang Disabilitas.
- Asta Cita Lima** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Asta Cita Enam** : Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Asta Cita Tujuh** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Asta Cita Delapan** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita) terdapat 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Capat atau *Quick win* yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program *food estate*, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. Diharapkan lembaga ini mampu memberikan

kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik yang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam Pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara.

5. Pemberantasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.

7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.

8. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender

dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara. Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi.

11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan. Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (*carbon footprint*) dan jejak air (*water footprint*) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.

12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

13. Menjamin Rumah Murah dan Sanitasi untuk Masyarakat Desa dan Rakyat yang Membutuhkan

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi, Penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta

kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Penguatan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausahawirausaha baru, terutama dikalangan anak muda. Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan, menjaga lingkungan. Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia. Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

16. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis.

17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan

pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHCT) yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) harus segera dibenahi. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh

kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (*non-boarding school*) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target

angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia di Indonesia”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1.1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
 - 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - 1.3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
 - 1.4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda; dan
 - 1.5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - 2.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
 - 2.2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 2.3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan
 - 2.4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 3.1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
 - 3.2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
 - 3.3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
 - 3.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 3.5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana; dan
 - 3.6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - 4.1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 4.2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan
 - 4.3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan Visi “Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan”. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 . Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam tahapan pembangunan RPJPD yaitu Tahun 2025-2029 (Tahapan Fondasi Pembangunan) dengan Visi ”**Jabar Istimewa-Lembur diurus Kota di Tata**”. Pernyataan Jawa Barat Istimewa mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofis frase, kalimat Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna kata sebagai berikut:

- **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.
- **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan , maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.
- **LEMBUR DIURUS**, Lembur dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan Diurus berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih

baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata serta sektor lainnya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi.

- **KOTA DITATA** memiliki arti pembangunan wilayah perkotaan sebagai Kawasan perdagangan barang dan jasa, serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah.

Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana.

Ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, "Lembur Diurus, Kota Ditata" mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah pedesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kotakota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup. Visi ini berfokus pada pemerataan pembangunan, sehingga baik desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

Dalam pencapaian Visi tersebut di dukung oleh 4 (empat) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.

- Misi 2** : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif.
- Misi 3** : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
- Misi 4** : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul, memiliki Tujuan yaitu:

- a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya derajat kesehatan individu;
 - 2) Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
 - 3) Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
 - 4) Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan;
 - 5) Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

2. Perwujudan Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Misi ini diuraikan kedalam dua tujuan, yaitu:

- a. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:
- 1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
 - 3) Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa; dan

- 4) Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.
 - b. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
 - 2) Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; dan
 - 3) Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
- 3. Perwujudan Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**, memiliki tujuan yaitu:
- a. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan;
 - 2) Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - 3) Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.
- 4. Perwujudan Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dengan Prinsip Good dan Clean Governance.** Terdapat dua tujuan, yaitu:
- a. Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
 - 2) Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.
 - b. Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, Dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPD berpedoman pada visi dan misi RPJPD Tahun 2005-

2025 yaitu “**Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis**” yang di singkat **Sumedang SEHATI**.

Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 tentunya harus menjadi target kinerja RKPD Tahun 2025, RKPD Tahun 2025 merupakan Tahun Kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Untuk lebih rinci pencapaian target kinerja Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun
				2024	2025
1	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,57	73,74 - 74,59
01.01	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,74	9 - 9,10
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,02	13,07 - 13,17
01.02	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,29	73,24 - 73,63
01.03	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	96,22	95,29 - 95,16
		Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	76,99	71,77 - 73,43
01.04	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	76,60	75,5
01.05	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	n/a	47

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun
				2024	2025
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,05	5,50 - 6,82
02.01	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,13	8,04 - 9,23
		Laju pertumbuhan sector perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor	Persen	5,76	6,37 - 8,28
		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	6,55	3,48 - 5,15
		Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	8,68	9,44 - 10,13
02.02	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	81,89	83,17
02.03	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	15,40	12
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,10	9,43 - 7,40
		Gini Ratio	Ratio	0,337	0,35 - 0,32
03.01	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Nilai komposit FSVA	Persen	61,89	67,21
03.02	Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta (Rp)	39,70	38,18 - 40,24
03.03	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,16	6,75 - 5,94
03.04	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,87	0,8
4	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	127,24	104,39

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun
				2024	2025
04.01	Meningkatnya Ketahan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,54
04.02	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,47	66,25
5	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	88,45	81,51
05.01	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesional ASN	Poin	81,33	71
05.02	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori / Skor	77,44 (BB)	A (82)
		Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,53	3,78
05.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,58	4,72
05.04	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,69	4,35

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Tahun 2025 merupakan awal atau fondasi dari RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan Visi "**Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan**" yang selanjutnya disingkat "**SUMEDANG MANDALA**". Selain itu tahun 2025 merupakan pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mempedomani RPJPD 2025-2045 dengan Visi "**Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045**", atau **Sejahtera** Masyarakatnya, **Agamis** Akhlaqnya, **Maju** Daerahnya, **Profesional** Aparaturnya dan **Kreatif** Ekonominya. Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi

yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat secara adil dan merata.

Agamis : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertata kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional : Pemerintah Kabupaten Sumedang mewujudkan *good governance* dimana penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang lebih baik unggul secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Kreativitas dan produktivitas ini akan ditunjang dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi ini adalah proses pembangunan yang akan semakin menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan ini akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai arus utama dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Semakin Maju : Sebuah kondisi Pembangunan daerah yang telah menjadikan dasar capaian dalam 5 tahun kepemimpinan sebelumnya sebagai komitmen kuat untuk “**memelihara hasil Pembangunan, menyempurnakan kesejahteraan dan melanjutkan kemajuan yang telah dicapai** dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam pencapaian visi tersebut didukung oleh 5 (Lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter;

Misi ini mendorong pembangunan SDM masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, sehat secara fisik dan mental, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. SDM yang agamis dan berkarakter akan menjadi pondasi dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan : Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Sasaran 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat.

Sasaran 3 : Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis.

Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif;

Misi ini mendorong upaya membentuk birokrasi pemerintahan yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Birokrasi yang profesional dan responsif adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan : Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital.

Sasaran 1 : Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital.

Sasaran 3 : Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan ;

Infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, pengelolaan sampah akan langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Namun, disparitas akses dan kualitas infrastruktur antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan, Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang **merata dan berkeadilan**

menjadi prioritas untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat pembangunan.

Tujuan : Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan air.

Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;

Pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak disertai pemerataan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat **inklusif** (merangkul semua golongan, termasuk masyarakat rentan, miskin, dan UMKM) serta **berkelanjutan** (tidak merusak lingkungan, memperhatikan generasi mendatang). Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif, dan industri pengolahan serta perdagangan, Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi itu agar **pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kawasan tertentu**, tetapi bisa dirasakan secara merata dan adil.

Tujuan : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi

Sasaran 2 : Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial ;

Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari **tingkat kesejahteraan dan ketahanan sosial** masyarakat. Kesejahteraan menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup, sementara

ketahanan sosial merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, konflik sosial, dan berbagai persoalan kehidupan (kerentanan sosial, ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan pelayanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan).

Tujuan : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diatas pada implementasinya dilandasi oleh 3 (tiga) pondasi yaitu

1. **Agama**, agar implementasi perwujudannya agar terarah sesuai dengan kaidah nilai-nilai agama.
2. **Budaya**, agar implementasi perwujudannya membumi dengan menekankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
3. **Teknologi**, agar implementasi perwujudannya lebih akseleratif dan sesuai dengan perkembangan teknologi global.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, tercantum Sasaran Visi dimana terdapat Indikator dan target yang harus dicapai selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Sasaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan per kapita
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan;
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing;
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission.

Untuk lebih rinci Sasaran visi dan target kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Sasaran Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Sasaran Visi	Indikator	Target (Tahun)
		2025
Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)	39.55 - 39.91
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19,62*
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8.23 - 9.09*
	b. Rasio Gini (Poin)	0.352 - 0.359*
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1,64*
	d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.79 - 5.20*
Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing	a. Indeks Inovasi Daerah	73,30
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,593
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (%)	74.48*
Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	6,05*
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	66,25*

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun Kedua dalam periode RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026. Fokus pembangunan pada tahun 2025 adalah menjadi tonggak awal untuk penentuan Visi Kepala Daerah terpilih untuk periode RPJMD 2025-2029. Fokus Pembangunan RKPD Tahun 2025 selaras dengan Fokus Pembangunan pada Dokumen RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yaitu Ekonomi daerah yang berkelanjutan. Atas dasar ini, tema RKPD Tahun 2025 adalah **"Ekonomi Daerah yang Tangguh, Inklusif dan berkelanjutan"**.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Untuk mengimplementasikan Tujuan, dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 ke dalam rencana kerja tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2025, maka dirancang suatu Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas, pengembangan potensi daerah**

tentunya perlu ditunjang terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

- 2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing,** dengan melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah yang didukung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM. Memastikan bahwa kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia tersedia untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, gender, atau kecacatan. Selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan membangun iklim yang mendukung kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Ini menciptakan peluang kerja baru, memperkuat sektor ekonomi lokal, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. membantu mengurangi tingkat pengangguran kemudian penyediaan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti tunawisma, orang tua tunggal, atau penyandang disabilitas.

3. Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitik beratkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Dari penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan yang tersaji pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO.	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN
1.	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas. 2. Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur 3. Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim; 4. Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi; 5. Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 6. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 7. Peningkatan pengelolaan persampahan 8. Optimalisasi Penataan Ruang 9. Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata; 10. Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif; 11. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan; 12. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri; 13. Peningkatan nilai Investasi Daerah.

NO.	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN
2.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan; 2. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah; 3. Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting; 4. Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat; 5. Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 6. Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga; 7. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi; 8. Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan; 9. Peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan; 10. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga publik; 11. Peningkatan literasi digital masyarakat.
3.	Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN; 2. Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah; 3. Peningkatan Kemandirian Desa; 4. Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 5. Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien; 6. Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien; 7. Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta peningkatan Ekosistem Inovasi Daerah; 8. Peningkatan Pendapatan Daerah; 9. Peningkatan literasi digital aparatur.

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

Agar optimalnya kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, perlu adanya target kinerja berupa indikator kinerja prioritas sasaran pembangunan Tahun 2025. Untuk lebih detail indikator kinerja Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025		
1	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	1 Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas	1 Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	83,17		
			2 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	82,63		
			3 Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen	96,36		
			4 Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80,37		
			5 Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	58,97		
		2 Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	1 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	93,43		
			2 Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	78,75		
				3 Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim;.	1 Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100
					2 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100
					3 Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100
4 Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi;	1 Nilai komposit FSVA			Persen	67,21		
5 Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Persen	3,48-5,15		
6 Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Poin	66,25		
7 Peningkatan pengelolaan persampahan	1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)			Poin	32		
8 Optimalisasi Penataan Ruang	1 Ketaatan Terhadap RTR			Persen	73,31		
9 Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata	1 Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			Persen	9,44-10,13		

NO	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
			2 Kunjungan wisata	Orang	1.207.500
		10 Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif	1 Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	16
			2 Jumlah Usaha Mikro Yang Berkembang	Unit Usaha	15.338
		11 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	1 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	6,37-8,28
			2 Persentase Koperasi Modern	Persen	5,98
			3 Tingkat Stabilisasi Sektor Perdagangan	Persen	100
		12 Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;	1 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	8,04-9,23
			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	Persen	10,29
		13 Peningkatan nilai Investasi Daerah	1 Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	12
2	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing	1 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9-9,10
			2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07-13,17
		2 Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah;	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,24-73,63
		3 Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting;	1 Ratio Kematian Ibu	Rasio	0085
			2 Ratio Kematian Bayi	Rasio	0,012
			3 Prevalensi Stunting	Persen	7
		4 Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	1 Gini Ratio	Poin	0,35-0,32
			2 PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	38,18-40,24
		5 Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 Tingkat Kemiskinan	Persen	9,43-7,40
			2 Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	Persen	85
		6 Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	1 Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	71,77-73,43
			2 Indesk Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,29-95,16
			3 Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan dan perlindungan hukum	Persen	38,87

NO	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
		7 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi	1 Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	6,75-5,94
		8 Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan.	2 Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	OPK	11
		9 Peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan	1 Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47
		10 Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga publik	2 Jumlah prestasi olahraga yang di Raih dalam satu tahun	Orang	20
		11 Peningkatan literasi digital masyarakat	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	12,74
3	Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak	1 Pemerataan Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN	1 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71
			2 Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	Persen	87
		2 Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah	1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	Persen	93
			2 Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100
		3 Peningkatan Kemandirian Desa	1 Indeks Desa Membangun	Poin	
			2 Presentase Status Desa Mandiri dengan optimalisasi potensi desa	Persen	68,52
		4 Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,35
			2 Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,72
		5 Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,51
			2 Nilai Sakip Kabupaten	Kategori / Skor	A (82)
			3 Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,78
			4 Maturitas SPIP	Level	4
		6 Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta peningkatan Ekosistem Inovasi Daerah	1 Indeks inovasi daerah	Kategori	Sangat Inovatif
2 Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi	Persen		91,81		
7 Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	25,9		

NO	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
		8 Peningkatan literasi digital aparatur	1 Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	98

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

4.2.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Tiga prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 telah ditelaah dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Untuk lebih rinci keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Sinkronisasi Dan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026

Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026
1. Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi; 2. Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan digitalisasi promosi dan pemasaran produk UMKM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana, promosi, keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen; 4. Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, prasarana penunjang kegiatan pariwisata; 5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan; 6. Peningkatan pelayanan air baku/air bersih dan sanitasi layak; 7. Peningkatan kualitas jaringan irigasi, peningkatan sistem pengendalian banjir, peningkatan sistem prasarana lainnya;

Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Peningkatan penyediaan terminal, moda transportasi dan perlengkapan jalan; 9. Penataan, pengendalian pembangunan perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman; 10. Menjalin kerjasama investasi antar daerah dan investor, serta meningkatkan kemudahan berinvestasi; 11. Mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi diversifikasi pangan; 12. Pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan; 13. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro; 14. Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja; 15. Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di Perusahaan; 16. Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana; 17. Peningkatan kinerja penataan ruang;

Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026
	18. Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan Pendidikan; 2. Meningkatkan minat baca; 3. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan Kesehatan; 5. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Kesehatan; 6. Peningkatan promosi dan preventisi Kesehatan; 7. Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana; 8. Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia; 9. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama; 10. Meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; 11. Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pertandingan olahraga; 12. Pengembangan fasilitasi dan pendampingan usaha pemuda;

Prioritas Pembangunan RKPD 2025	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026
	13. Penguatan penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial; 14. Peningkatan pemberdayaan social.
3. Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak.	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi); 2. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah; 4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik; 6. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

4.2.4. Keselarasan Prioritas, Sasaran Pembangunan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tentunya harus selaras dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang di tunjang Program Pembangunan Daerah Tahun 2025. Keselarasan Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16		
Prioritas 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas												
1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas	1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	83,17	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	64,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	82,63		Peningkatan pelayanan air baku/ air bersih dan sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/ kota	Rumah Tangga	247.888	
		3	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen	96,36		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	96,36		
		4	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80,37	Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Penataan, pengendalian pembangunan perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni yang terlayani	Unit	105	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Persen	82,43		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah	Hektar	154835,3									
5	Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	58,97	Pengembangan sarana prasarana sistem transportasi darat dan air	Peningkatan penyediaan terminal, moda transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Kabupaten Kota	Persen	69,97	Dinas Perhubungan		

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER	
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16	
							dan perlengkapan jalan						
2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	93,43	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	64,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan	Persen	47,93	Dinas Perhubungan	
								Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen	78,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		2	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	78,75	Peningkatan kualitas jaringan irigasi, peningkatan sistem pengendalian banjir, peningkatan sistem prasarana lainnya;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Lahan yang terairi (Ha)	Hektar	21814,31			
3	Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim,.	1	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	880.589	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen				100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		3.396
			3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen				100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		2.175

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
								Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	Dinas Sosial
								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi;	1	Nilai komposit FSVA	Persen	67,21	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi diversifikasi pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Pokok	Kg/kapita/tahun	270,15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	Kg/ Kapita/ Tahun	16,37	
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan	Persen	100	
								Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100	
5	Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,48-5,15	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan. Pengembangan korporasi petani,	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	Ton	953.853	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
									Peningkatan Populasi Ternak	Persen	7,5	Dinas Perikanan dan Peternakan
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Kali/Tahun	2,52	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
							pengembangan prasarana pertanian		Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan	Unit	26	Dinas Perikanan dan Peternakan
								Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Persen	47,01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1780,65	Dinas Perikanan dan Peternakan
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8964,23	
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	42,86	
6	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,25	Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup	Dokumen	97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Unit	2	
								Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3	Persen	100	
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan	Persen	32	

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
									penyuluhan lingkungan hidup			
								Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persen	100	
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	
7	Peningkatan pengelolaan persampahan	1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	32			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman terhadap jumlah rumah tangga	Persen	28,55	
								Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	59,77	
8	Optimalisasi Penataan Ruang	1	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	73,31	Meningkatkan penataan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing	Peningkatan kinerja penataan ruang.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	Persen Persen	57,69 77,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
9	Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata	1	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	9,44-10,13	Mengembangkan pariwisata unggulan daerah	Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, prasarana penunjang kegiatan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Persen	50	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		2	Kunjungan wisata	Orang	1.207.500			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan	Lokasi	3	
10	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	6,37-8,28	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Meningkatkan sarana dan prasarana, promosi, keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	88,89	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		2	Tingkat Stabilisasi Sektor Perdagangan	Persen	100			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Persen	80	
		3	Persentase Koperasi Modern	Persen	5,98			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	79,68	
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	Persen	80,08	
11	Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	16	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan digitalisasi promosi dan pemasaran produk UMKM	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Karya	14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Orang	585	

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
		2	Jumlah Usaha Mikro Yang Berkembang	Unit Usaha	15.338			Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro	Persen	32,09	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
								Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	4,32	
12	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;	1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	8,04-9,23			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan	Persen	90	
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	Persen	10,29			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri	Dokumen	1	
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen	93	
13	Peningkatan nilai Investasi Daerah	1	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	12	Perluasan jaringan investasi	Menjalin kerjasama investasi antar daerah dan investor, serta meningkatkan kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal	Persen	57,89	
								Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi di Sumedang	Persen	30	
Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing												
1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9-9,10	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen	96,89	Dinas Pendidikan
									Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	Persen	96,27	
									Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun	Persen	83,47	

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER			
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16			
									dalam Pendidikan kesetaraan						
									Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	97,14				
								Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	Persen	94,33				
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07-13,17		Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen	96,89				
									Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	Persen	96,27				
									Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	83,47				
									Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	97,14				
									Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK penggerak	Persen		30		
		2	Peningkatan literasi digital masyarakat	3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Poin	12,74	Meningkatkan minat baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca		Persen	70,6	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
		3	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah;	1	Angka Harapan Hidup (AHH)		Tahun	73,24-73,63	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,23

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER		
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16		
4	Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting;	1	Ratio Kematian Ibu	Rasio	85				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar	Persen	88			
		2	Ratio Kematian Bayi	Rasio	0,012				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Persen	65			
		3	Prevalensi Stunting	Persen	7				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Persen		88	
								Peningkatan promosi dan prevensi kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persen		36	
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen		76,27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen		8,98	
					Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi	Persen	88	Dinas Kesehatan				
5	Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	1	Gini Ratio	Poin	0,35-0,32	Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penguatan penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS	Persen	78,02	Dinas Sosial		
		2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	38,18-40,24									
6	Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,43-7,40									

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER		
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16		
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	Persen	85					dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar					
								Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100			
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Persen	100			
								Peningkatan pemberdayaan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	Persen		62,83	
									Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen		16,25	
									Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan kelompok ketahanan yang aktif	Persen		60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								7	Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	1	Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)		Poin	
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pemberdayaan	Persen	66,13			

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
		2	Indesk Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,29-95,16		Perlindungan perempuan anak dan lansia		Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan			
								Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsip Gender	Persen	75	
								Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Persen	42	
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen	100	
								Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan	Persen	0,026	
8	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi	1	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	6,75-5,94	Pelayanan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	21,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	200		
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	25,17	
9	Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan	2	Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar	OPK	11	Penerapan nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan,	Meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase OPK yang dikembangkan	Persen	73	Dinas Pariwisata, kebudayaan,

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
	pemanfaatan Kebudayaan.		budaya yang dikelola secara terpadu			pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya yang patut untuk di reaktualisasi.	budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	persen	50	Kepemudaan dan Olahraga
								Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	19	
10	Peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47	Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	Pengembangan fasilitas dan pendampingan usaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata	Orang	96.682	
11	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga publik	2	Jumlah prestasi olahraga yang di Raih dalam satu tahun	Orang	20		Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pertandingan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	21	
Prioritas 3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak												
1	Pemerataan Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	Persen	89	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
		2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	Persen	87				Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	Persen	87	
2		1		Persen	98							

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER	
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16	
	Peningkatan literasi digital aparatur	1	Persentase ASN yang berkinerja baik						Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	88	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
									Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	98		
								Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persen	80		
3	Peningkatan Pendapatan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	25,9	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	45,15	Badan Pendapatan Daerah	
4	Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang bebas Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,35	Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen	93	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
									Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Persen		85
									Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen		99

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
									Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
								Persentase Kepemilikan KK	Persen	99		
								Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	99	
									Persentase Kepemilikan Akte Kematian	Persen	50	
									Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim	Persen	63	
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Instansi	52	
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	
5	Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta peningkatan Ekosistem Inovasi Daerah	1	Indeks inovasi daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah	Persen	98,52	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi	Persen	91,81			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan	Persen	95,39	

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER	
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16	
6	Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,51				dan Pembangunan Manusia				
		2	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori / Skor	A (82)				Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	85,49		
									Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	92,21		
		3	Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,78				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi	Persen	91,81	
										Indeks inovasi daerah	Kategori	sangat inovatif	
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Waktu	Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
										persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas	Persen	98	
										persentase Ketepatan Penyampaian LKPD	Persen	100	
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Persen	93	
									Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan	Persen	100	Sekretrariat Daerah

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	16
									Pemerintahan dan Kewilayahan			
		4	Maturitas SPIP	Level	4	Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	80	Inspektorat Daerah
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	80	
7	Peningkatan Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,8	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa	Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Program Penataan Desa	Persentase desa yang tertata	Persen	30	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
								Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	Persen	0,74	
								Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentasi Desa Tertib Administrasi sesuai aturan	Persen	68,52	
		2	Presentase Status Desa Mandiri dengan optimalisasi potensi desa	Persen	68,52	Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Persen	80	
8	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	Persen	93	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan	Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	Persen	89	Satuan Polisi Pamong Praja
									Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	Persen	93	

PRIORITAS/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
				kerukunan hidup bermasyarakat			Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT)	Rasio	0,89	
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Pesen	100	26 Kecamatan
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	95,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Orang	100	
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Orang	210	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani	Potensi Konflik	13	

Sumber: Hasil Analisis, BAPPPEDA Kabupaten Sumedang (2025)

4.2.5. Prioritas Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :



Gambar 4.1 Prioritas Nasional Tahun 2025
(Sumber : Kementrian PPN/Bapenas, Tahun 2024)

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Rincian sasaran dari masing-masing Prioritas Nasional/Agenda Pembangunan (AP) Nasional Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Asia Power Index (Military Capability) Asia Power Index (Diplomatic Influencea) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Indeks Ketahanan Energi Kapasitas tampungan air (m3/kapita) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Indeks Ekonomi Hijau Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Timbulan sampah terolah di fasilitas Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) Rasio Kewirausahaan (%) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) Rasio PDB Pariwisata (%) Devisa Pariwisata (miliar USD) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
		Aset Perbankan/PDB (%) Aset Dana Pensiun/PDB (%) Aset Asuransi/PDB (%) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) Total Kredit/PDB (%) Inklusi Keuangan (%)
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) c. Harapan lama sekolah (tahun) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Usia Harapan Hidup (tahun) Kesehatan Ibu dan Anak : a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
		Biaya Logistik (% PDB)
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)
		Persentase desa mandiri (%)
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)
		Indeks Integritas Nasional
		Indeks Materi Hukum
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Indeks Persepsi Korupsi
		Indeks Pembangunan Hukum
		Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)
		Tingkat Inflasi (%)
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Sumber : Kementerian PPN/Bapenas, Tahun 2024

Prioritas Kabupaten Sumedang Tahun 2025 perlu memperhatikan Prioritas Nasional Tahun 2025 agar terjadi sinergitas dalam pembangunan. Keterhubungan antara Prioritas RKP Tahun 2025 dan Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Hubungan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Asia Power Index (Military Capability)	
		Asia Power Index (Diplomatic Influencea)	
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	PD 3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas
		Indeks Ketahanan Energi	
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	PD 3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak
	PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas		
Indeks Ekonomi Hijau			

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Timbulan sampah terolah di fasilitas Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) Rasio Kewirausahaan (%) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) Rasio PDB Pariwisata (%) Devisa Pariwisata (miliar USD) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) Aset Perbankan/PDB (%) Aset Dana Pensiun/PDB (%) Aset Asuransi/PDB (%) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) Total Kredit/PDB (%) Inklusi Keuangan (%)	PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) c. Harapan lama sekolah (tahun)	PD 2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Usia Harapan Hidup (tahun) Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) Biaya Logistik (% PDB)	PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi,	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
	dan Pemberantasan Kemiskinan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	<p>PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas</p> <p>PD 3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak</p> <p>PD 1 : Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas</p>
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	
		Persentase desa mandiri (%)	
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	<p>PD 3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak</p>
		Indeks Integritas Nasional	
		Indeks Materi Hukum	
		Indeks Pelayanan Publik	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Indeks Persepsi Korupsi	
		Indeks Pembangunan Hukum	
		Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	
		Tingkat Inflasi (%)	
8	Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	<p>PD 2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing</p>
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	

Sumber: Bappppeda, Hasil olah Tahun 2024

Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran Prioritas Nasional beserta indikator Sasaran Pembangunan Daerah dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional perlu di selaraskan agar tercipta sinergitas antara pembangunan nasional dan daerah. Secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.9 Hubungan Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025

SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	
SN.1.1	Indeks Demokrasi Indonesia	SP-3.2	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah
SN.2.1	Asia Power Index (Military Capability)		
SN.2.2	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		
SN.2.3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	SP-3.2	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah
SN.2.4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	SP-1.4	Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi;
SN.2.5	Indeks Ketahanan Energi		
SN.2.6	Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)	SP-1.1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas
		SP-1.2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur
SN.2.7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	SP-1.1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas
		SP-1.2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur
SN.2.8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	SP-1.1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas
		SP-1.2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur

SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	
SN.2.9	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	SP-3.4	Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
		SP-2.11	Peningkatan literasi digital masyarakat
		SP-3.8	Peningkatan literasi digital aparatur
		SP-1.11	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan
SN.2.10	Indeks Ekonomi Hijau	SP-1.5	Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan
SN.2.11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
SN.2.12	Timbulan sampah terolah di fasilitas	SP-1.7	Peningkatan pengelolaan persampahan
SN.2.13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	SP-1.6	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
		SP-1.8	Optimalisasi Penataan Ruang
SN.2.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	SP-1.6	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
		SP-1.8	Optimalisasi Penataan Ruang
SN.2.15	Persentase Penurunan Emisi GRK	SP-1.3	Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim;
	- Tahunan (%)		
	- Kumulatif (%)		
SN.3.1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	SP-1.10	Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif
SN.3.2	Rasio Kewirausahaan (%)	SP-1.11	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan
SN.3.3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		

SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	
SN.3.4	Rasio PDB Pariwisata (%)	SP-1.9	Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata
SN.3.5	Devisa Pariwisata (miliar USD)		
SN.3.6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	SP-1.10	Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif
SN.3.7	Aset Perbankan/PDB (%)		
SN.3.8	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
SN.3.9	Aset Asuransi/PDB (%)		
SN.3.10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	SP-1.13	Peningkatan nilai Investasi Daerah
SN.3.11	Total Kredit/PDB (%)		
SN.3.12	Inklusi Keuangan (%)		
SN.4.1	Hasil Pembelajaran:	SP-2.1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
	a. Rata-rata nilai PISA		
	i. Membaca		
	ii. Matematika		
	iii. Sains		
b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)			
c. Harapan lama sekolah (tahun)			
SN.4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
SN.4.3	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
SN.4.4	Tingkat Penguasaan Iptek:	SP-3.6	Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta peningkatan Ekosistem Inovasi Daerah
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global		
SN.4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	SP-1.7	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi
SN.4.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		

SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	
SN.4.7	Usia Harapan Hidup (tahun)	SP-2.2	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah;
SN.4.8	Kesehatan Ibu dan Anak : a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	SP-2.3	Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting;
SN.4.9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	SP-2.2	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah;
SN.4.10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		
SN.4.11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	SP-2.6	Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga
SN.4.12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
SN.5.1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	SP-1.10	Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif
SN.5.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		
SN.5.3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	SP-1.11	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan
SN.5.4	Biaya Logistik (% PDB)		
SN.6.1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	SP-2.5	Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		SP-2.4	Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
SN.6.2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	SP-1.7	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi
SN.6.3	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
SN.6.4	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		
SN.6.5	Persentase desa mandiri (%)	SP-3.3	Peningkatan Kemandirian Desa

SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	
SN.6.6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	SP-1.1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas
		SP-1.2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur
SN.6.1	Return on Asset (ROA) BUMN (%)		
SN.7.1	Indeks Integritas Nasional	SP-3.5	Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien
SN.7.2	Indeks Materi Hukum	SP-3.2	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah
SN.7.3	Indeks Pelayanan Publik	SP-3.4	Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
SN.7.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
SN.7.5	Indeks Persepsi Korupsi	SP-3.5	Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien
SN.7.6	Indeks Pembangunan Hukum	SP-3.2	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah
SN.7.7	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	SP-3.7	Peningkatan Pendapatan Daerah
SN.7.8	Tingkat Inflasi (%)		
SN.8.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	SP-2.8	Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan.
SN.8.2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
SN.8.3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	SP-1.3	Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim;.
		SP-2.4	Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Sumber: Bappppeda, Hasil olah Tahun 2024

Tabel 4.10 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Indeks Demokrasi Indonesia	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
Asia Power Index (Military Capability)	
Asia Power Index (Diplomatic Influencea)	
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Peningkatan Ketersediaan Energi (Kalori)
Indeks Ketahanan Energi	
Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	
Indeks Ekonomi Hijau	
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	
Timbulan sampah terolah di fasilitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase Penurunan Emisi GRK	
- Tahunan (%)	
- Kumulatif (%)	
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Jumlah Usaha Mikro Yang Berkembang
Rasio Kewirausahaan (%)	
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Persentase koperasi modern

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Rasio PDB Pariwisata (%)	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Devisa Pariwisata (miliar USD)	
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan
Aset Perbankan/PDB (%)	
Aset Dana Pensiun/PDB (%)	
Aset Asuransi/PDB (%)	
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	
Total Kredit/PDB (%)	
Inklusi Keuangan (%)	
Hasil Pembelajaran:	
a. Rata-rata nilai PISA	
i. Membaca	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD (Persen)
ii. Matematika	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP (Persen)
iii. Sains	
b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
c. Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar
	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama
Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	
Tingkat Penguasaan Iptek:	
a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi
b. Peringkat Indeks Inovasi Global	Indeks inovasi daerah
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran terbuka
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
Usia Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (AHH)
Kesehatan Ibu dan Anak :	

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Ratio Kematian Ibu
	Ratio Kematian Bayi
b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Persentase OPD Responsip Gender
	Indeks Pembangunan Pemuda
Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	
Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir
Biaya Logistik (% PDB)	
Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	
Persentase desa mandiri (%)	Persentase Status Desa Mandiri dengan optimalisasi potensi desa

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Rasio Rumah Layak Huni
Return on Asset (ROA) BUMN (%)	
Indeks Integritas Nasional	
Indeks Materi Hukum	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks Persepsi Korupsi	Maturitas SPIP
Indeks Pembangunan Hukum	
Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tingkat Inflasi (%)	
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Persentase Penanganan Pasca Bencana
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sumber: Bappppeda, Hasil olah Tahun 2024

Selain keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Indikator sasaran Pembangunan Nasional perlu juga di selaraskan antara Program Prioritas nasional dan Program Pembangunan Daerah sebagai bentuk sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah. Secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.11 Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan perumusan kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
		Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p>	<p>Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</p>	
		<p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	
		<p>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Pokok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pergudangan Dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Cadangan Pangan	
		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	
		Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan daerah rawan pangan	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan keamanan pangan segar	
		Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Indeks Pertanian (IP)	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun/ Direhabilitasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas lahan yang terairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	
		Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Spald) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman terhadap jumlah rumah tangga	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	
		Penyediaan Sarana Pendukung Tpa/Tpst/Spa/Tps-3r/Tps	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	
		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah terkelola	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di Tpa/Tpst/Spa Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	
		Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah Tps3r, Pdu, Tpst, Tps, Spa, Psel/Pltsa, Rdf, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
		Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
		Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tpst Kabupaten/Kota Atau Tpa/Tpst Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pemantauan Dan Evaluasi Klhs	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	
		Penyelenggaraan Klhs Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup	
		Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil uji laboratorium dan dokumen hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
		Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	
		Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas areal diluar kawasan hutan yang menjaga kelestarian keanekaragaman hayati	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan verifikasi perizinan berusaha penyimpanan sementara Limbah B3	
		Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	
		Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, verifikasi dan sinkronisasi perizinan berusaha pengumpulan Limbah B3	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang	
		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	
		Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	
		Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA terkelola	
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	
		Penguatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	
		Pengelolaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Habitatnya Di Tahura Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	
		Pengamanan Kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	
		Pemulihan Ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	
		Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase ketersediaan RTR	
			Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kab/Kota	Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR	
		Penetapan Rencana Rtrw Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	
		Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/kota	
		Penyusunan Rdtr Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro	Dinas Koperasi, UKM,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
	Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang dilakukan Pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan Basis Data Usha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
		Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Usaha Mikro	Jumlah SDM Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Program Pengembangan Umkm	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	
		Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		Produksi Dan Pengolahan , Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam`	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Koperasi yang direkomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang direkomendasi penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang,	
		Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	
		Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
		Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase minimal pemberian insentif/Kemudahan penanaman modal	DPMPPTSP
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	
		Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi di Sumedang	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM	
		Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	
		Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pengelola data dan informasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengolahan Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelola	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
		Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Perencanaan Dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Yang Dikelola	
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
		Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	
		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah Yang Dipromosikan	
		Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Kepariwisataaan Daerah	
		Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Peningkatan Kerja Sama Dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
		Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAK	
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi Dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengembangan Dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	
		Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
		Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi Dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
		Pengembangan Kapasitas Sdm Pariwisata Berbasis Skkni	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	
		Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
	Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	
		Peembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
		Pembangunan Sarana Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	
		Pembinaan Minat Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
		Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		Koordinasi Perencanaan Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Tersedianya Dara Peserta Didik	
		Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terselenggaranya Pendampingan	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
		Pembangunan Sarana Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
		Pembinaan Minat Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		Koordinasi Perencanaan Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Tersedianya Data Peserta Didik	
		Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terselenggaranya Pendampingan	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Paud	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	
		Pengadaan Perlengkapan Paud	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Paud	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Paud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	
		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Paud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bop Paud	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		Koordinasi Perencanaan Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Tersedianya Dara Peserta Didik	
		Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terselenggaranya Pendampingan	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan	
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
		Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bop Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
		Bimbingan Teknis Pelatihan Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Pengelolaan kurikulum sekolah Paud dan Pendidikan Non Formal	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK penggerak	
		Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar Paud Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kebutuhan pengawas dan Penilik	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar Paud Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dinas Kesehatan
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar Paud Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ratio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	
			Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi sarana sesuai standar	
		Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Klb)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Malaria	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah menyelenggarakan SIK terintegrasi	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rumah Sakit yang memiliki ijin operasional	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	
		Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktek tenaga kesehatan yang memiliki izin	
		Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar	
		Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdayamanusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Profesional dan memenuhi standard kompetensi	
		Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	Persentase Layanan Pengelolaan Obat Publik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Produksi Pangan Rumah Tangga Yang Memiliki Sertifikat	
		Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Yang dibina	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Hasil Penelitian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
			indeks inovasi daerah	
		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
		Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
		Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
		Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
		Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
		Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Potensi Pemuda</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</p> <p>Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan</p> <p>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan</p>	<p>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p>

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya sebagai pemuda di tingkat kabupaten/kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	
		Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/lembaga kepemudaan yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemuda	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Dan Pengawasan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang diikuti Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
		Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	
		Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pembentukan Dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu Di Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	
		Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi/lembaga keolahragaan yang difasilitasi	
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	
		Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan organisasi keolahragaan yang diberdayakan.	
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
		Pemassalan Olahraga Dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Yang Berjenjang Dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah, Nasional, Dan Internasional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsip Gender	DINAS PENGENDALIAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pug	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyelenggaraan Pug Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG			
Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pug Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Pengelola Organisasi Kemasyarakatan/Profesi/Dunia Usaha/Media yang mengikuti Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Korban kekerasan	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga bagi perempuan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Kg Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Peresentase Ketersedian Data Gender dan Anak	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pendampingan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Sdm Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Dan Penanganan Bagi Ampk Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	
		Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	
		Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
		Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	
		Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	
		Penyelenggaraan Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan	DINAS KOPERASI, UKM, PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Kegiatan: Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (Stpw) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (Stpw) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	Persentase fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (Stpw) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (Stpw) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Persentase fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk	
	Pengecer dan Penjual Langsung Minuman			
	Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian dokumen hasil pengendalian dan pengawasan bahan berbahaya	
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 Dan Pa-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (Pa-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
		Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan distribusi perdagangan yang dibina	
		Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan pelaku usaha yang mengikuti pameran	
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi dan pemasaran UMKM	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail,	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase penyelesaian dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri	
		Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase dokumen evaluasi rencana pembangunan industri	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi saran teknis yang diterbitkan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (Oss Rba)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional	
		Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipu, Iuk Dan Ipk Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Siinas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
		Pemantauan Dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data Ke Siinas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	
		Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Luas Panen Komoditas Pertanian	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Penataan Desa	Prosentase desa yang tertata	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa Yang Menerima Penataan Desa	
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yg terfasilitasi	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase dokumen kerjasama antar desa	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentasi Desa Tertib Administrasi sesuai aturan	
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Fasiltasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
		Pembinaan Pemeberdayaan Bumdesa Dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Perberdayaan BUM Desa dan Lenbaga Kerja Sama antar Desa	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaam Aset Desa	
		Penyelenggaraan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD yang Aktif)	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Persentase Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan ,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemsyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,Rw,Pkk,Pos Yandu ,Lpm Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya.	
		Fasilitasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemeritahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
		Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
		Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</p> <p>Penyediaan Permakanan</p> <p>Penyediaan Sandang</p>	<p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial</p> <p>Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten Kota</p>	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv / Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima Bantuan Sosial	
		Pemberian Layanan Data Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten Kota	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv / Aids Dan Napza	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat (DTKS) yang menerima Jaminan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang didata	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	
		Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	DINAS PERUMAHAN,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		<p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p> <p>Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Psu</p> <p>Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p>	<p>Jumlah Luas Kawasan Kumuh yang ditangani</p> <p>Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</p> <p>Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh yang dicegah</p> <p>Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</p>	<p>KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG</p>

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti Presentase penurunan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
		Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apip	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase penurunan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	
		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pemenuhan elemen : pengelolaan SDM, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
			hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.	
		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	
		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	
		Pendampingan Dan Asistensi	Presentase pemenuhan elemen peran dan layanan	
		Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
		Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pendapatan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	
		Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
		Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	
		Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
		Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan pengawasan Pajak daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	DPMPTSP
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	
		Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Terbit Tepat Waktu (Maksimal 5 hari kerja)	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
		Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun 2. Persentase Kepemilikan Akte Kematian 3. Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan Non Muslim	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
		Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Pencatatan Sipil	
		Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 2. Persentase kepemilikan KK 3. Perekaman KTP elektronik	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Layananan Pendaftaran Penduduk	
		Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Mendapatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	
		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah	
		Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Spbe Di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
		Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
		Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	
		Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Spbe	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Data Pembangunan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks KAMI	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	
1	2	3	4	7	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumd Dan Blud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
		Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai	Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Presentase OPK yang dikembangkan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Kesenian Tradisional yang dikembangkan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga Adat yang dibina	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian Tradisional yang dikembangkan	
		Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dibina	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Direvitalisasi dan Di Inventarisasi	
		Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan	
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan peringkat Kabupaten/Kota			
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola peringkat Kabupaten/Kota			
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Pengunjung Museum			
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola			
Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan			
	Bina Mental Spiritual			
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima Bantuan Sosial			
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Kampung yang melaksanakan Pemberdayaan Kesiapsiagaan bencana	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	
		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	7
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Analisis, Bapppeda 2025

4.2.6. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 bahwa Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”**.

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerataan pembangunan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat diarahkan pada keberlanjutan fokus pembangunan pada tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan keunggulan serta kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Sehingga pada Tahun 2025 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata;
2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penataan Daerah dan Stabilitas Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan;

Analisis hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	P1: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas
	P2: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing
2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	P2: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	P2: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	P1: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	P1: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P3: Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak.

Sumber: Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025

Selain analisis hubungan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025, perlu juga untuk menyelaraskan Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah dengan dukungan Rencana Pendanaan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	P1: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Pokok
			2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu
			3	Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan
			4	Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
			5	Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian
			6	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			Peningkatan Populasi Ternak
			7	Peningkatan pengelolaan persampahan	4		Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
			8	Optimalisasi Penataan Ruang		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan
			9	Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata	5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan
			10	Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif	6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			11	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan			Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
			12	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri	7	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan
			13	Peningkatan nilai Investasi Daerah	8	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani
		P2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing	1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan	9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Poduksi Perikanan Tangkap
			2	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah	10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
			3	Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting	11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Perairan Umum Darat yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya
			4	Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;	12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			5	Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Lahan yang terairi
			6	Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga;	14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal
			7	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi;	15	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi di Sumedang
			8	Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan;	16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP
			9	Peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan;	17	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota
			10	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga publik;	18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
			11	Peningkatan literasi digital masyarakat.	19	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan
					20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI
					21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan
					22	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri
					23	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan
					24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
					25	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
					26	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Program Prioritas Daerah		Indikator Program
				27	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar
				28	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang
				29	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
						Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
				30	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
				31	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
				32	Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro
				33	Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
					34	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
					35	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian
					36	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan
					37	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif
2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	P2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing	1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan;	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD
		2	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah;	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP			
		3	Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting;	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan			

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Program Prioritas Daerah	Indikator Program		
3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah		4	Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	
			5	Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka
			6	Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga;	3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK penggerak
			7	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi;	4	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase OPK yang dikembangkan
			8	Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan;	5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan
			9	Peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan;	6	Program Pembinaan Sejarah	Presentase sejarah lokal yang direvitalisasi dan inventarisasi
			10	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga publik;	7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
			11	Peningkatan literasi digital masyarakat.			
			1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
						Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat</p> <p>Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi</p> <p>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</p> <p>Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar</p>
					2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi
					3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar
					4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	P1: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas.	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan sosial
			2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur			Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			3	Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim;.	2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar
			4	Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi;	3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar
			5	Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan;	4	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
			6	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			7	Peningkatan pengelolaan persampahan			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			8	Optimalisasi Penataan Ruang	5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
			9	Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata;	6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
			10	Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif;	7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR
		11	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan;	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang			
		12	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;				

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
			13	Peningkatan nilai Investasi Daerah.			
5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	P1: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	1	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas.	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota
			2	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi
			3	Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim;	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
			4	Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi;	4	Program Pengembangan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata
			5	Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan;			
			6	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;	5	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni yang terlayani

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Program Prioritas Daerah	Indikator Program
			7 Peningkatan pengelolaan persampahan	6 Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani
			8 Optimalisasi Penataan Ruang	7 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah
			9 Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata;	8 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
			10 Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif;	9 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
			11 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan;	10 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup
			12 Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;	11 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan
			13 Peningkatan nilai Investasi Daerah.	12 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
					13	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang
					14	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
					15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten Kota
							Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan
6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P3 : Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak.	1	Pemerataan Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN;	1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik
			2	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah;			Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
			3	Peningkatan Kemandirian Desa;			Persentase Kepemilikan KK
			4	Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;	2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
			5	Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien;			Persentase Kepemilikan Akte Kematian
			6	Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien;			Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim
			7	Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta peningkatan Ekosistem Inovasi Daerah;	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi
			8	Peningkatan Pendapatan Daerah;	4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik
			9	Peningkatan literasi digital aparatur.	5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah
					6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran
							persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas
							Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Program Prioritas Daerah		Indikator Program
				7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti
				8	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan
			Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan			
			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi			
			Persentase ASN yang berkinerja baik			
				9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi
			Indeks inovasi daerah			
				10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani
				11	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

No.	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025		Program Prioritas Daerah		Indikator Program
					12	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					13	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman) Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT)

Sumber: Hasil Olah, Bapppeda tahun 2025

4.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam mengimplementasikan pendekatan partisipatif pada penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dilakukan proses penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah merumuskan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput sebanyak 153 usulan, berdasarkan hasil verifikasi usulan dikembalikan/ditolak sebanyak 59 usulan dan hasil verifikasi Perangkat Daerah sebanyak 93 usulan.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dan yang telah dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, maka terpetakan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, antara lain:
 - Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Antara lain:
 - a. Penanganan infrastruktur Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Strategis;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - d. Pembangunan Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
 - b. Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Antara lain:

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), meliputi Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan Perdesaan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Antara lain:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, meliputi:
 - Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian;

- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- b. Penyediaan Bibit/bakalan Ternak kepada Kelompok Ternak dan Pengadaan Obat-obatan Ternak dan Pelayanan Pengobatan Ternak
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Antara lain:
- a. Pemeliharaan Makam Keramat;
 - b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata;
 - c. Pengembangan obyek wisata;
 - d. Pembinaan SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:
- Pembinaan dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD tentunya harus sinergi dan mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

NO	PRIORITAS	POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD
1.	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan infrastruktur Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Strategis; b. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan; c. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi; d. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), meliputi Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan Perdesaan; e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu); f. Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan. g. Pembangunan Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu; h. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan. i. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian; j. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani k. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani l. Pemeliharaan Makam Keramat; m. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata; n. Pengembangan obyek wisata;
2.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan b. Pembinaan SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

NO	PRIORITAS	POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD
3.	Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target Pembangunan Nasional.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 juga telah mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah menyelaraskan dengan visi, misi serta program Kepala Daerah terpilih.

5.1. Kerangka Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Kerangka pendanaan daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan berbagai sumber pendanaan yaitu melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN (DAK) yang didalamnya mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami

perubahan dan maupun yang tidak mengalami perubahan, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6 = (5-3)
1	Dinas Pendidikan	1.222.817.556.063,00	967.540.383.997,00	1.031.977.779.997,00	(190.839.776.066,00)
2	Dinas Kesehatan	475.752.373.105,00	256.293.006.304,00	298.272.183.962,00	(177.480.189.143,00)
	<i>BLUD Puskesmas</i>	<i>72.260.190.034,00</i>	<i>99.823.903.034,00</i>	<i>115.003.404.299,00</i>	<i>42.743.214.265,00</i>
	<i>Laboratorium Kesehatan Daerah</i>	<i>1.050.000.000,00</i>	<i>1.050.000.000,00</i>	<i>1.885.182.915,00</i>	<i>835.182.915,00</i>
	<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>323.703.627.248,00</i>	<i>269.491.945.078,00</i>	<i>271.694.363.688,00</i>	<i>(52.009.263.560,00)</i>
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	701.009.244.546,50	92.589.615.124,00	199.190.929.405,00	(501.818.315.141,50)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.298.341.918,00	25.303.943.841,00	73.764.140.291,00	9.465.798.373,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	41.522.954.420,00	19.943.209.629,00	22.699.032.178,87	(18.823.922.241,13)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.651.317.962,00	7.098.290.636,00	9.828.374.988,00	(4.822.942.974,00)
7	Dinas Sosial	26.685.744.336,00	14.396.965.220,00	13.560.687.170,00	(13.125.057.166,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.796.699.008,00	12.107.032.290,00	15.282.547.490,00	485.848.482,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.068.873.293,96	32.299.573.406,00	38.302.734.256,00	1.233.860.962,04
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.074.924.200,00	9.827.868.224,00	12.850.992.624,00	(5.223.931.576,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.254.304.983,00	15.659.830.334,00	18.237.851.399,00	(5.016.453.584,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.963.468.593,00	27.954.883.711,00	28.106.138.661,00	(29.857.329.932,00)
13	Dinas Perhubungan	74.462.696.444,00	30.809.362.148,00	39.901.616.846,00	(34.561.079.598,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	19.952.736.856,00	17.533.878.046,00	21.229.642.146,00	1.276.905.290,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	35.431.141.672,00	13.731.742.370,00	19.438.281.679,00	(15.992.859.993,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.837.925.958,00	8.793.125.217,00	8.793.125.217,00	(3.044.800.741,00)
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12.557.497.868,00	9.120.069.643,00	11.530.077.243,00	(1.027.420.625,00)
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	43.772.717.984,00	21.494.124.197,00	24.748.545.247,00	(19.024.172.737,00)
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	36.085.772.508,00	16.544.334.090,00	24.930.723.890,00	(11.155.048.618,00)

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6 = (5-3)
	Kepemudaan dan Olah Raga				
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	127.858.738.261,00	51.899.345.078,00	63.991.051.328,00	(63.867.686.933,00)
21	Sekretariat Daerah	101.579.346.789,00	72.014.231.334,00	110.159.995.610,00	8.580.648.821,00
22	Sekretariat DPRD	87.271.149.345,00	80.749.480.929,00	89.304.904.829,00	2.033.755.484,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.377.874.804,00	16.650.027.717,00	19.225.855.484,00	(3.152.019.320,00)
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	576.142.812.837,00	556.567.605.851,00	580.493.083.560,00	4.350.270.723,00
25	Badan Pendapatan Daerah	49.593.706.358,00	23.482.715.166,00	30.768.126.456,00	(18.825.579.902,00)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.556.143.778,00	15.406.098.566,00	14.826.726.706,00	(14.729.417.072,00)
27	Inspektorat Daerah	24.737.967.660,00	27.084.191.364,00	32.695.767.925,00	7.957.800.265,00
28	Kecamatan Wado	5.301.871.098,00	3.230.235.061,00	3.158.085.211,00	(2.143.785.887,00)
29	Kecamatan Jatinunggal	4.672.617.930,00	3.567.872.800,00	3.542.337.500,00	(1.130.280.430,00)
30	Kecamatan Darmaraja	5.928.569.635,00	3.657.524.712,00	3.722.981.403,00	(2.205.588.232,00)
31	Kecamatan Cibugel	4.685.165.381,00	3.206.740.101,00	3.280.872.164,00	(1.404.293.217,00)
32	Kecamatan Cisitu	4.924.734.152,00	3.138.046.802,00	3.355.749.802,00	(1.568.984.350,00)
33	Kecamatan Situraja	5.553.899.350,00	3.845.841.587,00	3.913.053.287,00	(1.640.846.063,00)
34	Kecamatan Conggeang	5.403.842.915,00	3.728.293.620,00	4.077.867.342,00	(1.325.975.573,00)
35	Kecamatan Paseh	5.081.452.244,00	3.460.120.453,00	3.558.687.053,00	(1.522.765.191,00)
36	Kecamatan Surian	4.461.599.864,00	3.369.194.298,00	3.336.088.598,00	(1.125.511.266,00)
37	Kecamatan Buahdua	4.807.336.579,00	3.399.134.173,00	3.600.810.453,00	(1.206.526.126,00)
38	Kecamatan Tanjungsari	6.596.333.680,00	3.790.798.672,00	3.837.682.172,00	(2.758.651.508,00)
39	Kecamatan Sukasari	5.160.586.940,00	3.831.110.133,00	4.118.056.383,00	(1.042.530.557,00)
40	Kecamatan Pamulihan	4.972.733.228,00	3.644.392.126,00	3.541.918.476,00	(1.430.814.752,00)
41	Kecamatan Cimanggung	6.531.236.594,00	3.709.634.605,00	3.995.771.006,00	(2.535.465.588,00)
42	Kecamatan Jatinangor	5.790.920.228,00	3.886.669.510,00	3.790.173.410,00	(2.000.746.818,00)
43	Kecamatan Rancakalong	4.904.701.220,00	3.301.833.452,00	3.204.846.352,00	(1.699.854.868,00)
44	Kecamatan Sumedang Selatan	8.632.843.268,00	7.158.159.806,00	7.276.151.906,00	(1.356.691.362,00)
45	Kelurahan Pasanggrahan Baru	1.645.000.000,00	986.371.450,00	1.073.582.000,00	(571.418.000,00)
46	Kelurahan Kotakulon	1.593.000.000,00	974.971.450,00	1.015.998.750,00	(577.001.250,00)
47	Kelurahan Regol Wetan	1.431.750.000,00	936.171.450,00	963.380.650,00	(468.369.350,00)
48	Kelurahan Cipameungpeuk	1.460.000.000,00	921.171.450,00	1.003.342.850,00	(456.657.150,00)
49	Kecamatan Sumedang Utara	7.984.353.044,00	6.221.557.751,00	6.280.947.201,00	(1.703.405.843,00)
50	Kelurahan Kotakaler	1.520.000.000,00	970.371.400,00	864.190.200,00	(655.809.800,00)

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6 = (5-3)
51	Kelurahan Situ	1.752.000.000,00	1.043.571.400,00	943.506.150,00	(808.493.850,00)
52	Kelurahan Talun	1.276.000.000,00	897.371.400,00	805.561.350,00	(470.438.650,00)
53	Kecamatan Ganeas	4.762.991.196,00	3.671.161.589,00	3.883.636.039,00	(879.355.157,00)
54	Kecamatan Tanjungkerta	4.611.040.756,00	3.365.136.016,00	3.259.501.516,00	(1.351.539.240,00)
55	Kecamatan Tanjungmedar	4.417.483.728,00	3.021.657.700,00	3.029.329.600,00	(1.388.154.128,00)
56	Kecamatan Cimalaka	5.442.765.282,00	3.854.015.959,00	3.819.555.759,00	(1.623.209.523,00)
57	Kecamatan Cisarua	4.698.183.184,00	3.241.622.198,00	3.225.601.098,00	(1.472.582.086,00)
58	Kecamatan Tomo	4.548.336.668,00	3.079.921.756,00	3.273.681.256,00	(1.274.655.412,00)
59	Kecamatan Ujungjaya	6.462.426.246,00	4.176.727.098,00	4.331.033.598,00	(2.131.392.648,00)
60	Kecamatan Jatigede	5.073.987.460,00	3.181.053.524,00	3.233.129.274,00	(1.840.858.186,00)
61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.921.497.471,00	11.961.976.416,00	12.831.471.716,00	(6.090.025.755,00)
JUMLAH		4.519.139.108.173,46	2.929.691.214.462,00	3.361.842.449.014,87	(1.157.296.659.158,59)

Sumber: BKAD dan BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

5.2. Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Rincian Rencana belanja Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan aktivitas sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil input Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai penjabaran dari Tabel 5.2 baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Tabel 5.3 Usulan Bantuan Keuangan Desa dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	2583114	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Masih adanya jalan Rusak dan berlubang yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.	Penanganan Jalan Desa Cibitung - Bojongloa	Desa Cibitung, Kab. Sumedang	Buahdua	Cibitung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	717.687.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2	2583135	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Akibat Bencana Longsor di Blok SD pamoyanan yang memutuskan Jalan Kabupaten Ruas Pamoyanan-Palasari, Kami Telah Membuka akses Jalan Desa Baru, Tapi Jalan Yang Kami Buka Masih Terkendala untuk dilewati karena belum dilakukan lapis penetrasi (Hotmix).	Peningkatan Ruas Jalan Pamoyanan-Palasari Blok SD Pamoyanan	Blok SD Pamoyanan Jalan Pamoyanan-Palasari., Kab. Sumedang	Jatigede	Cipicung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	600.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3	2583315	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	jalan akses menuju lahan panganganan desa belum tersentuh pembangunan	Hotmik Jalan Cucut - Pangangonan	Dusun Cibogo RT 04 RW 04, Kab. Sumedang	Ganeas	Sukaluyu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	150.775.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4	2583585	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	jalan rusak dan masih tanah berbatu sebagian	Penanganan Ruas Jalan Dusun Kadupugur - Dusun Ciseke	Kadupugur - Ciseke, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Mulyasari	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	350.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
5	2583662	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Kantor Desa Cilangkap memerlukan perbaikan/pemeliharaan agar memiliki sarana dan prasarana Kantor Desa yang lebih nyaman dan memadai.	Rehabilitasi Kantor Desa Cilangkap	Dusun Cileungsing Rt:10 Rw:03 Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Kab. Sumedang	Buahdua	Cilangkap	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
6	2583756	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Hotmix Ruas Jalan Dusun Kebonbuah	Peningkatan (Hotmix) Ruas Jalan Desa Dusun Kebonbuah	Dusun Kebonbuah Desa Darmajaya, Kab. Sumedang	Darmaraja	Darmajaya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	325.195.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
7	2583796	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Kurangnya fasilitas ruangan yang menjadi kendala tidak maksimalnya dalam memberikan pelayanan	Rehabilitasi Kantor Desa Cikondang	Dusun Sulambitan Rt 06 Rw 01, Kab. Sumedang	Ganeas	Cikondang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	64.845.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
8	2583848	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Kondisi Gedung kantor Desa Margamukti saat ini kurang memadai. Sehingga pelayanan publik masyarakat terganggu karena para perangkat Desa tidak bisa bekerja dengan aman dan nyaman.	Rehabilitasi Kantor Desa Margamukti	JL. PARIGI - PANYINDANGAN NO.53 DUSUN KEBON KALAPA RT 02 RW 02 , Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Margamukti	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	528.041.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
9	2583861	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Masih berbatu dan Tanah Licin rawan kecelakaan dan menghambat aktifitas Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Rabat Beton Dusun Cihuut	DUSUN CIHUUT RT 04 RW 04, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Margalaksana	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	264.712.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
10	2584068	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Perlu percepatan Pembangunan Rehab Kantor Desa Jatiroke Untuk Meningkatkan kenyamanan Pelayanan Masyarakat Desa Jatiroke	Rehabilitasi Kantor Desa Jatiroke	Dusun Jatisari RT 06 RW 01 Desa Jatiroke, Kab. Sumedang	Jatinangor	Jatiroke	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	350.710.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
11	2584108	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Karena Kantor Desa Cipasang belum memiliki Ruang untuk perangkat Desa, dan selama kegiatan bekerja bila ada kegiatan di berhentikan karena ruangan tersebut di pake, otomatis pekerjaan terganggu.	Rehabilitasi Kantor Desa Cipasang	Dusun Cipasang Rt 02 Rw 01 Desa Cipasang, Kab. Sumedang	Cibugel	Cipasang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	500.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
12	2584113	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Gedung tersebut dirasa masih kurang memadai untuk kegiatan pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik khususnya untuk Masyarakat Desa Mekargalih	Rehabilitasi Kantor Desa Mekargalih	Jl. Bandung - Garut Km.21 Dusun Sirnagalih Rt.03 Rw.10, Kab. Sumedang	Jatinangor	Mekargalih	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	184.108.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
14	2584158	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Kondisi jalan yang sudah rusak	Hotmik Jalan Tonjong - Cipulus	Dusun Tonjong - Cipulus RW 05/06 Desa Pasigaran, Kab. Sumedang	Tanjungsari	Pasigaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	316.516.540,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
15	2584169	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Ruas jalan citatah RT.002 RW.005 perlu mendapatkan penanganan.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Blok	Dusun Citatah RT.002 RW.005,	Pamulihan	Pamulihan	Badan Keuangan dan	1	Paket	89.007.400,00	Belanja Transfer (Bantuan	Analisis Perencanaan dan Penyalura

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
				Citatah RT. 002 RW.005	Kab. Sumedang			Aset Daerah				Keuangan	n Bantuan Keuangan
16	2584200	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Proses rehabilitas pada bangunan kantor desa dilihat dari kondisi bangunan yang sudah sangat memprihatinkan (rusak) sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal	Rehabilitasi Kantor Desa Pasirnanjung	JL. Mayormasnu No,2 Dusun Pangkalan RT1 RW11, Kab. Sumedang	Cimanggung	Pasirnanjung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	235.696.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
18	2584361	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa Segmen Dayeuhluhur - Kaduwulung	Penanganan Jalan Desa Segmen Desa Dayeuhluhur - Kaduwulung	Dayeuhluhur - Kaduwulung, Kab. Sumedang	Ganeas	Dayeuhluhur	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	1.853.860.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
19	2584362	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Rehabilitasi Kantor Ruang Kepala Desa	Rehabilitasi Kantor Desa Dayeuhluhur	DUSUN DAYEUHLUHUR RT.02 RW.01, Kab. Sumedang	Ganeas	Dayeuhluhur	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	211.061.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
20	2584399	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Penanganan Jalan Desa Nagrak	Rabat Beton Ruas Jalan Desa Napak Tilas Dusun Cigalagah	Dusun Cigalah RT.05 RW.02, Kab. Sumedang	Buahdua	Nagrak	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	74.559.300,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
21	2584405	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Peningkatan Ruas Jalan Blok Karang Wakaf	Peningkatan Ruas Jalan Blok Karang Wakaf	Dusun Panyirapan Desa Mekarjaya, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Mekarjaya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	127.630.250,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
23	2584425	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Ruas Jalan tersebut rusak dan licin saat musim hujan, sehingga menghambat perekonomian masyarakat.	(Hotmix Ruas Jalan Dusun Ciawilarangan Rw.05	DUSUN CIAWILARANGAN RW 05 DESA CIHERANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Ciherang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	331.050.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
24	2584484	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan dalam kondisi rusak ringan yang merupakn akses jalan menuju kantor desa tanjungwangi sebagai akses pendidikan dan sebagai akses kegiatan masyarakat dalam melakukan aktifitas	Pembangunan HOTMIX Jalan salam -Desa	Ruas jalan salam -desa ,dusun 1 Rancagoong, Kab. Sumedang	Tanjungmed ar	Tanjungwangi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	484.682.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
25	2584513	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Kondisi Jalan Yang belum maksimal dan rusak perlu dilakukan perbaikan	Peningkatan Ruas Jalan Desa Sukagalih	Dsn Bosok, Dsn Nangkod, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Sukagalih	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
26	2584539	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Peningkatan Ruas Jalan Cipongpok - Pongpok	Peningkatan Ruas Jalan Cipongpok - Pongpok	Dusun Pongpok RT 17 RW 04, Kab. Sumedang	Paseh	Bongkok	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	200.267.304,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
27	2584545	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Lapang Sepak Bola Ciawi RW 05 Dusun Ciawi Desa Cikeruh pada saat ini dalam keadaan rusak sehingga kenyamanan bagi Warga Masyarakat yang tinggal diwilayah itu merasa terganggu dan mengakibatkan lambannya roda ekonomi diwilayah tersebut.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Blok Ciawi, Jalan Lapang Sepak Bola Ciawi	RT 01 RW 05 Dusun Ciawi Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kab. Sumedang	Jatinangor	Cikeruh	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
28	2584552	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	pembangunan tpt di bahu jalan mekarjaya di Dusun Cikadu Desa Cikadu RT 01 RW 07 sangat penting, karena jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat dan jalan desa yang menunjang pertanian, maka dengan ini kami atas pemerintah Desa Cikadu Kecamatan Situraja mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui dinas terkait untuk pembangunan TPT jalan Desa.	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Mekarjaya	Dusun Cikadu RT 01 RW 07 Desa Cikadu Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, Kab. Sumedang	Situraja	Cikadu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
29	2584586	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Keadaan Jalan Desa Dusun Sukahening RW 2 dan Dusun Sukamulya RW 1 rusak berlobang	Peningkatan ruas jalan dusun Sukahening -Sukamulya	Dusun Sukahening RW 2 dan Dusun Sukamulya	Jatinunggal	Pawenang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	321.360.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					RW 1, Kab. Sumedang								
30	2584634	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Akses jalan dari Dusun ke kantor Desa masih bebatuan jadi perlu dibangun supaya aktifitas warga lancar	Peningkatan Ruas Jalan Desa Pasirkaliki Babakanloa	Dusun Pasirkaliki RT 04 RW 10, Kab. Sumedang	Sukasari	Genteng	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	56.895.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
31	2584709	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Perlu kami informasikan, bahwa Jalan Desa Ciuyah – Umbul serang kondisinya rusak berat sehingga diperlukan penanganan segera		Dusun Ciuyah RT 01 RW 03, Kab. Sumedang	Cisarua	Ciuyah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
32	2584846	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Ruas jalan Karangangka 2 butuh penanganan segera dikarenakan merupakan jalan pendukung pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat yang melakukan kegiatan mobilisasi baik pertanian maupun perdagangan karena jalan tersebut akses utama dalam aktifitas semua masyarakat. Jalan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan aktifitas lainnya dalam	PENANGANA N RUAS JALAN DESA BLOK KARANGNA NGKA 2	Dusun Karangangka 2, Kab. Sumedang	Situraja	Karangheuleut	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	215.290.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
			transfortasi maupun jalan kaki dikarenakan bisa memudahkan serta mempercepat aktifitas perjalanan.										
33	2584906	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Ruas Jalan Cikurubuk - Cilumping sangat memprihatinkan	Penanganan Jalan Desa Ruas Jalan Cikurubuk-Cilumping Blok Loa	Dusun Cikurubuk rt 04 rw 03, Kab. Sumedang	Buahdua	Cikurubuk	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	394.799.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
34	2584934	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	kualitas jalan desa yang buruk	Peningkatan Ruas Jalan Desa Hotmix Jalan Cikukulu-Ciwaru	Dusun Cikukulu RT 2/2, Kab. Sumedang	Jatinunggal	Cimanintin	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	1.670.550.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
35	2584948	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	keadaan kantor desa yang rusak dan banyak yang bocor	Rehabilitasi Kantor Desa Cimanintin	Dusun Cimanintin RT 2/1, Kab. Sumedang	Jatinunggal	Cimanintin	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	500.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
36	2585119	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Sudah Rusak	Penanganan Ruas Jalan Sukahurip	Dusun Cikole RT 02 RW 02, Kab. Sumedang	Darmaraja	Ranggon	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	400.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
38	2585121	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Desa merupakan gerbang utama dalam pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat terutama dalam sarana dan prasarana khususnya bidang infrastruktur, oleh karena itu jalan desa Kaduwulung menuju Loji-Bangbayang segmen Kaduwulung kondisinya rusak parah sehingga perlu secepatnya diperbaiki demi kelancaran aktifitas transportasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraanya.	Peningkatan Jalan Loji-Bangbayang Segmen Kaduwulung	Jalan Loji-Bangbayang Segmen Kaduwulung, Kab. Sumedang	Situraja	Kaduwulung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	172.485.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
39	2585123	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Penghubung antar Desa dan wilayah di Desa Trunamanggala Masih ada yang Rusak dan memerlukan perbaikan	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Situ Burahol	Dusun Rahayu RT 003 Rw 002, Kab. Sumedang	Cimalaka	Trunamanggala	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	300.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
41	2585127	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Veteran II Desa Situraja Utara mengalami kerusakan	Peningkatan Ruas Jalan Veteran II	Dusun Cipadung RT.004 RW.008,	Situraja	Situraja Utara	Badan Keuangan dan	1	Paket	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan	Analisis Perencanaan dan Penyalura

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Kab. Sumedang			Aset Daerah				Keuangan	n Bantuan Keuangan
42	2585132	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Dusun Giriharja RW. 07 Rusak berat	Peningkatan /Penanganan Jalan Desa Dusun Giriharja RW. 07	Dusun Giriharja RT. 08 RW. 07, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Kebonjati	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
43	2585134	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Ruas Jalan Cikalapa-Karyabakti merupakan salah satu ruas jalan desa yang ada di Desa Cisampih, ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju Kantor Desa Cisampih, pada saat ini ruas jalan tersebut memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.	Peningkatan Ruas Jalan Desa (Hotmix) Blok Cikalapa-Karyabakti	Dusun Cibuyung RT 17 RW 05 , Kab. Sumedang	Jatigede	Cisampih	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	566.835.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
44	2585136	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Poros Desa Cikurubuk-Umbulserang rusak berat sehingga diperlukan penanganan	Peningkatan Ruas Jalan Poros Desa Cikurubuk-Umbulserang	Dusun Cikurubuk RT 01/02 RW 02, Kab. Sumedang	Cisarua	Cimara	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	201.765.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
45	2585140	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Desa Blok Kordon Desa Cibeureum Kulon kondisinya masih perkerasan sehingga diperlukan adanya peningkatan lapen atau hotmix karena sebagian besar ruas jalan tersebut rusak sehingga perlu perbaikan.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Blok Kordon	Dusun Babakan Pangkalan RT 03 RW 06 , Kab. Sumedang	Cimalaka	Cibeureum Kulon	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	149.512.500,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
46	2585142	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Ruas Jalan Kisepat-Lamuniser rusak berat sedangkan jalan tersebut merupakan jalan yang mendukung sektor perdagangan dan sektor lainnya. untuk itu harus ada penanganan agar transportasi berjalan lancar.	HotmixJalan Poros Desa Kisepat-Lamuniser	Dusun Lamuniser Desa Sukapura, Kab. Sumedang	Wado	Sukapura	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	456.228.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
47	2585144	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Meskipun secara umum masih difungsikan, kondisi fisik gedung Kantor Desa, khususnya pada bagian belakang memerlukan perhatian serius. Area tersebut saat ini mengalami penurunan kualitas dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika dilakukan rehabilitasi, bagian belakang gedung ini dapat difungsikan untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintahan Desa, seperti ruang rapat internal, ruang arsip atau kegiatan pembinaan kelembagaan lainnya.	Rehabilitasi Kantor Desa Cibeureum Kulon	Komplek Kantor Kepala Desa Cibeureum Kulon Jalan Sedar No.10 Desa Cibeureum Kulon, Kab. Sumedang	Cimalaka	Cibeureum Kulon	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	185.293.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
48	2585146	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Desa Kadakajaya-Sukasari yang berstatus jalan Kabupaten menghubungkan Wilayah Desa Sukasari, Genteng dan wilayah kecamatan tanjungsari desa Kadaka Jaya dengan panjang 5 Km menjadi akses warga dalam aktivitas Ekonomi maupun lainya pada ruas jalan jalan Desa Sukasari – Kadakajaya Segment Talingkup – parakan Bilik sudah banyak jalan yang dirasa tidak layak dikarenakan intensitas penduduk yang banyak dan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan Ruas jalan tersebut menjadi rusak	Rehabilitasi Jalan Kadakajaya – Sukasari Segmen Talingkup - parakan Bilik	Dusun Talingkup Desa Sukasari, Kab. Sumedang	Sukasari	Sukasari	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	268.736.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
49	2585148	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Kurangnya Kelayakan Pentaan Kantor Desa	Rehabilitasi Kantor Desa Cijati	Desa Cijati, Kab. Sumedang	Situraja	Cijati	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	85.900.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
50	2585150	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan desa yang masih berupa tanah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Kondisi jalan yang buruk, terutama saat musim hujan, dapat menghambat aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sekolah, bekerja, atau memasarkan hasil pertanian. Selain itu, jalan tanah juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan	Peningkatan Jalan Desa Blok Cibubul	Dusun Pasir Tengah RT 04 RW 05, Kab. Sumedang	Ujungjaya	Keboncau	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	120.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
51	2585152	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Desa BANYUASIH memiliki Tanah Kas Desa yang berada diwilayah Kaki Gunung Tampomas. Tanah Kas tersebut dijadikan objek lahan Pertanian oleh Masyarakat Desa Banyuasih untuk meningkatkan Pendapatan Perekonomian Masyarakat maupun Desa. Akses Jalan Menuju Tanah Kas Desa tersebut masih memerlukan perbaikan.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Sarongg	Dusun Sarongge RT 003/RW 005, Kab. Sumedang	Tanjungkerta	Banyuasih	-	-	Paket	300.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
52	2585164	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	perlu nya penanganan khusus untuk jalan desa ini,karena panjang dan tidak cukupnya dana desa untuk alokasi ke jalan ini	Pembangunan TPT Jalan Desa Blok Warungasem - Pondokserih	warung asem rt 15rw 05, Kab. Sumedang	Tanjungkerta	Tanjungmekar	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
53	2585175	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalannya rusak dan layak untuk diperbaiki	Peningkatan Jalan Desa Blok At Taqwa Dusun Licin	Dusun Licin RT.01-02 RW.03, RT.04 RW.02, Dusun Margamukti RT.04 RW.04, Kab. Sumedang	Cimalaka	Licin	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	186.338.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
54	2585202	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Terhambatnya Perekonomian Masyarakat terutama dari hasil Pertanian	Peningkatan Ruas Jalan Desa Sasakleumah-Pakuwangi Segmentasi Padasari - Cikahurip	Dusun Padasari RT 05 RW 03 Desa Pangadegan, Kab. Sumedang	Rancakalong	Pangadegan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	368.550.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
56	2585216	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Atap kantor desa rusak, banyak terjadi kebocoran yang mengakibatkan kerusakan arsip dan dokumen	Rehabilitasi Kantor Desa Sukadana	Jl. Pangsor No. 13 Dusun Bunter RT 02 RW 03, Kab. Sumedang	Cimanggung	Sukadana	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	78.500.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
57	2585220	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	PENINGKATAN KUALITAS RUAS JALAN CARIU	Peningkatan Kualitas Ruas Jalan Cariu	DUSUN KARANGANYAR RT 04 RW, Kab. Sumedang	Darmaraja	Karangpakuan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	75.232.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
58	2585221	[BKDes Reguler] -	PENINGKATAN KUALITAS RUAS JALAN POROS CILEMBU	Peningkatan Kualitas Ruas Jalan	DUSUN CILEMBU RT 02 RW 02,	Darmaraja	Pakualam	Badan Keuangan dan	1	Paket	338.975.000,00	Belanja Transfer (Bantuan	Analisis Perencanaan dan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
		Penanganan Jalan Desa		Poros Cilembu	Kab. Sumedang			Aset Daerah				Keuangan)	Penyaluran Bantuan Keuangan
59	2585222	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Masih adanya jalan desa yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan keamanan masyarakat	Peningkatan Ruas Jalan Desa Jalan Tanjungkerta - Cibodas	Dusun Sukasari - Dusun Cibodas, Kab. Sumedang	Tanjungkerta	Kertamekar	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	375.572.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
60	2585223	[BKDes Reguler] - Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	Desa Hari ini selalu menjadi trending topik dimana Pemerintah Desa harus bisa berakselerasi dengan dan mengikuti dengan dinamika yang ada dengan demikian Sakip Desa Merupakan salah satu cara untuk mengstimulus Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan Kesejahteraan Masyarakat.	Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	Desa Sukasari, Kab. Sumedang	Sukasari	Sukasari	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket		Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
61	2585268	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Desa Cibugel perlu ada penataan keadaan Infrastruktur yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat. Bangunan Kantor Desa Cibugel pada saat ini kondisinya dalam keadaan Rusak, hal tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan tata pemerintahan dan kegiatan pelayanan masyarakat di Desa Cibugel.	Rehabilitasi Kantor Desa Cibugel	JL. GADA NO.01 DUSUN CIDOMAS RT.001 RW.004, Kab. Sumedang	Cibugel	Cibugel	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	316.278.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
62	2585289	[BKDes Reguler] - Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	Dalam rangka melaksanakan peningkatan pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Desa	Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Cimara, Kab. Sumedang	Cisarua	Cimara	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
63	2585294	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Rehabilitasi Kantor Desa Tanjunghurip diusulkan mengingat kondisi Kantor Desa saat ini memerlukan perbaikan guna meningkatkan kenyamanan/keamanan saat bekerja dan meningkatkan pelayanan publik	Rehabilitasi Kantor Desa Tanjunghurip	Dusun Cibungur RT. 006 RW. 003, Kab. Sumedang	Ganeas	Tanjunghurip	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	210.375.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
64	2585304	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Penanganan Jalan Desa Dusun III di Hotmix	Penanganan Jalan Desa Dusun III	Dusun III (RW.005- RW.006), Kab. Sumedang	Cimalaka	Serang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	238.240.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
65	2585309	[BKDes Reguler] - Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan anggaran bantuan keuangan bersifat khusus, Pemberian bantuan keuangan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan manajemen kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa pemenang SakipDesa Award Tahun 2025 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SakipDesa) Tahun 2024	Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dusun Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, Kab. Sumedang	Situraja	Cikadu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
66	2585313	[BKDes Reguler] - Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	1. Belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi SAKIP merupakan sistem yang saling terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, sehingga keberhasilan penerapan SAKIP perlu didukung oleh kegiatan – kegiatan tersebut. 2. Kurang optimalnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa yang disusun. Akar masalah kurang optimalnya laporan akuntabilitas ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan Aparatur dalam penyusunan SAKIP.	Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	JALAN PAIGI - PANYINDANGAN NO. 53 DUSUN KEBON KALAPA RT 02 RW 02, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Margamukti	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
67	2585317	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan penghubung antar Desa kualitasnya harus ditingkatkan karena kondisinya rusak dan perlu perbaikan	Hotmix Jalan Desa Dusun Ciheulang RT 01 RW 07	Dusun Ciheulang RT 001 RW 007, Kab. Sumedang	Wado	Cilengkrang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	569.123.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
68	2585324	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	Dalam menciptakan pelayanan public yang nyaman dan tentram terutama menciptakan keindahan yang terdapat di Kantor Desa Sukamantri, maka perlu terciptanya suasana Kantor Desa yang nyaman. Sehingga perlu adanya perbaikan dari Kantor Desa Sukamantri, agar mencerminkan keindahan Kantor Desa	Rehabilitasi Kantor Desa Sukamantri	Dusun Sukamantri RT 001 RW 003 , Kab. Sumedang	Tanjungkerta	Sukamantri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	350.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
69	2585326	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Rusaknya ruas jalan yang menghubungkan dua desa yaitu Desa Padasuka dan Desa Girimukti sangat tidak memadai, yaitu jalan berlubang, hal ini sangat menghambat aktivitas ekonomi di desa dan juga mempersulit akses masyarakat untuk mengakses fasilitas umum seperti kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Padasuka-Girimukti	DUSUN CIBITUNG RT 01 RW 03 DESA PADASUKA, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Padasuka	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	102.073.300,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
70	2585330	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	SUDAH TIDAK LAYAKNYA RUAS JALAN UNTUK AKTIVITAS WARGA	Penanganan Jalan Desa Rw. 05 Rw. 04	RT. 01 RW. 05 s.d RT. 01 RW. 04 DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Jatihurip	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	500.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
71	2585335	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Kondisi eksisting jalan Desa Blok Bojongkondang pada saat ini adalah rusak berat sedangkan ruas jalan tersebut sangat sentral karena merupakan ruas jalan yang menjadi antara Dusun I dengan Dusun II Desa Girimukti sebagai akses jalur perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Ruas jalan Dusun Bojongkondang juga menjadi akses menuju ke Komplek Pendopo terpadu Pasir Samsir Desa Girimukti, sebagai salah satu potensi Desa Girimukti, jalan berlubang dan licin membahayakan pengguna jalan.	Penanganan Jalan Desa Blok Bojong Kondang	Dusun Bojongkondang, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Girimukti	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	266.151.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
72	2585370	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Poros Desa Blok Bojong-Cinumbang-Citeureup rawan longsor karena tanah dipinggir jalan belum dibangun Tembok Penahan Tanah (TPT) sehingga perlu untuk dibangun.	Pembangunan TPT jalan Desa Blok Bojong-Citeureup-Cinumbang	Dusun Bojong RW 06, Cinumbang RW 08 dan Citeureup RW 09, Kab. Sumedang	Jatinangor	Cilayung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	527.321.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
73	2585373	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Desa merupakan gerbang utama dalam pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat terutama dalam sarana dan prasarana khususnya bidang infrastruktur. Hal ini sejalan dengan program provinsi Jawa Barat yaitu Gerakan Membangun Desa. Sarana dan Prasarana jalan merupakan fasilitas yang sangat vital bagi Masyarakat terutama transportasi karena sangat berpengaruh pada kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Jalan sebagai prasarana transportasi yang mampu memberikan pelayanan pendukung	Peningkatan Ruas Jalan Desa Jambu Jaya	Dusun Jambu Jaya RT 02 RW 02, Kab. Sumedang	Conggeang	Jambu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
74	2585383	[BKDes Reguler] - Rehabilitasi Kantor Desa	KURANG MEMADAINYA FASILITAS YANG ADA DI DESA CIGENDEL	Rehabilitasi Kantor Desa	DUSUN CIKOHKOL RW 04, Kab. Sumedang	Pamulihan	Cigendel	-	-	Paket	70.964.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
													n Bantuan Keuangan
75	2585434	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Kondisi jalan Penghubung Desa cikareo Selatan - Desa Mulyajaya ini Sebagian masih bebatuan sebagian ada yang masih tanah .	Peningkatan Ruas Jalan Poros Desa Cilandak - Mulyajaya	(Dusun Cilandak - Mulyajaya) Dusun Cilandak RT 03 RW 06 , Kab. Sumedang	Wado	Cikareo Selatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	129.720.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
76	2585435	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa Dusun Sukadano	Pembangunan Jalan Dusun Babakan Embe - Sukadano	Dusun Sukadano, Kab. Sumedang	Sukasari	Mekarsari	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	315.540.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
77	2585436	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan yang di ajukan pada proposal ini merupakan jalan utama warga dengan akses jalan rusak berat dan keadaan curam	Peningkatan Jalan (Lapen) Dusun Cipari RW 03	Dusun Cipari RW 03, Kab. Sumedang	Cisitu	Linggajaya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	247.302.850,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
78	2585437	[BKDes Reguler] - Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	Elemen data dan hasil Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Desa merupakan tolak ukur prestasi desa	Peningkatan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SAKIP Desa Award)	Dusun Sukahurip RT 1 RW 5, Kab. Sumedang	Jatinunggal	Pawenang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VO LUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
79	2585457	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Jalan Desa merupakan sarana transportasi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, untuk itu perlu adanya penanganan bagi jalan yang kondisinya rusak	PENINGKATAN HOTMIK RUAS JALAN PERMUKIMAN DUSUN 3 CIPAREUAG	Dusun 3 Cipareuag Desa Haurngombang, Kab. Sumedang	Pamulihan	Haurngombang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	Paket	234.884.500,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
80	2587425	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Rehabilitasi jalan desa jemah dusun sabeulit/ bawah kujang sepasang, perlu kami informasikan jalan tersebut rusak berat	Rehabilitasi Jalan Desa Jemah Dusun Sabeulit Rt 001 Rw.002	Dusun Sabeulit Rt. 001 Rw. 004, Kab. Sumedang	Jatigede	Jemah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	254.295.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
81	2587733	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Peningkatan Ruas Jalan Bojongloa - Cilumping	Penanganan Jalan Desa Ruas Jalan Bojongloa-Cilumping	Dusun Bojongloa RT.021 RW.009 Desa Bojongloa, Kab. Sumedang	Buahdua	Bojongloa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	325.498.600,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
82	2587734	[BKDes Reguler] - Penanganan Jalan Desa	Peningkatan Ruas Jalan Cilumping - Bojongloa merupakan akses jalan penghubung antara Dusun Cilumping dengan Desa Bojongloa, namun akses jalan tersebut minim untuk di lalui karena ruas jalan sempit.	Penanganan Jalan Ruas Jalan Cilumping-Bojongloa	Dusun Cilumping Desa Cikurubuk Rt 02 Rw 06, Kab. Sumedang	Buahdua	Cikurubuk	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Paket	394.779.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
JUMLAH											22.601.763.544,00		

Terbilang: Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah

Sumber: Diolah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)

Tabel 5.4 Usulan Hibah dan Bantuan Sosial dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	2583157	KUBE SAHATE MANDIRI	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Modal merupakan salah satu factor penghambat pengembangan Usaha Ekonomi Produktif KUBE yang terjadi selama ini, karena itu penguatan modal yang diberikan kepada Kelompok Usaha (KUBE) merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat dan bijaksana. Melalui bantuan modal diharapkan aksesibilitas pengembangan Usaha Ekonomi Produktif KUBE dapat semakin berkembang	DUSUN CISURUPAN RT 002 RW 010, Kab. Sumedang	Cimanggung	Sawahdadap	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2	2583171	KUBE SUMBER	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kekurangan modal usaha sehingga kami memerlukan bantuan permodalan, guna mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE yang kami kelola	DUSUN SUKAMAHAN RW 05, Kab. Sumedang	Rancakalong	Sukamaju	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3	2583199	KUBE SUMBER REJEKI	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	karena kekurangan modal usaha kami tidak bisa mengembangkan usaha secara optimal	DUSUN NANGKOD RW 05, Kab. Sumedang	Rancakalong	Cibungur	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4	2583337	BUMDESMA JATIGEDE RANCAGE LKD	[Hibah] - Hibah kepada BUMDesma	Kekurangan Modal untuk Simpan Pinjam Kelompok Perguliran	Dusun Cijeungjing Rt. 003 Rw. 003, Kab. Sumedang	Jatigede	Cijeungjing	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Paket	289.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
5	2583399	BUMDESMA MOTEKAR TOHAGA LKD	[Hibah] - Hibah kepada BUMDesma	Kekurangan Modal untuk Simpan Pinjam Kelompok Perguliran	Dusun Tomo Rt 002 Rw 005, Kab. Sumedang	Tomo	Tomo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Paket	300.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
6	2583426	BUMDESMA WADO KERTARAJA LKD	[Hibah] - Hibah kepada BUMDesma	Kekurangan Modal untuk Simpan Pinjam Kelompok Perguliran	Dusun Wadogirang Rt 09 Rw 01, Kab. Sumedang	Wado	Wado	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
7	2584232	Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Islami	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Lembaga Keagamaan kami mengalami musibah kebakaran, sehingga memerlukan dana dari pihak kabupaten untuk memperbaiki bangunan yang telah terbakar	Dusun Pakemitan Rt 02 Rw 05, Kab. Sumedang	Cimalaka	Cimalaka	Sekretariat Daerah	1	Paket	250.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
8	2584576	KUBE SAUYUNAN	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Modal merupakan salah satu factor penghambat pengembangan Usaha Ekonomi Produktif KUBE yang terjadi selama ini, karena itu penguatan modal yang diberikan kepada Kelompok Usaha (KUBE) merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat dan bijaksana. Melalui bantuan modal diharapkan aksesibilitas pengembangan Usaha Ekonomi Produktif KUBE dapat semakin berkembang	Jl. Nyi Mas Gedeng Waru No. 6, Kab. Sumedang	Ganeas	Cikonengkulon	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
9	2584614	JUANG KENCANA	[Hibah] - Hibah kepada Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Masih Kurangnya Peran Perempuan dalam Ketahanan dan Ekonomi Keluarga terutama keluarga kurang mampu	Jl. Kemuning No. 133 RTb04 RW 08 Perum Mekarsari Desa Mekarjaya Kab. Sumedang, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Mekarjaya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	554	Orang	50.000.000,00	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota
10	2584674	FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN SUMEDANG	[Hibah] - Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sumedang	diperlukannya biaya operasional untuk mobilitas forum	Jalan Dano Komplek Pacuan Kuda No 9, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Kotakaler	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	pekerjaan	662.570.000,00	-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
11	2584694	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang	[Hibah] - Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sumedang	masih kurangnya sarana pendukung bagi sekretariat bawaslu untuk menunjang efektifitas SDM pengawasan bagi penyelenggara pemilu non tahapan	Jl. Karapyak No.12 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Situ	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	328.800.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
12	2584731	PESANTREN MINHAJUL KAROMAH	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	kurangnya tempat untuk tempat tinggal santri, semakin banyak yg ingin ke pesantren kami sedangkan tempatnya masih terbatas	dusun cikadu rt 02 rw 05 desa cikadu kec. situraja, Kab. Sumedang	Situraja	Cikadu	Sekretariat Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
13	2584750	PONDOK PESANTREN CIKALAMA	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Lembaga Keagamaan Kami, dalam hal ini Pondok Pesantren, Memiliki Kantor Sekretariat yang sudah tidak layak, atau dalam keadaan yang mengkhawatirkan, oleh karena itu kami mengajukan Permohonan Dana Hibah untuk Merahabilitasnya.	Dusun Cikalama RT 003 RW 010, Kab. Sumedang	Cimanggung	Sindangpakuon	Sekretariat Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
14	2584940	FKDM KABUPATEN SUMEDANG	[Hibah] - Hibah Kepada FKDM dalam rangka Pembinaan FKDM Tingkat Kecamatan	Dalam rangka pelaksanaan pembinaan FKDM Tingkat Kecamatan se Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025 diperlukan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan TA 2025. Oleh karena itu FKDM Kabupaten Sumedang mengajukan permohonan bantuan hibah organisasi FKDM Kepada Yth, Bapak Bupati Sumedang pada Perubahan APBD Tahun 2025	Jalan Pangeran Santri No. 111 Sumedang, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Kotakulon	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
15	2585135	PESANTREN AS-SALAM	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	KURANGNYA SARANA BELAJAR DI PONDOK PESANTREN AS-SALAM SEHIGGGA KAMI SANGAT MEMBUTUHKAN BANTUAN DAN PERHATIAN DARI PEMERINTAH UNTUK SAM SAMA MENCERDASKAN ANAK BANGSA YANG ADA DI PESANTREN KAMI.. SEMOGA BAPAK/IBU YANG MEMBUAT KEBIJAKAN DICATAT MENJADI AMAL SHALEH DIMATA ALLAH SWT AMIIN YA ALLAH YA ROBBAL ALAMIN...	DUSUN SINGKUP RT 01 RW 01, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Ciherang	Sekretariat Daerah	1	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
16	2585138	Pimpinan Daerah Aisyiyah Sumedang	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	PROGRAM KEGIATAN DAN PEMBERDAYAAN	Jl. Prabu Gajah Agung No. 15, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Kotakaler	Sekretariat Daerah	1	Paket	50.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
17	2585234	Yayasan Husnul Khotimah Pawenang	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Masih KURangnya tempat Untuk Kegiatan Belajar Mengajar, dikarenakan di Yayasan yang Kami Kelola terdapat pendidikan Non Formal yaitu : MDT, Pesantren Majelis Taklim dan RA. untuk itu kami mengusulkan bantuan keapda YTh Bapak Bupati Sumedang.	Dusun Pawenang Rt 02/ Rw 01, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Margamukti	Sekretariat Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
18	2585238	KUBE SETIA BAROKAH	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE SETIA BAROKAH)	DUSUN TANJAKAN RT.08 RW.03, Kab. Sumedang	Buahdua	Nagrak	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
19	2585247	Yayasan Insan Kamil Samoja	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Masih Kurangnya Ruang Kelas Belajar untuk Siswa dan Santri, dikarenakan Yayasan Kami Terdapat Pendidikan Formal dan Nonformal yang terdiri dari RA, MDT, dan MI Sehingga sarsan Tempat pembelajaran masih kurang	Dusun Samoja RT04/05, Kab. Sumedang	Situraja	Malaka	Sekretariat Daerah	1	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
20	2585301	KUBE BERKAH MANDIRI	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	untuk meningkatkan produktifitas kelompok usaha di bidang usaha ternak tentu memerlukan permodalan yang cukup sebagai penunjang kemajuan usaha, untuk itu kami bermaksud mengusulkan bantuan sosial modal usaha KUBE pada perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025	Dusun Cigobang Rt 004 Rw 003 , Kab. Sumedang	Rancakalong	Sukahayu	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
21	2585315	PERKUMPULAN RUKUN WARGA DAN TETANGGA	[Hibah] - Hibah kepada Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kabupaten Sumedang	Kekurangan Biaya Operasional untuk kelancaran kegiatan DPC ARWT Kabupaten Sumedang	Lingkungan Sindangraja Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Kota Kaler, Kab. Sumedang, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Kotakaler	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
22	2585316	PERKUMPULAN PENSIUNAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG "INSUN MEDAL"	[Hibah] - kepada Organisasi Purna Profesi (Persatuan Pensiunan Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumedang-Insun Medal)	Perlu adanya pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang	Girya Parigi Asri Jln. Anyelir 07Kel. Kotakulon Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Kotakulon	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	50.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
23	2585318	MTs Al Munawwaroh	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Sekolah terkena musibah roboh tahun 2024	Dusun Ciawilarangan RT 02 RW 07 Desa Ciherang, Kab. Sumedang	Sumedang Selatan	Ciherang	Sekretariat Daerah	1	Paket	131.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
24	2585325	Pondok Pesantren Nurrohman	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Tidak tersedianya fasilitas Aula (ruang serbaguna) yang dipakai untuk mendukung berbagai kegiatan pondok pesantren maupun lembaga lainnya dibawah naungan yayasan.	Dsn Kebon Kalapa 01/05 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Rancamulya	Sekretariat Daerah	1	Paket	200.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
25	2585331	BARISAN PEMUDA NUSANTARA	[Hibah] - kepada Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga (Barisan Pemuda Nusantara (BAPERAN))	kekurangan biaya untuk kelancaran kegiatan konsolidasi wawasan kebangsaan DPD Bapera Kabupaten Sumedang.	Jalan Serma Muchtar no.69 RT04/05,, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Situ	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	50.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
26	2585333	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA	[Hibah] - Hibah kepada Organisasi Purna Profesi	Permohonan Bantuan dana Hibah Operasional Kegiatan PWRI Kabupaten Sumedang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Jl. 11 April No. 68 Lingk. Tegalsari, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Talun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	kali	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
27	2585340	Mdta Al Khoeriyah	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	PERMOHONAN REHAB RUANGAN KELAS	Dusun Cikondang, Kab. Sumedang	Ganeas	Cikondang	Sekretariat Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
28	2585356	KUBE SINGAWADANA	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Dengan Keterbatasan Usaha Kelompok Perlu Adanya Peningkatan dorongan produktifitas anggota kelompok agar terus lebih berkembang salah satunya dengan pengembangan usaha ternak Domba agar kesejahteraan para kelompok dapat lebih meningkat	Dusun Jatiroke RT 07 RW 05 Desa Jatiroke, Kab. Sumedang	Jatinangor	Jatiroke	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
29	2585367	MASJID ASSALAM JATIMEKAR	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Masjid lama sudah tidak mencukupi layanan jamaah masjid khususnya saat sholat Jumat, dan lahan parkir terlalu menjorok ke jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan menuju destinasi wisata Jatigede	Jln. Raya Warungketan Desa Jatimekar RT 001 RW 001 Kec. Situraja Kab. Sumedang. Sumedang, Kab. Sumedang	Situraja	Jatimekar	Sekretariat Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
30	2585377	KUBE JAYA RAGA FISH FARM	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Karena kekurangan modal usaha, kami tidak bisa mengembangkan usaha secara optimal sehingga kami memerlukan bantuan permodalan guna mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE yang kami kelola	Dusun Bojong Eureun RT 002 RW 004, Kab. Sumedang	Jatinangor	Cibeusi	Dinas Sosial	1	kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
31	2585378	PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Pengembangan sarana prasarana dan digitalisasi Pondok Pesantren Darul Hikmah	Jln. Sukawangi No.02 Rt. 18 Rw. 07 Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang, Kab. Sumedang	Tanjungkerta	Tanjungmekar	Sekretariat Daerah	1	Paket	250.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
32	2585392	TPQ AL-HUSNA	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Ruangan belajar TPA yang kurang memadai dan kumuh	Lingkungan Sindangrajan RT01/RW10 Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang	Sumedang Utara	Kotakaler	Sekretariat Daerah	1	Paket	100.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Utara, Kab. Sumedang								
33	2585444	PP TAHFIDZUL QUR'AN AL HAMIIDIYYA H	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Untuk sarana prasarana ponpes al-hamidiyyah	Jln. Cipulus RT. 12 RW. 03 Desa Conggeang, Kab. Sumedang	Conggeang	Conggeang Wetan	Sekretariat Daerah	1	Paket	250.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
34	2585481	KUBE CIKOLE PUTRA	[Bansos] - Bantuan Sosial Stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KEKURANGAN MODAL USAHA, KAMI TIDAK BISA MENGEMBANGKAN USAHA SECARA OPTIMAL SEHINGGA KAMI MEMERLUKAN BANTUAN PERMODALAN GUNA MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI KUBE YANG KAMI KELOLA	DUSUN CIKOLE RT 04 RW 01, Kab. Sumedang	Cimalaka	Cikole	Dinas Sosial	1	Kelompok	20.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
35	2586630	Madrasah Diniyah Takmiliah AL Anwar	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Perlunya sarana Prasarana Dan Perbaikan Ruang Pembelajaran untuk Madrasah Diniyah Al Anwar.	Dusun Pasirsanten Rt 02/04, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Mulyasari	Sekretariat Daerah	1	Paket	150.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
36	2587422	PONDOK PESANTREN PERSIS AL-ASMA SUMEDANG	[Hibah] - Hibah kepada Badan atau Lembaga Keagamaan	Kendaraan Operasional dan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Area Parkir, dan Lanskap Pondok Pesantren	Jl. Prabu Gajah Agung No. 23 Rt 001 Rw. 006 Desa Jatihurip Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Jatihurip	Sekretariat Daerah	1	Paket	750.000.000,00	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah											5.791.370.000,00		
Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah													

Sumber: Diolah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025 (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian arah kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan dan sub kegiatan, penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2025 dalam memenuhi pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2025 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta masyarakat dan dunia usaha perlu

secara maksimal, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan Daerah;

2. Dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dasar penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2025 serta perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025;
4. Sebagai upaya untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan maka setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
5. Perubahan RKPD Tahun 2025, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sehingga untuk mengoptimalkan pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta perlu topangan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan (sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat).

Demikian perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian dari RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya memuat kebijakan asta cita serta Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Daerah pada Tahun 2025.



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR